

LAPORAN TAHUNAN

2017



PT JAMKRIDA JABAR



Nomor : SS-0012/DEKOM/JJ/IV/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Telaahan atas Laporan
Tahunan 2017

Bandung, 10 April 2018

Yth.
Direktur Utama
PT Jamkrida Jabar
Jl. Soekarno Hatta No. 592
Bandung – Jawa Barat

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar PT Jamkrida Jabar dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka berikut ini Dewan Komisaris menyampaikan telaahan atas Laporan Tahunan 2017 PT Jamkrida Jabar yang telah disusun dan disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris melalui Surat Nomor SS-0013/DIRUT/JJ/IV/2018, tanggal 9 April 2018, Perihal Laporan Tahunan PT Jamkrida Jabar tahun 2017.

1. Cakupan Laporan Tahunan.

Laporan Tahunan 2017 yang disusun Direksi sudah mencakup hal-hal yang harus dimuat dalam Laporan Tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Didalamnya juga memuat hal yang tidak dimuat pada beberapa laporan tahunan sebelumnya, yakni pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mulai dilaksanakan oleh PT Jamkrida Jabar (Perseroan) pada tahun 2017.

2. Laporan Keuangan & Kegiatan Usaha Perusahaan.

- a. Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 yang dimuat dalam Laporan Tahunan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam & Rasidi (HMR) yang memberikan opini "... laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jamkrida Jabar tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia". Penunjukan HMR sebagai KAP yang mengaudit Laporan Keuangan tahun buku 2017 dilakukan oleh Direksi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- b. Perusahaan berhasil membukukan Laba Sebelum Pajak sebesar Rp 5.347.779.170,- dan Laba Bersih Tahun Berjalan (setelah pajak) sebesar Rp 4.105.753.606,-. Capaian tersebut

lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang membukukan Laba Sebelum Pajak senilai Rp 6.865.378.120,- dan Laba Bersih tahun Berjalan (setelah pajak) senilai Rp 5.420.737.408,-. Jika dibandingkan dengan RKAP, maka capaian Laba Setelah Pajak tahun 2017 adalah kurang lebih 162,65% dari target yang ditetapkan dan capaian Laba Sebelum Pajak adalah kurang lebih 211,86%. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016, maka Laba Sebelum Pajak tahun 2017 adalah sekitar -22,11% lebih rendah dan Laba Bersih -28,73% lebih rendah.

- c. Menurunnya Laba Perseroan tahun 2017 terutama disebabkan oleh penyesuaian yang harus dilakukan Perseroan dalam perhitungan pengakuan Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Pendapatan Imbal Jasa Kafalah (IJK) untuk mengikuti Peraturan OJK yang terbaru. Penyebab lainnya adalah Beban Klaim yang dibayarkan oleh Perseroan dalam tahun 2017 jauh lebih besar, yakni kurang lebih Rp 14.274.790.505,- atau meningkat sekitar 74,95% dibandingkan tahun 2016.
- d. Laba tahun 2017 yang lebih rendah tidak mengindikasikan kinerja usaha Perseroan mengalami penurunan. Sebab, volume penjaminan tahun 2017 tumbuh 46,63% dari tahun 2016 atau dari sekitar 2,04 Triliun Rupiah di tahun 2016 menjadi 2,99 Triliun Rupiah di tahun 2017. Adapun rincian capaian volume penjaminan tahun 2017, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

LAPORAN VOLUME PENJAMINAN

PT JAMKRIDA JABAR
TAHUN 2016 DAN 2017

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	REALISASI 2016	RKAP 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN 2017	GROWTH 2016-2017
	1	2	3	4 = 3/2	5 = (3-1)/1
Per Kredit					
Produktif	1,263,271.99	942,319.30	976,196.70	103.60%	-22.72%
Non Produktif	775,349.27	2,178,548.20	2,008,871.40	92.21%	159.09%
Jumlah	2,038,621.26	3,120,867.51	2,985,068.09	95.65%	46.43%
Per Produk					
Kredit Umum	83,949.93	59,187.33	64,620.39	109.18%	-23.03%
Kredit Mikro	36,897.15	36,359.42	51,710.30	142.22%	40.15%
Kredit Multiguna	775,349.27	2,178,548.20	2,008,871.40	92.21%	159.09%
Kredit Konstruksi	605,488.12	465,281.03	473,334.71	101.73%	-21.83%
Bank Garansi	258,231.44	236,526.04	313,568.17	132.57%	21.43%
Surety Bond	104.61	2,073.82	319.67	15.41%	205.58%
Kredit Cinta rakyat	28,045.15	25,048.35	24,601.75	98.22%	-12.28%
Kredit Mikro Utama	250,555.58	117,843.33	48,041.70	40.77%	-80.83%
Jumlah	2,038,621.26	3,120,867.51	2,985,068.09	95.65%	46.43%

- e. Secara *cash basis*, volume penjaminan tahun 2017 menghasilkan dana sebesar 77,25 Miliar Rupiah bagi Perseroan. Tetapi, dari jumlah tersebut, hanya sebesar 30,93 Miliar Rupiah yang diakui sebagai Pendapatan IJP dalam tahun 2017 karena ketentuan pengakuan pendapatan secara *accrual basis*. Dengan demikian, IJP yang diakui oleh Perseroan di tahun 2017 adalah senilai Rp 30.928.168.179,- (IJP Bruto sebelum dikurangi restitusi). Dalam hal ini, Perseroan telah mentaati secara penuh ketentuan dari OJK mengenai pencatatan pendapatan IJP secara *accrual basis*.
- f. Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 1/POJK.5/2016 yang mewajibkan perusahaan penjaminan berinvestasi dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN), maka dalam tahun 2017 Perseroan telah melakukan investasi dalam bentuk SBN sebesar Rp 40.001.963.508. Di samping itu, dana Perseroan juga diinvestasikan dalam bentuk deposito. Dari kedua investasi tersebut diperoleh Pendapatan Investasi kurang lebih senilai Rp 13.625.450.700,- atau sekitar 10,03% lebih tinggi dibandingkan tahun 2016.
- g. Beban Usaha Perseroan yang terdiri dari Beban Operasional, Beban Sumber Daya Manusia, dan Beban Administrasi dan Umum meningkat sekitar 9,37% dibandingkan tahun 2016. Dalam hal ini, Beban Operasional meningkat kurang lebih 14,93%, Beban Sumber Daya Manusia meningkat sekitar 2,61%, dan Beban Administrasi dan Umum meningkat sekitar 32,38%. Tetapi, secara keseluruhan, realisasi Beban Usaha tersebut tidak jauh dari batas anggaran yang tersedia untuk tahun 2017, yakni sekitar 101,3%. Dengan kata lain, realisasi beban usaha Tahun 2017 lebih tinggi 1,3% dari anggaran yang tersedia.
- h. Beban Klaim yang dibayar Perseroan dalam tahun 2017 jauh lebih besar dibandingkan tahun 2016. Tetapi, secara keseluruhan rasio klaim Perseroan masih berkisar diangka 47,48% yang artinya tidak terlalu jauh berbeda dengan angka rasio klaim 2016 yang berkisar 26%. Apabila dilihat per skema penjaminan, maka rasio klaim tertinggi terjadi pada Penjaminan Kredit Multiguna, yakni sekitar 54,77%.

Rasio Klaim Tahun 2017

Uraian	IJP Diterima	dalam rupiah penuh	
		Beban Klaim yang Dibayarkan	% Rasio Klaim
	1	2	3 = 2/1
Kredit Umum	1,281,457,947.74	146,200,214.00	11.41%
Kredit Mikro	671,394,442.71	310,746,069.84	46.28%
Kredit Multiguna	18,314,222,783.31	10,030,323,909.05	54.77%
Kredit Konstruksi	3,642,707,420.61	1,956,981,974.90	53.72%
Bank Garansi	1,785,817,526.76	361,009,260.00	20.22%
Surety Bond	2,175,081.54	-	0.00%
Kredit Cinta Rakyat	823,928,437.37	288,574,243.50	35.02%
Kredit Mikro Utama	3,542,021,326.96	1,180,954,821.00	33.34%
Jumlah	30,063,724,967.00	14,274,790,492.29	47.48%

- i. Upaya penagihan Piutang Subrogasi tahun 2017 memperoleh hasil yang lebih rendah dibandingkan tahun 2016. Dalam hal ini, tahun 2017 hanya menghasilkan sekitar Rp 831.830.265,- sedangkan tahun 2016 Perseroan berhasil menagih sekitar Rp 990.039.422,-.
- j. Secara nominal, kontribusi Unit Usaha Syariah terhadap kinerja Perseroan dalam tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun 2016 meski belum cukup signifikan. Tetapi, secara relatif, kontribusi Unit Usaha Syariah terhadap Laba Sebelum Pajak mengalami peningkatan yakni sekitar 20,2% dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar 6,86%. Sebenarnya, IJK tahun 2017 meningkat sekitar 36,84% dibandingkan tahun 2016, tetapi Beban Klaim Unit Syariah tahun 2017 meningkat sekitar 380,12% dari tahun 2016.

3. Permasalahan yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Beberapa permasalahan yang masih menjadi masalah dalam kegiatan usaha Perseroan sepanjang tahun 2017 dan menjadi perhatian Dewan Komisaris antara lain:

- a. Perseroan belum berhasil memperbesar secara signifikan volume penjaminan dengan perbankan dan non bank di luar Bank Jabar Banten (BJB). Salah satu hal yang menjadi kendala terhadap hal tersebut adalah jumlah modal dasar Perseroan yang relatif masih kecil, sehingga kapasitas penjaminan Perseroan juga masih belum terlalu besar untuk cukup menarik bagi bank-bank nasional untuk bekerja sama.
- b. Perseroan belum berhasil mengembangkan Unit Syariah secara signifikan. Volume kafalah tahun 2017 sebagian besar merupakan hasil kerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Sepanjang tahun 2017, Perseroan bekerja sama dengan lima lembaga keuangan syariah, yaitu dengan empat BPRS dan Bank Jabar Banten Syariah (BJBS).
- c. Perseroan belum berhasil merealisasikan rencana beroperasi secara nasional atau di luar Provinsi Jawa Barat. Walaupun secara peraturan Perseroan sudah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan, tetapi sepanjang tahun 2017 peluang tersebut belum bisa direalisasikan.

4. Gaji dan Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris

Gaji dan tunjangan/honorarium Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi tahun 2017 berjumlah 2,82 Miliar Rupiah. Jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan tahun 2016 karena pada tahun 2016 Perusahaan memiliki tiga orang komisaris, sedangkan sejak Januari tahun 2017, Perusahaan hanya memiliki dua orang komisaris. Oleh karena itu, realisasi Gaji dan Tunjangan Dewan Komisaris tahun 2017 lebih kecil dari anggaran yang disediakan dalam RKAP.

5. Pandangan mengenai Prospek Usaha Perseroan dan Saran

Perusahaan penjaminan kredit memiliki peluang yang besar untuk berkembang, khususnya setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan. Sejalan dengan peluang tersebut, PT Jamkrida Jabar berpotensi untuk berperan lebih banyak dalam industri penjaminan kredit mengingat reputasinya yang cukup baik saat ini. Tetapi, peluang tersebut juga sekaligus menuntut perencanaan yang terukur, pengelolaan yang baik, dan permodalan yang kuat.

Direksi perlu melakukan langkah-langkah yang lebih kreatif dan terencana untuk memanfaatkan dan menciptakan peluang. Analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman mutlak perlu dilakukan, agar terformulasi strategi yang tepat dan memudahkan alokasi sumber daya secara fokus. Penetapan target berdasarkan pemetaan pasar dan peluang perlu dilakukan untuk menghindari langkah-langkah kerja yang tidak terencana dengan baik. Direksi perlu dan harus melakukan kegiatan usaha yang berkehati-hatian serta menerapkan tata kelola yang baik, manajemen risiko yang handal, dan memperhatikan kesesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.

6. Apresiasi

Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada Perseroan selama ini. Disamping itu, Dewan Komisaris juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Direksi dan seluruh karyawan PT Jamkrida Jabar yang telah berhasil membawa Perseroan pada kondisi yang baik seperti sekarang ini. Saat ini, Perseroan telah memiliki citra yang kuat sebagai Perusahaan Penjaminan dengan kualitas layanan yang diakui baik oleh para penerima jaminan. Disamping itu, dinilai sebagai salah satu perusahaan penjaminan kredit daerah yang baik oleh OJK dan diakui kiprahnya oleh sesama perusahaan yang berada dalam industri penjaminan kredit.

7. Harapan

Semoga capaian yang sudah baik ini dapat bersama-sama kita pertahankan dan bahkan kita tingkatkan di tahun-tahun yang akan datang, sehingga PT Jamkrida Jabar menjadi BUMD yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.

Demikian telaahan dari Dewan Komisaris dan selanjutnya kami berharap Direksi dapat segera mempersiapkan RUPS Tahunan 2018 dan menyampaikan Laporan Tahunan 2017 dalam RUPS Tahunan tersebut untuk mendapatkan persetujuan.

Hormat kami,

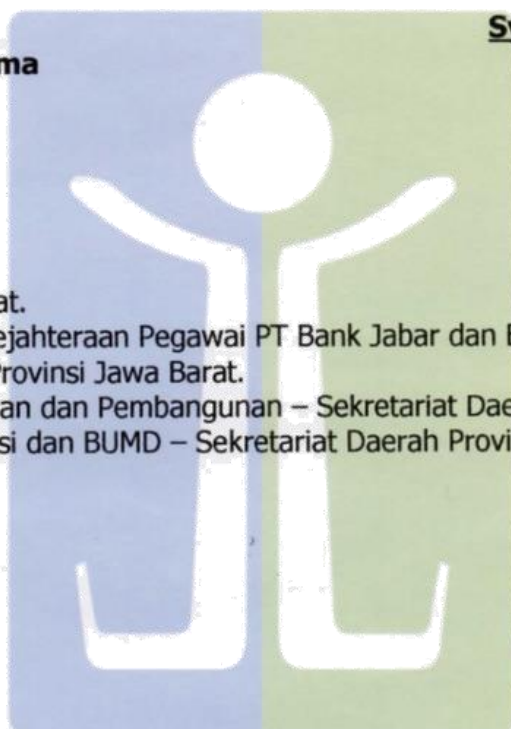
DEWAN KOMISARIS

ttd

ttd

Rodhiallah
Komisaris Utama

Syafrial Firdaus
Komisaris



Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat.
2. Yth. Ketua Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Bank Jabar dan Banten.
3. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan – Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Yth. Kepala Biro Investasi dan BUMD – Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

KATA PENGANTAR

PT Jamkrida Jabar lahir untuk menjadi solusi bagi KUMKM sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit milik Pemerintah Jawa Barat. Dengan niat luhur meningkatkan kegiatan ekonomi KUMKM dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat, serta berkat dukungan dan bantuan berbagai pihak, Perseroan secara bertahap mampu meletakkan pondasi awal sebagaimana yang diharapkan dalam proses pendiriannya yaitu salah satu motor penggerak pengembangan KUMKM dan perekonomian Jawa Barat. Dalam perkembangannya, peran PT Jamkrida Jabar mulai dirasakan KUMKM dalam membantu akses permodalan ke lembaga keuangan. PT Jamkrida Jabar memiliki tekad yang kuat untuk selalu bertumbuh dan berkembang secara positif guna mempertahankan dan meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian Jawa Barat khususnya bagi pengembangan ekonomi KUMKM.

Laporan Tahunan PT Jamkrida Jabar disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan Perusahaan selama tahun 2017. Selain laporan keuangan, Laporan Tahunan ini juga menyajikan aktivitas Perseroan dalam usahanya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, juga prospek Perseroan selama beberapa tahun kedepan.

Laporan Tahunan ini juga sebagai wujud penerapan *Good Corporate Governance* sebagai langkah transparansi informasi dan semakin memantapkan keberadaan Perseroan di tengah perkembangan ekonomi Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Adapun dasar penyusunan Laporan Tahunan ini, meliputi:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Anggaran Dasar Perusahaan.
- c. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2017

- d. Laporan Keuangan *Audited* periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- e. Laporan hasil *self assessment Good Corporate Governance*.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

iii



LAPORAN MANAJEMEN

Laporan Dewan Komisaris	viii
Laporan Dewan Pengawas Syariah	xiv
Laporan Direksi	xix
Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan	xxv

KILAS KINERJA PERSEROAN

Ikhtisar Kinerja	1
Ikhtisar Keuangan	2
Ikhtisar Operasional	4
Peristiwa Penting PT Jamkrida Jabar 2017	5




PROFIL PERSEROAN

Sekilas Perseroan	8
Filosofi Logo Perseroan	9
Tonggak Sejarah	12
Visi Misi Perseroan	20
Nilai-Nilai Perseroan	21



Kegiatan Usaha	22
Komposisi Pemegang Saham	23
Profil Dewan Komisaris	24
Profil Dewan Pengawas Syariah	25
Profil Direksi	26
Komposisi Karyawan	28
Struktur Organisasi	29

KINERJA PERSEROAN

Aspek Operasional	31	
Aspek Penjaminan	32	
Aspek Keuangan	35	
Aspek Manajemen Risiko	42	
Aspek Sumber Daya Manusia	48	
Aspek Umum	54	
Aspek Teknologi dan Kesisteman	55	
Aspek Pengawasan	59	



UNIT USAHA SYARIAH

Laporan Hasil Pengawasan	61
Dewan Pengawas Syariah	
Kinerja Unit Usaha Syariah	66

PROSPEK DAN PENGEMBANGAN USAHA

Prospek dan Pengembangan Usaha	69
--------------------------------	----





KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan Dividen

71

RENCANA DAN STRATEGI BISNIS TAHUN 2018

Rencana dan Strategi Bisnis
Tahun 2018

73



RENCANA KERJA TAHUN 2018

Rencana Kerja Tahun 2018

77



TATA KELOLA PERSEROAN

Tata Kelola Perseroan

80

Penerapan *Good Corporate Governance*

80

Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance*

81

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

82

Dewan Komisaris

89

Dewan Pengawas Syariah

100



Direksi	105
Sekretaris Perusahaan	120
Satuan Pengawas Internal (SPI)	122
<i>Road Map Good Corporate Governance</i>	123
<i>Pedoman Good Corporate Governance</i>	124
<i>Hasil Self Assessment Good Corporate Governance</i>	129

LAPORAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	135
--	-----



LAPORAN AUDIT

Surat Pernyataan Manajemen	139
Laporan Auditor Independen	140
Laporan Keuangan	142
Konsolidasian Tahun 2016-2017	

LAPORAN MANAJEMEN



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera bagi kita semua

Para Pemegang Saham yang kami Hormati,



Dewan Komisaris sebagai salah satu organ PT Jamkrida Jabar (Perseroan) berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan berwenang dan bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi berkaitan dengan pengelolaan Perseroan. Melalui pelaksanaan tugas Dewan Komisaris tersebut, diharapkan dapat menjadikan Direksi senantiasa memfokuskan pengelolaan Perseroan pada upaya untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham dengan memperhatikan aspek kehati-hatian, tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan kesesuaian terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas-tugasnya dengan memantau,

mencermati, membahas, dan menyampaikan pandangan serta saran kepada Direksi. Selain dengan mengacu pada laporan-laporan yang diterima Direksi atau pun data yang diperoleh Dewan Komisaris melalui permintaan kepada Direksi, Dewan Komisaris juga melaksanakan tugasnya dengan melakukan rapat-rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang dijadwalkan secara berkala (setiap bulan) atau pada waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan atau permintaan Dewan Komisaris atau Direksi. Laporan Pengawasan oleh Dewan Komisaris, secara berkala dilaporkan kepada pemegang saham melalui Laporan Triwulanan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris setelah tahun buku berakhir.

KINERJA DIREKSI

Direksi telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik, sehingga Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugasnya tanpa hambatan yang berarti sepanjang tahun 2017. Informasi, data dan dokumen yang diperlukan Dewan Komisaris dapat diperoleh secara transparan, sehingga Dewan Komisaris dapat memberikan pandangan-pandangannya secara objektif mengenai kinerja Perseroan dan jalannya pengelolaan Perseroan yang telah dilakukan oleh Direksi.

Banyak hal-hal penting yang telah menjadi perhatian dan dibahas dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dalam tahun 2017, yaitu antara lain mengenai:

1. Rencana dan langkah-langkah yang akan dilakukan Perseroan dalam memanfaatkan peluang beroperasi secara nasional;

2. Pengembangan sistem informasi dan upaya meningkatkan kehandalan aplikasi-aplikasi pendukung yang telah dikembangkan dan diimplementasikan Perseroan;
3. Rasio klaim dan langkah-langkah mitigasi risiko penjaminan;
4. Upaya meningkatkan volume kafalah unit syariah;
5. Upaya dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan volume transaksi dengan mitra di luar Bank Jabar Banten;
6. Efektifitas penagihan piutang subrogasi;
7. Kebutuhan penambahan modal dalam kaitannya dengan upaya mempertahankan dan memperbesar kapasitas penjaminan oleh Perseroan;
8. Penyusunan rencana kerja yang lebih terukur dengan menetapkan volume target per skema penjaminan untuk masing-masing cabang Bank Jabar Banten dan mitra-mitra lainnya;
9. Kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung operasional Perseroan;
10. Tata kelola Perseroan dan kualitas pelaporan;
11. Pengaruh perhitungan pengakuan atas Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap capaian target RKAP 2017 serta usulan Perubahan RKAP.

KINERJA TAHUN 2017

Laporan Keuangan PT Jamkrida Jabar per 31-12-2017 memperlihatkan Laba Bersih Tahun Berjalan (setelah pajak) yang berhasil dibukukan Perusahaan pada tahun 2017 adalah sebesar 4,11 Miliar Rupiah. Dengan demikian, Perusahaan telah berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam RKAP tahun 2017 (Perubahan) sebesar 2,52 Miliar Rupiah. Meski demikian, realisasi total beban Perseroan di tahun 2017 lebih besar dibandingkan dengan total beban yang dianggarkan dalam RKAP 2017 (Perubahan) yaitu sebesar 2,31% lebih tinggi. Hal ini lebih disebabkan oleh meningkatnya beban klaim dan beban regaransi.

Capaian positif lainnya adalah bahwa Perusahaan juga berhasil mencapai target volume transaksi penjaminannya sebesar 2,99 Triliun Rupiah atau 95,65% dari target dalam RKAP. Dengan volume penjaminan sebesar itu, Perusahaan telah mampu melayani 18.157 UMKM yang mempekerjakan kurang lebih 650.512 tenaga kerja.

Selanjutnya, Uraian mengenai kinerja Perseroan tahun 2017 dan perbandingannya dengan capaian tahun sebelumnya disajikan lebih lengkap pada Telaahan Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan 2017.

PANDANGAN TERHADAP PROSPEK USAHA

Perusahaan penjaminan kredit memiliki peluang yang besar untuk berkembang, khususnya setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan. Sejalan dengan peluang tersebut, PT Jamkrida Jabar berpotensi untuk berperan lebih banyak dalam industri penjaminan kredit mengingat reputasinya yang cukup baik saat ini. Tetapi, peluang

tersebut juga sekaligus menuntut perencanaan yang terukur, pengelolaan yang baik, dan permodalan yang kuat.

Direksi perlu melakukan langkah-langkah yang lebih kreatif dan terencana untuk memanfaatkan dan menciptakan peluang. Analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman mutlak perlu dilakukan, agar terformulasi strategi yang tepat dan memudahkan alokasi sumber daya secara fokus. Penetapan target berdasarkan pemetaan pasar dan peluang perlu dilakukan untuk menghindari langkah-langkah kerja yang tidak terencana dengan baik. Direksi perlu dan harus melakukan kegiatan usaha yang berkehati-hatian serta menerapkan tata kelola yang baik, manajemen risiko yang handal, dan memperhatikan kesesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.

APRESIASI

Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada Perseroan selama ini. Disamping itu, Dewan Komisaris juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Direksi dan seluruh karyawan PT Jamkrida Jabar yang telah berhasil membawa Perseroan pada kondisi yang baik seperti sekarang ini. Saat ini, Perseroan telah memiliki citra yang kuat sebagai Perusahaan Penjaminan dengan kualitas layanan yang diakui baik oleh para penerima jaminan. Disamping itu, dinilai sebagai salah satu perusahaan penjaminan kredit daerah yang baik oleh OJK dan diakui kiprahnya oleh sesama perusahaan yang berada dalam industri penjaminan kredit.

Semoga PT Jamkrida Jabar dapat mempertahankan dan terus meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang, sehingga PT Jamkrida Jabar menjadi BUMD yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandung, April 2018

Atas nama Dewan Komisaris

ttd

Rodhiallah

Komisaris Utama

PT Jamkrida Jabar

LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillaahirrahmaanirrahim
Para Pemegang Saham yang kami Hormati,

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, kita masih diberikan rizki yang berlimpah. Sholawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam merealisasikan fatwa yang telah diputuskan oleh DSN-MUI yaitu Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah dan Fatwa DSN-MUI No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah, Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai pengawas di dalam Perusahaan Penjaminan Syariah ataupun Perusahaan Penjaminan yang melakukan sebagian usaha Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah (UUS) seperti PT Jamkrida Jabar.



Dalam kesempatan ini, patut kiranya saya atas nama Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengucapkan selamat kepada manajemen dan seluruh karyawan PT Jamkrida Jabar atas capaian kinerja yang membanggakan. DPS turut bersyukur bahwa di tengah penyesuaian berbagai kebijakan dan persaingan yang cukup ketat, Perseroan masih mampu menjaga kinerja penjaminannya pada kategori positif.

PENGAWASAN DI TAHUN 2017

Selama tahun 2017, DPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, DPS terlibat dalam serangkaian kegiatan rapat baik rapat internal, rapat dengan Direksi atau dengan jajaran di bawah Direksi, atau rapat dengan Dewan Komisaris. DPS juga telah melakukan *review* atas suatu kebijakan atau SOP yang telah/akan ditetapkan dengan memberikan opini atau rekomendasi berdasarkan ketentuan Syariah serta melakukan *review* atas pelaksanaan produk penjaminan syariah maupun pelayanan yang diberikan kepada mitra dengan cara mengambil uji petik transaksi sebagai bahan penilaian dan memberikan rekomendasi-rekomendasi berdasarkan ketentuan syariah.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan DPS PT Jamkrida Jabar selama tahun 2017 antara lain mencakup:

1. Rapat dan diskusi dengan pihak internal terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
2. Mewakili dan/atau mendampingi Perseroan untuk rapat, diskusi dan konsultasi kepada pihak eksternal terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru atau fitur produk yang dituangkan dalam ketentuan internal atau SOP agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

4. Menilai secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap pelaksanaan penjaminan syariah.
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari Satuan Pengawas Internal (SPI) Perseroan dalam melaksanakan tugasnya.
6. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah serta menyampaikan hasil evaluasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan DSN-MUI dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan DPS.

Berdasarkan hasil pengawasan selama tahun 2017, DPS menyampaikan bahwa secara umum operasional Unit Usaha Syariah (UUS) PT Jamkrida Jabar telah sesuai dengan prinsip syariah, fatwa DSN-MUI, dan opini DPS. Kesalahan/kekurangan yang terjadi pada kegiatan operasional dikarenakan perbedaan pemahaman individu atas suatu produk dan pedoman operasional penjaminan oleh UUS. Atas kesalahan/kekurangan tersebut, DPS merekomendasikan agar segera dilakukan perbaikan-perbaikan setelah kesalahan/kekurangan tersebut diketahui. Apabila terdapat unsur kesengajaan sehingga terdapat prinsip syariah yang tidak terpenuhi, maka terhadap kesalahan/kekurangan yang disengaja tersebut harus ada konsekuensi.

Pemenuhan prinsip syariah memang tidak mudah, namun juga tidak boleh dianggap sederhana. Hal ini terkait dengan sah atau tidaknya pendapatan yang diperoleh dan penjaminan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya KUMKM di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, seluruh kegiatan operasional UUS harus dipastikan berjalan sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku bagi UUS. Insya Allah dengan kesadaran dan komitmen yang kuat maka kualitas UUS PT Jamkrida Jabar akan semakin baik pada tahun-tahun yang akan datang.

Dengan kerja sama yang baik dari Direksi dan segenap karyawan PT Jamkrida Jabar, semua kegiatan baik pada aspek pengembangan produk baru hingga kegiatan operasional penjaminan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang berlaku di UUS PT Jamkrida Jabar. Sebagaimana diketahui, bahwa DPS menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi pengembangan produk penjaminan yang dimiliki oleh UUS PT Jamkrida Jabar. Kajian telah dilakukan terhadap pemenuhan prinsip syariah terutama dalam hal kesesuaian atau adanya ketidaksesuaian serta ada dan tidaknya rujukan fatwa. Seluruh aktivitas DPS tersebut juga telah didokumentasikan dan dilaporkan kepada OJK dan DSN-MUI dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan DPS.

HARAPAN DI TAHUN 2018

Menyongsong tahun 2018, DPS berharap agar UUS PT Jamkrida Jabar dapat terus menjaga bahkan meningkatkan kinerjanya semaksimal dan sebaik mungkin dengan tetap menjaga pemenuhan prinsip kehati-hatian dan syariah dalam menjalankan kegiatan operasional penjaminannya. DPS bersyukur bahwa komunikasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Divisi tetap terjaga dengan baik. Sinergi yang telah dibangun melalui rapat-rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi maupun Divisi agar senantiasa dijaga dan terus ditingkatkan dalam rangka menjaga kualitas kegiatan operasional penjaminan syariah UUS PT Jamkrida Jabar agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar prinsip syariah.

APRESIASI

Sekali lagi DPS turut bersyukur atas capaian kinerja UUS PT Jamkrida Jabar yang menggembirakan di tahun ini. Pada kesempatan ini DPS juga senantiasa mengingatkan manajemen PT Jamkrida Jabar, khususnya Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar, agar tetap berkomitmen untuk menjaga

pemenuhan prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akhir kata, DPS berharap agar UUS PT Jamkrida Jabar dapat mewujudkan visi PT Jamkrida Jabar menjadi perusahaan penjaminan kredit terpercaya yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam hal penjaminan kredit syariah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandung, April 2018

Atas nama Dewan Pengawas Syariah

ttd

Zaini Abdul Malik

Ketua Dewan Pengawas Syariah

PT Jamkrida Jabar

LAPORAN DIREKSI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera bagi kita semua

Para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, serta pemangku kepentingan lainnya yang kami Hormati,



Perkenalkan kami, selaku Direksi PT Jamkrida Jabar menyampaikan Laporan Tahunan untuk periode tahun 2017. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban kami atas upaya mencapai target kinerja dan memenuhi visi dan misi Perusahaan.

PT Jamkrida Jabar sejak awal tetap konsisten dalam membantu masyarakat, khususnya KUMKM di Provinsi Jawa Barat, untuk mengakses permodalan dari Lembaga Keuangan. Kinerja yang baik terus diberikan oleh Perseroan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadikan berbagai pihak memberikan apresiasi kepada Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga terus berusaha mengembangkan produk penjaminan yang dipasarkan sehingga mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat

terhadap kredit permodalan yang diperlukan.

Selanjutnya, izinkan kami untuk memaparkan kinerja yang dicapai Perseroan sepanjang tahun 2017.

TANTANGAN, CAPAIAN SASARAN STRATEGIS DAN OPERASIONAL PADA TAHUN 2017

Tahun 2017 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Perseroan. Namun demikian, Perseroan masih mampu mencatatkan pertumbuhan kinerja penjaminan yang positif.

Tantangan yang dihadapi Perseroan antara lain minimal mempertahankan posisi pasar sebagai salah satu Perusahaan Penjaminan Kredit di Provinsi Jawa Barat. Dalam mempertahankan posisi tersebut, Perseroan harus mengatasi dinamika perekonomian dan penjaminan kredit di Provinsi Jawa Barat yang terus berkembang. Selain itu, ketersediaan sistem yang handal pada era digital seperti sekarang ini menjadi tantangan Perseroan dalam mengembangkan usahanya.

Dalam menghadapi tantangan eksternal, Perseroan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada para mitra maupun pemangku kepentingan.

Sebagai usaha dalam menghadapi tantangan internal, Perseroan akan terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perseroan dan mengoptimalkan kemampuan Perseroan dalam meningkatkan kehandalan sistem informasi yang terintegrasi.

Di luar kondisi tersebut, pada tahun 2017 secara garis besar kinerja penjaminan tumbuh positif sebesar 25,73% dari tahun 2016. Di samping

itu, pertumbuhan signifikan terjadi pada beban klaim yang tumbuh sebesar 74,95% dari tahun 2016.

PT JAMKRIDA JABAR MENJAGA PERTUMBUHAN POSITIF

Tahun 2017, Perseroan terus berusaha untuk meningkatkan portofolio penjaminan kredit yang dapat dilihat dari perkembangan penjaminan kredit Perseroan di tahun 2017 tumbuh sebesar 25,73% dari tahun 2016.

Pada tahun 2017, pencatatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), setelah dikurangi nilai restitusi, tumbuh sebesar 4,86%. Pertumbuhan IJP tersebut disebabkan oleh banyaknya kredit yang dijamin dengan tenor kredit jangka panjang.

Dari sisi biaya, beban usaha Perseroan masih dapat terjaga dengan tumbuh sebesar 9,37% atau senilai 1,22 Miliar Rupiah dari tahun 2016. Sehingga Perseroan masih dapat membukukan laba bersih senilai 4,11 Miliar Rupiah. Pada tahun 2017, investasi difokuskan pada bidang peningkatan kapabilitas teknologi informasi dalam mengakomodir kebutuhan internal maupun eksternal Perseroan.

Dalam melaksanakan penjaminan kredit, Perseroan terus berupaya untuk menjalankan bisnis dengan prinsip kehati-hatian dengan risiko yang terukur sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko penjaminan, risiko klaim, risiko keuangan, risiko hukum dan risiko lainnya yang berpotensi merugikan Perseroan.

RENCANA DI TAHUN 2018

Penjaminan kredit di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, masih menyimpan potensi yang besar. Penetrasi produk penjaminan yang masih

rendah merupakan peluang yang bisa dimaksimalkan oleh Perseroan pada tahun 2018. Di sisi lain, pertumbuhan KUMKM dan literasi keuangan yang terus digalakkan, akan membuat kesadaran akan pentingnya produk penjaminan semakin meningkat.

Menyikapi potensi tersebut, Perseroan akan terus berupaya melakukan edukasi pasar untuk meningkatkan penetrasi produk penjaminan di masyarakat, khususnya KUMKM di Provinsi Jawa Barat, dan terus memperbaiki layanan dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Oleh sebab itu, beberapa langkah akan menjadi prioritas Perseroan di tahun 2018, diantaranya tetap mempertahankan produk penjaminan yang kinerjanya sudah baik dan meningkatkan produk penjaminan yang berkinerja dibawah target.

Untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan layanan kepada masyarakat dan memastikan pemasaran produk penjaminan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya KUMKM di Provinsi Jawa Barat, serta dijalankan sesuai dengan aturan Perseroan yang berlaku, Perseroan menyediakan fasilitas pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi SDM Perseroan.

PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

Sebagai Perusahaan Penjaminan yang merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat, Perseroan menyadari bahwa dalam mengelola dana masyarakat adalah penting untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) yang sesuai dengan arahan OJK. Hal ini ditempuh oleh Perseroan sebagai bagian dari tuntutan industri keuangan di Indonesia.

Pada tahun 2017, Perseroan terus memantau berbagai pembaruan kebijakan yang berkaitan dengan operasional Perseroan. Perseroan

senantiasa berupaya untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG pada setiap aspek bisnis dan operasionalnya. Hal ini perlu dilakukan secara terintegrasi dan bersamaan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan jalannya Perseroan.

Dalam kegiatan operasional sehari-hari, Perseroan sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG. Hal ini tak lain untuk mewujudkan misi Perseroan dalam meningkatkan kegiatan ekonomi KUMKM dan memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan melalui penjaminan kredit yang efisien, profesional dan berintegritas. Oleh karena itu, Perseroan selalu berusaha memberi contoh yang baik dalam penerapan prinsip GCG dan praktik bisnis.

Secara rutin Perseroan akan melaporkan berbagai hal terkait dengan penerapan prinsip GCG kepada OJK.

Beberapa inisiatif yang terkait dengan prinsip GCG yang dilakukan Perseroan pada tahun 2017, diantaranya menyusun pedoman dari GCG yang merupakan himpunan pokok-pokok pengelolaan perusahaan yang kemudian akan dijabarkan lebih lanjut dalam piagam kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai acuan penerapan GCG di Perseroan.

Adapun pedoman GCG yang disusun oleh Perseroan, diantaranya *Code of Corporate Governance*, *Code of Conduct*, *Board Manual*, Keterbukaan Informasi Publik, *Whistleblowing System*, *Committee Audit Charter*, dan *Internal Audit Charter*.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Perseroan telah melaksanakan penilaian sendiri atas pelaksanaan implementasi tata kelola perusahaan yang baik atau GCG dan hasilnya masuk ke dalam kategori Baik, tetapi hal tersebut tidak akan mengurangi upaya-upaya Perseroan untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas kepatuhan atas ketentuan-ketentuan yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini izinkan kami berterima kasih kepada segenap pemangku kepentingan PT Jamkrida Jabar yang terus menunjang dan mendukung perkembangan Perseroan selama ini. Tuntutan pertumbuhan dan perkembangan Perseroan yang perlu kami lakukan di masa mendatang, jika dilakukan secara bersama-sama kami yang dapat melakukannya dan mencapai hasil yang lebih baik dan berkesinambungan untuk mewujudkan visi Perseroan yaitu menjadi Perusahaan Penjamin Kredit terpercaya yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam hangat dari segenap Direksi

Bandung, April 2018

Atas nama Direksi,

ttd

Tri Būdhi Muljawan

Direktur Utama
PT Jamkrida Jabar

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN TAHUNAN

Laporan Tahunan berikut Laporan Keuangan dan informasi lain yang terkait dibuat dengan keadaan sebenarnya oleh Direksi yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris dengan membubuhkan tanda tangan di bawah ini.

DEWAN KOMISARIS

PT Jamkrida Jabar

ttd

Rodhiallah
Komisaris Utama

ttd

Syafrial Firdaus
Komisaris

DIREKSI

PT Jamkrida Jabar

ttd

Tri Budhi Muljawan
Direktur Utama

ttd

Budi Setyono
Direktur Keuangan

ttd

Asep Gunawan Sirad
Direktur Operasional

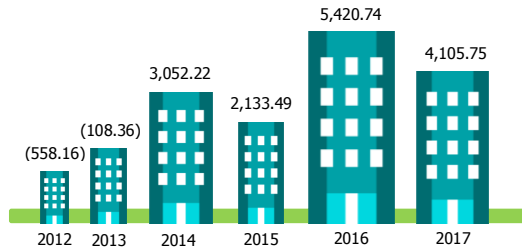
KILAS KINERJA PERSEROAN



IKHTISAR KINERJA

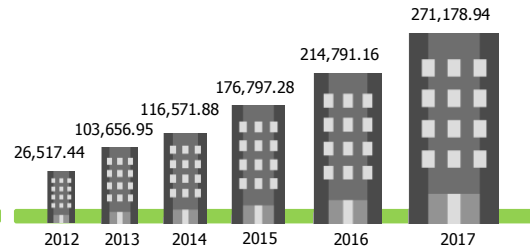
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

dalam Jutaan Rupiah



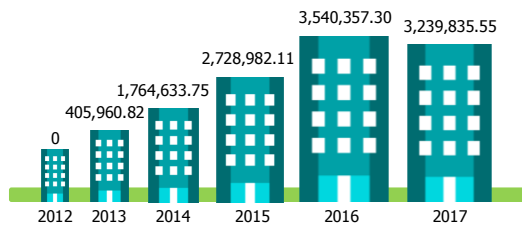
TOTAL ASET

dalam Jutaan Rupiah



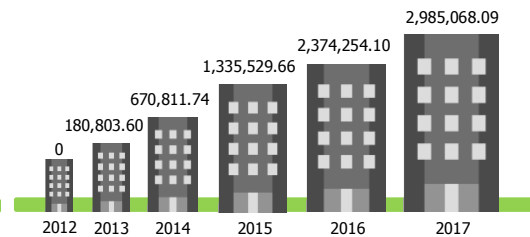
VOLUME KREDIT

dalam Jutaan Rupiah



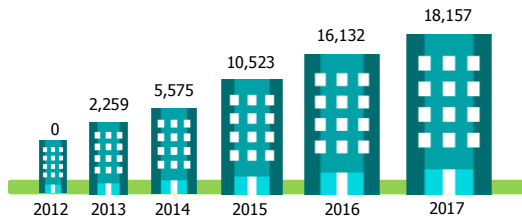
VOLUME PENJAMINAN

dalam Jutaan Rupiah



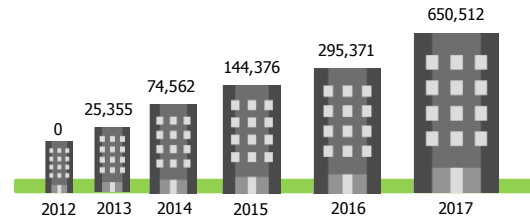
JUMLAH KUMKM

dalam satuan orang



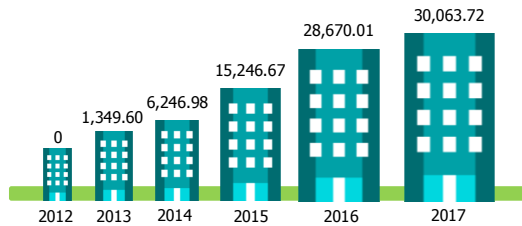
JUMLAH TENAGA KERJA

dalam satuan orang



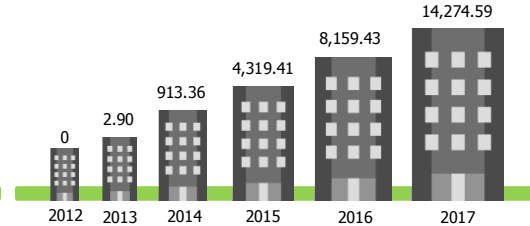
IMBAL JASA PENJAMINAN

dalam Jutaan Rupiah



PEMBAYARAN KLAIM

dalam Jutaan Rupiah



IKHTISAR KEUANGAN

PT JAMKRIDA JABAR LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2012 S/D 31 DESEMBER 2017 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah)						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ASET						
Kas dan Setara Kas	25,180.22	95,204.14	99,818.05	150,074.65	157,996.75	160,417.54
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	21.92	215.76	333.68	834.64	1,148.28	3,626.09
Beban Dibayar Dimuka	83.78	1,118.10	5,182.15	10,451.36	21,686.58	47,639.28
Aset Keuangan Hingga Jatuh Tempo	-	4,000.00	-	-	16,478.13	40,001.96
Aset Tetap	1,040.01	1,192.52	1,071.77	11,366.31	11,802.32	12,599.99
Aset Pajak Tangguhan	191.51	1,587.68	2,728.40	3,826.64	4,888.90	6,393.22
Aset Lain-Lain	-	338.75	7,437.83	243.68	790.20	500.85
JUMLAH ASET	26,517.44	103,656.95	116,571.88	176,797.28	214,791.16	271,178.94
LIABILITAS DAN EKUITAS						
LIABILITAS						
Utang Pajak	70.36	64.74	19.83	165.57	370.53	203.22
Utang Regaransi	-	110.66	233.58	520.84	1,697.52	850.24
Beban yang Masih Harus Dibayar	104.74	105.76	261.47	185.04	540.01	941.90
Penampungan Sementara	-	328.97	1,453.94	2,777.44	10,511.43	15,328.73
Utang Lancar Lainnya	1,233.19	248.55	246.44	11.36	252.33	275.27
Pendapatan Diterima Dimuka	-	2,739.36	10,764.12	21,595.09	43,118.24	89,433.03
Cadangan Klaim	-	223.71	901.40	2,631.98	4,872.26	3,457.81
Liabilitas Jangka Panjang	466.38	300.81	83.11	694.02	1,424.32	909.01
JUMLAH LIABILITAS	1,874.68	4,122.55	13,963.88	28,581.33	62,786.64	111,399.22
EKUITAS						
Modal	25,200.00	100,200.00	100,200.00	145,200.00	145,200.00	153,200.00
Cadangan Umum	-	-	-	846.26	1,379.63	2,734.82
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	-	-	21.38	36.20	4.15	(260.85)
Saldo Laba	(557.24)	(665.60)	2,386.62	2,133.49	5,420.74	4,105.75
JUMLAH EKUITAS	24,642.76	99,534.40	102,608.00	148,215.95	152,004.51	159,779.72
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	26,517.44	103,656.95	116,571.88	176,797.28	214,791.16	271,178.94

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012-2017
 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PENDAPATAN PENJAMINAN						
Imbal Jasa Penjaminan	-	1,349.60	6,300.16	15,570.60	29,562.01	30,928.17
Beban Fee Based Income Bank	-	(4.38)	(20.50)	(40.13)	(53.51)	(61.78)
Beban Komisi Agen	-	(106.81)	(732.51)	(2,016.81)	(3,668.60)	(3,732.52)
Restitusi Imbal Jasa Penjaminan	-	-	(53.18)	(323.93)	(892.00)	(864.44)
Manajemen Fee	-	24.65	191.64	422.57	857.05	1,400.00
JUMLAH PENDAPATAN PENJAMINAN	-	1,263.05	5,685.62	13,612.30	25,804.96	27,669.42
BEBAN KLAIM						
Beban Klaim	-	2.90	913.36	4,319.41	8,159.43	14,274.79
Beban Cadangan Klaim	-	223.71	677.70	1,730.58	2,240.28	(1,414.45)
Beban Regaransi	-	411.90	1,999.44	4,508.53	8,999.66	9,770.25
JUMLAH BEBAN KLAIM	-	638.50	3,590.50	10,558.52	19,399.37	22,630.59
PENDAPATAN USAHA - BERSIH	-	624.55	2,095.13	3,053.79	6,405.59	5,038.83
PENDAPATAN INVESTASI	27.00	5,108.32	9,788.73	9,530.95	12,383.23	13,625.45
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	0.97	37.33	67.59	255.27	1,146.62	978.52
BEBAN USAHA						
Beban Operasional	117.32	788.07	823.14	1,043.44	1,040.92	1,196.32
Beban Sumber Daya Manusia	582.31	4,426.05	5,843.12	7,019.83	9,491.20	9,738.94
Beban Administrasi dan Umum	72.00	1,031.48	1,414.67	1,832.07	2,537.94	3,359.78
JUMLAH BEBAN USAHA	771.64	6,245.60	8,080.94	9,895.34	13,070.06	14,295.03
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(743.67)	(475.40)	3,870.50	2,944.67	6,865.38	5,347.78
BEBAN PAJAK PENGHASILAN						
Beban Pajak Kini	(6.00)	(1,029.13)	(1,966.12)	(1,914.36)	(2,496.22)	(2,658.01)
Manfaat Pajak Tangguhan	191.51	1,396.17	1,147.84	1,103.18	1,051.58	1,415.99
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN	185.51	367.04	(818.28)	(811.18)	(1,444.64)	(1,242.03)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	(558.16)	(108.36)	3,052.22	2,133.49	5,420.74	4,105.75
Pendapatan Komprehensif Lainnya	-	-	21.38	14.83	(32.06)	(264.99)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	(558.16)	(108.36)	3,073.60	2,148.32	5,388.68	3,840.76

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

IKHTISAR OPERASIONAL

IKHTISAR KINERJA OPERASIONAL PT JAMKRIDA JABAR TAHUN 2017					
	RKAP 2017	REALISASI 2017	REALISASI 2016	CAPAIAN 2017	GROWTH 2016-2017
1. LABA (RUGI) (dalam Jutaan Rupiah)	2,524.23	4,105.75	5,420.74	162.65%	-24.26%
2. TOTAL ASET (dalam Jutaan Rupiah)	265,377.17	271,178.94	214,791.16	102.19%	26.25%
3. VOLUME KREDIT (dalam Jutaan Rupiah)	4,393,501.72	3,239,835.55	3,540,357.30	73.74%	-8.49%
4. VOLUME PENJAMINAN (dalam Jutaan Rupiah)	3,120,867.51	2,985,068.09	2,374,254.10	95.65%	25.73%
5. IMBAL JASA PENJAMINAN (dalam Jutaan Rupiah)	29,176.58	30,063.72	28,670.01	103.04%	4.86%
6. GEARING RATIO (dalam satuan kali)	18.47	12.82	12.82	69.41%	0.00%
7. KLAIM (dalam Jutaan Rupiah)	14,105.99	14,274.79	8,159.43	101.20%	74.95%
8. SUBROGASI (dalam Jutaan Rupiah)	702.70	831.83	990.04	118.38%	-15.98%
9. PENDAPATAN INVESTASI (dalam Jutaan Rupiah)	10,893.99	13,625.45	12,383.23	125.07%	10.03%
10. KUMKM TERJAMIN (dalam satuan orang)	14,896	18,157	16,132	121.89%	12.55%
11. TENAGA KERJA TERSERAP (dalam satuan orang)	231,796	650,512	295,371	280.64%	120.24%

PERISTIWA PENTING
PT JAMKRIDA JABAR

2017

10 Januari 2017



Kerjasama Penjaminan Kredit
Modal Usaha dan Pola Potong
Gaji dengan BPR Dipon Sejahtera

13-15 Januari 2017

Family Gathering PT Jamkrida Jabar



27 Februari 2017

Kerjasama Penjaminan Kredit
Pola Potong Gaji dan Kredit
Konstruksi dengan Bank Kesejahteraan Ekonomi



17 Februari 2017

Perpanjangan SP3 Induk Penjaminan
Pola Potong Gaji untuk Koperasi
Pensiunan Bank Jabar Banten



12 Maret 2017

Penandatanganan Mou dengan
Dinas KUK Provinsi Jawa Barat



13 Maret 2017

Kerjasama Penjaminan Kredit
Modal Kerja kepada KUMKM
dengan Bank Kesejahteraan
Ekonomi



30 Maret 2017

Kerjasama Kafalah Pembiayaan
Tunjangan Sertifikasi Guru
dengan BPRS Harta Insan Karimah
Tegal



20-21 April 2017

Pra RUPS Tahun 2017



7 April 2017

Penandatanganan MCU
dengan INKINDO Jawa Barat



3 April 2017

Penandatanganan Addendum
PKS dengan LPDB



28 April 2017

RUPS Tahun 2017



10 Mei 2017

Kerjasama Penjaminan Kredit
Pola Potong Gaji dan Kredit Modal
Usaha kepada KUMKM dengan
BPR Kota Bandung



10 Mei 2017

Lunch Meeting Mitra BPR dan
Penandatanganan MoU dengan
PT INKINDO terkait Penjaminan
Surety Bond



PERISTIWA PENTING
PT JAMKRIDA JABAR

2017

17 Mei 2017

Peresmian Masjid
Al Kautsar
PT Jamkrida Jabar



08 Juni 2017

Pengajian & Buka
Bersama Panti
Asuhan Himmatunayat



3 Oktober 2017

Perayaan Hari Ulang Tahun Ke-5
PT Jamkrida Jabar



22 Juni 2017

Perpanjangan Kerjasama Penjaminan
Bank Garansi dan Pengadaan Barang
/Jasa Konstruksi dengan Bank BJB



5 Oktober 2017

Penandatanganan MOU
dengan PT BPRS HIK &
PT BPRS Artha Madani



13 Oktober 2017

Kunjungan ke Jamkrida Jatim



27 Oktober 2017

Inklusi Keuangan untuk Semua



29 November 2017

RUPS LB Tahun 2017



23 November 2017

PRA RUPS LB Tahun 2017



31 Oktober 2017

Narasumber FGD Percepatan
Pendirian PPKD





PERSEROAN

SEKILAS PERSEROAN

PT Jamkrida Jabar merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat dengan tujuan melaksanakan dan menunjang kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dengan jalan melakukan kegiatan Penjaminan Kredit, serta bantuan Manajemen dan Konsultasi.



PT Jamkrida Jabar didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas No. 03 tanggal 3 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Yuliani Idawati, S.H., Sp.N., Notaris yang berkedudukan di Kota Bandung dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-56159.AH.01.01 tanggal 1 November 2012.

Dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Kredit di Daerah Jawa Barat, PT Jamkrida Jabar mendapatkan Izin Operasional Nomor KEP.05/D.05/2013 tanggal 30 Januari 2013 dari Otoritas Jasa Keuangan yang pada saat itu

baru beralih dari Bapepam LK. Perseroan juga telah mendapatkan pemeringkatan "idBBB-" dari lembaga pemeringkatan PT Pefindo sehingga dapat bekerja sama dengan pihak perbankan sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/6/DPNP tahun 2011 mengenai Aset Tertimbang Menurut Risiko.

FILOSOFI LOGO PERSEROAN

Logo Perusahaan menunjukkan identitas bisnis dari suatu Perusahaan. Selain itu, logo Perusahaan juga menunjukkan nilai yang dibawa oleh Perusahaan tersebut. Berikut ini filosofi logo PT Jamkrida Jabar:

Logomark



Langgam simbol *double* huruf simetri 'JJ', digambarkan bagaikan dua bilah kujang kembar dipersandingkan tersusun secara simetri dengan saling membelakangi. Sosok ini mengingatkan kepada siluet postur berdiri badan manusia. Langgam logo ini mengisyaratkan kemandirian. Bulatan rembulan di ujung garis simetri berlaku sebagai penerang purnama dan penyejuk semangat matahari kujang.

Ragam 'Kujang' berdiri merupakan simbol kamandungan tali ari-ari tempat janin bermuasal. Tertransformasikan menuju susunan huruf 'J'. Makna Kujang bersdiri dijadikan simbol keselarasan pandangan ajaran Sunda wiwitan penjaga keselarasan alam. Selain sebagai alat pertanian yakni

'ketam memanen padi' juga sebagai pusaka pamor simbol semangat pemersatu. Kujang merupakan simbol ketajaman bertuah pamor kepribadian *local wisdom* kekhasan keluhuran watak pedusunan Sunda yang masih dilestarikan. 'Silih Asih Silih Asah Silih Asuh Silih Wewangian Sak Uyunan Silih Simbutan', sebuah aspirasi sikap kesahajaan keluhuran budi bahasa masyarakat Sunda mencerminkan kekokohan terjalannya ikatan kekerabatan. Sebagai pedoman keselarasan kesahajaan saling berdampingan bersama sebagai bekal lumbung peningkatan kehidupan masa depan generasi selanjutnya.

Bingkai Kotak sebagai lingkup akhir susunan logo, mengisyaratkan makna sebuah keutuhan tetap dan baku, kuat tidak tergoyahkan dan stabil. Memberikan gambaran stabilitas tatanan ekonomi mengantarkan swadaya kemandirian penghidupan bermartabat masyarakat Jawa Barat. Geometri 'Kotak' merupakan perlambang pijakan punden berundak sebagai simbol kemanunggalan semesta. Kotak menggambarkan puncak kematangan kepribadian. Dan sebagai simbol Tridharma, 'Vasthu Purusha Mandala' jalan menuju keagungan sebagai simbol pusat meditasi menuju pematangan berkepribadian.

Warna Logo



Warna Biru



Warna Hijau

Warna standar Logo PT Jamkrida Jabar adalah warna biru dan hijau. Adapun makna dari warna-warna pada logo PT Jamkrida Jabar adalah sebagai berikut:

Hampanan pusara pasundan dikenal sebagai wilayah parahiyanan dengan keelokan rindangnya tanah subur diliput oleh deretan permai hawa

pegunungan yang subur gemah ripah. Warna pelingkup dua alam sebagai pijakan inspirasi dasar Logo utama dengan latar belakang layar parahu berwarna 'Hijau' dan 'Biru'. Terletak bersanding berdampingan sebagai penyeimbang simetri keselarasan alam terbentang. Keseimbangan antara kemauan dan kemampuan dalam mengolah terpeliharanya seluruh khasanah kekayaan alam sebagai sumber kehidupan bermartabat dimasa depan.

Makna warna 'Hijau' mengisyaratkan keteduhan hutan hijau menaungi kesuburan bentang permadani ladang dan kebun. Dan warna 'Biru' mensimbolkan makna keabadian sumber kehidupan mata air sebagai jembatan samudera (Cukang Sagara). Dua warna 'Hijau Biru' bertaut menyatukan sebagai penaung terjaganya kemajuan selaras penyeimbang ekologi alam daratan, pegunungan dan lautan sebagai pusara keselarasan. Kecerdasan astronomi dan ilmu kelautan, menunjang kearifan masyarakat pasundan melaksanakan kebijakan air samudera. Warna 'Hijau' (Hyang Jawa = Payung Teduh) melambangkan keteduhan jiwa dan pengayoman. Warna 'Biru' (Umbi Ruh = Ibu Ruh) melambangkan pusara ruh keluhuran, kecerdasan dan kebijaksanaan.

Dwi Warna 'Hijau Biru' memberikan pertautan makna Hiyang Jawa Umbi Ruh = Payung keteduhan naungan Ibu Ruh, transformasi pertautan membentuk keseimbangan baru yang saling menghidupkan. Ajaran Umbi (Dewi Pohachi), merupakan pokok ajaran keseimbangan tatar tua Pasundan Sumbhi Prabangkara sebagai pengayom menuju jalan keyakinan tempat bermuasal melalui tutur lisan (kidung) masyarakat adat. 'Gemah Ripah Loh Jinawi Tata Tentrem Kertaraharja'.

Arti makna Simbol Keseluruhan

Secara keseluruhan, logo PT Jamkrida Jabar memiliki makna yaitu Mengantarkan tubuh kehidupan mencapai kemandirian bermartabat untuk

menjaga keseimbangan keselarasan alam, tetap terjaga keutuhannya mewujudkan generasi masa depan gemilang berpedoman keseimbangan kebijakan alam.

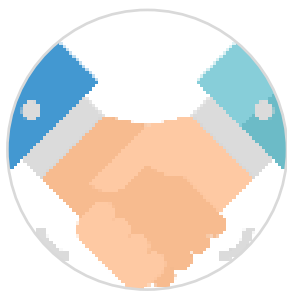
TONGGAK SEJARAH

2012 : PENDIRIAN PERSEROAN & INISIASI

- Perseroan didirikan atas dasar pemikiran Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa dalam rangka penguatan permodalan dan memperlancar kegiatan dunia usaha, khususnya KUMKM guna membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah usaha, serta membantu mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan, maka diperlukan peningkatan akses KUMKM pada sumber pembiayaan.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan KUMKM, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi dan mendorong pengembangan lembaga penjaminan kredit di daerah.
- PT Jamkrida Jabar sebagai BUMD yang bergerak di bidang penjaminan kredit dibentuk agar kegiatan usaha lembaga penjaminan kredit di daerah diselenggarakan secara efisien, berkesinambungan, serta bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah.



2013 : TAHAP KERJASAMA & REORGANISASI



Dalam rangka mempercepat proses implementasi kerjasama dengan berbagai lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya, PT Jamkrida Jabar melakukan kerjasama dengan mitra-mitra strategis untuk mengembangkan perekonomian Jawa Barat. Kegiatan usaha dan

operasional yang dilakukan antara lain:

- *Grand Opening* PT Jamkrida Jabar dan Diskusi Panel mengenai kegiatan penjaminan kredit yang dihadiri oleh mitra-mitra strategis;
- Kerjasama dengan Bank BJB untuk Penjaminan Kredit Cinta Rakyat (KCR) dan penerbitan Kontra Garansi Bank;
- Melakukan Penjaminan Kredit Multiguna Bank BJB yang bekerjasama dengan Konsorsium Broker Asuransi (PT Proteksi Antar Nusa, PT Insko Multi Pratama, PT Rama Mitra Jasa, dan PT Brocade);
- Kerjasama dengan Bank Artos untuk Penjaminan Kredit Pola Potong Gaji dan Kredit Konstruksi;
- Kerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia untuk Penjaminan Kredit kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- Kerjasama dengan Koperasi Sauyunan Jawa Barat untuk Penjaminan Kredit Modal Usaha;
- Kerjasama dengan Koperasi Pensiunan Bank BJB untuk Penjaminan Kredit Multiguna;
- Kerjasama dengan beberapa lembaga keuangan lainnya untuk Penjaminan Kredit dengan Pola Potong Gaji;

- Kerjasama dengan Lembaga Pemeringkat (PT Pefindo) dan PT Jamkrida Jabar telah memperoleh Peringkat "idBBB-".
- Pada tahap ini Perseroan melengkapi perangkat organisasi dengan memasukkan unsur *Good Corporate Governance* (GCG) dan Manajemen Risiko sehingga pelaksanaan penjaminan kredit diharapkan berjalan sesuai dengan Ketentuan Perseroan dan Regulasi dari Pemerintah (*compliance*).

2014: TAHUN PERTUMBUHAN

Setelah melalui tahun-tahun penuh tantangan dan Perseroan telah memiliki pondasi yang kuat, tahun 2014 merupakan tahun pengembangan dengan capaian laba 3,08 Miliar Rupiah, volume kredit sebesar 1,76 Triliun Rupiah, volume penjaminan sebesar 670,81 Juta rupiah dengan jumlah UMKM sebanyak 5.575 UMKM dan dapat menyerap 74.562 tenaga kerja dengan langkah kerja sebagai berikut:



- Memperluas produk penjaminan, seperti penjaminan kredit konstruksi, kredit umum, kredit mikro, dan kredit koppeg/kopkar.
- Perseroan merencanakan membuka Unit Usaha Syariah, hal ini dimungkinkan karena potensi pasar penjaminan syariah di wilayah Jawa Barat sangat besar. Selain itu banyak perbankan syariah atau lembaga keuangan non bank syariah yang meminta untuk bekerjasama dalam hal penjaminan (*kafalah*).
- Perseroan merencanakan pembelian gedung baru dikarenakan kondisi dan letak gedung yang digunakan saat ini dinilai kurang representatif dan berada di jalur yang rawan macet, serta telah habisnya masa pinjam pakai dari Bank BJB.

- Meningkatkan Tata Kelola Perseroan melalui kegiatan pelatihan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia serta penilaian kinerja berdasarkan analisa jabatan dan *Key Performance Indicator*.
- Mengurangi atau memperkecil beban risiko yang diterima oleh Perseroan dengan mengalihkan sebagian kepada pihak lain.
- Pembentukan Sistem Informasi Penjaminan Kredit (SISKA) sehingga diharapkan Perseroan dapat menampilkan data *outstanding* kredit secara *up to date* khususnya untuk perhitungan *gearing ratio*, mitigasi risiko, dan *business recovery program*.

2015: TAHAP EKSPANSI PERSEROAN I



Pada tahun 2015, Perseroan terus mengembangkan sayapnya dalam bisnis penjaminan kredit. Perseroan berkerjasama dengan beberapa mitra baru dan tetap mempererat hubungan bisnis dengan para mitra lama.

Secara umum kinerja Perseroan mengalami peningkatan, namun seiring dengan meningkatnya penjaminan kredit yang dilakukan Perseroan, maka nilai klaim pun semakin meningkat dari 931,35 Juta Rupiah pada tahun 2014 menjadi 4,31 Miliar pada tahun 2015, atau mengalami kenaikan sebesar 373%. Sehingga laba Perseroan mengalami penurunan dari 3,08 Miliar Rupiah pada tahun 2014 menjadi 2,13 Miliar Rupiah pada tahun 2015, atau mengalami penurunan sebesar 31%.

Tahun 2015 ini disebut juga sebagai Tahap Ekspansi Perseroan. Beberapa pelebaran usaha telah dilakukan Perseroan dalam mengembangkan bisnisnya, adapun bagian dari Tahap ekspansi Perseroan ini antara lain:

- Keluarnya Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar dari OJK No. KEP-4/NB.223/2015 tanggal 3 Februari 2015. Dengan keluarnya

izin dari OJK tersebut maka perseroan dapat memaksimalkan kinerjanya untuk melakukan pembiayaan kafalah dari Lembaga Keuangan Syariah atau Lembaga Non Keuangan Syariah yang potensinya cukup besar di Provinsi Jawa Barat. Adapun *Grand Launching* dari Unit Usaha syariah ini bersamaan dengan *Grand Opening* gedung baru PT Jamkrida Jabar.

- Bersamaan dengan kebutuhan operasional Perseroan yang semakin meningkat dan kebutuhan untuk meningkatkan *brand image* dari Perseroan, maka Perseroan memutuskan untuk membeli gedung baru. Adapun *Grand Opening* dari gedung baru PT Jamkrida Jabar ini adalah pada tanggal 10 September 2015, dan diresmikan langsung oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat.
- Perseroan memutuskan untuk mengembangkan sayapnya dengan melakukan penjaminan diluar wilayah Jawa Barat. Salah satunya adalah kerjasama *co-guarantee* dengan Jamkrida Banten dan broker *Safe Insurance Broker (SIB)*.

2016: TAHAP EKSPANSI PERSEROAN II

Secara umum, tahun 2016 merupakan tahun yang positif bagi Perseroan, dimana perseroan mendulang laba bersih yang cukup signifikan yaitu sebesar 5,42 Miliar Rupiah atau 213% bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2016 sebesar 2,54 Miliar Rupiah. Laba tahun 2016 ini mengalami kenaikan sebesar

154% dibandingkan dengan laba bersih pada tahun 2015 yaitu sebesar 2,13 Miliar Rupiah. Kenaikan Laba pada tahun 2016 ini disebabkan karena adanya peningkatan nilai imbal jasa penjaminan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun 2016 merupakan tahun dimana Perseroan melakukan ekspansi bisnis yang cukup lebar, khususnya untuk merambah bisnis penjaminan kredit



dengan BPR-BPR. Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa penandatanganan PKS dengan beberapa mitra baru, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penandatanganan Akad Kerja Sama *Kafalah* Pembiayaan dengan PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan pada tanggal 18 Januari 2016.
2. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penjaminan Kredit dengan PT BPR Kerta Raharja pada tanggal 01 Februari 2016.
3. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penjaminan Kredit dengan PD BPR Kapetakan dan PD BPR Cirebon Selatan pada tanggal 19 Juli 2016.
4. Penandatanganan Akad Kerja Sama *Kafalah* Pembiayaan dengan PT BPRS Al Ma'soem pada tanggal 21 Juli 2016.
5. Penandatanganan Akad Kerja Sama *Kafalah* Pembiayaan dengan PT BPRS Patriot Kota Bekasi pada tanggal 08 September 2016.
6. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penjaminan Kredit dengan PT BPR Bahtera Masyarakat Jawa Barat pada tanggal 03 November 2016.
7. Penandatanganan Akad Kerja Sama *Kafalah* Pembiayaan dengan PT BPRS Harta Insan Karimah Cibitung pada tanggal 11 November 2016.
8. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penjaminan Kredit dengan beberapa Koperasi Pegawai/Koperasi Karyawan (Koppeg/Kopkar) yang mendapat pembiayaan dari Bank Kesejahteraan Ekonomi.

Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar membuka 4 (empat) kerjasama *kafalah* pembiayaan baru pada tahun 2016, serta membukukan volume *kafalah* pembiayaan Unit Usaha Syariah sebesar 314,02 Miliar Rupiah atau

sebesar 717% dari anggaran tahun 2016 sebesar 43,76 Miliar Rupiah. Serta pencapaian volume IJK sebesar 1,42 Miliar Rupiah atau sebesar 414% dari anggaran tahun 2016 sebesar 343,88 Juta Rupiah. Unit Usaha Syariah juga membukukan laba yang Unit Usaha Syariah telah membukukan laba sebesar 369,14 Juta Rupiah. Hal ini merupakan sebuah pencapaian yang positif bagi sebuah unit usaha yang baru beroperasi dua tahun. Dengan modal awal pendirian sebesar 15 Miliar Rupiah, total aset yang dimiliki oleh Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar 19,25 Miliar Rupiah. Maka dalam kurun dua tahun beroperasi, aset Unit Usaha Syariah telah bertumbuh 4,25 Miliar Rupiah. Hal tersebut merupakan bukti keseriusan Perseroan untuk menggarap pasar penjaminan syariah di Jawa Barat.

Pada semester kedua tahun 2016 juga, Perseroan mencoba untuk melakukan ekspansi bisnis penjaminan kredit konsumtif menuju ruang lingkup nasional, dimana Perseroan telah melakukan inisiasi kerjasama dengan beberapa Bank Umum Nasional dan Perusahaan Asuransi yang memiliki ruang lingkup bisnis secara nasional. Hasil dari inisiasi tersebut akan bisa dirasakan pada tahun 2017, dan Perseroan optimis bahwa proses inisiasi tersebut akan menuai hasil yang positif pada tahun 2017.

2017: TAHAP PENGEMBANGAN



Tahun 2017 merupakan tahun dimana Perseroan mengalami penurunan perolehan laba bersih senilai 1,31 Miliar Rupiah atau 24,26% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016. Meskipun secara garis besar kinerja penjaminan tumbuh 25,73% dan pendapatan *cash basis* mengalami peningkatan dari 51,09 Miliar Rupiah menjadi 77,25 Miliar Rupiah. Pendapatan usaha dari investasi pun mengalami peningkatan sebesar 10,03% dibandingkan tahun

sebelumnya. Di samping itu, beban klaim mengalami peningkatan sebesar 74,95% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selain itu, penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin Pasal 62 ayat (1), yang merupakan penegasan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-16/D.05/2017 Tentang Pencatatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) mengakibatkan proyeksi pendapatan Imbal Jasa Penjaminan secara *accrual basis* mengalami penurunan jika dibandingkan dengan RKAP yaitu senilai 506,57 Juta Rupiah.

Secara umum, perkembangan Perseroan tahun 2017 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ditandatanganinya beberapa kerjasama, diantaranya:
 - a. Kerjasama penjaminan kredit modal usaha dan pola potong gaji dengan BPR Dipon Sejahtera.
 - b. Perpanjangan kerjasama SP3 induk penjaminan pola potong gaji untuk Koperasi Pensiunan serta kerjasama penjaminan bank garansi dan pengadaan barang/jasa konstruksi dengan Bank BJB.
 - c. Kerjasama penjaminan kredit pola potong gaji, kredit konstruksi, dan kredit modal kerja dengan Bank Kesejahteraan Ekonomi.
 - d. Kerjasama dengan Dinas KUK Provinsi Jawa Barat, INKINDO Jawa Barat, BPRS HIK Cibitung, BPRS Artha Madani.
 - e. Kerjasama kafalah pembiayaan tunjangan sertifikasi guru dengan BPRS Harta Insan Karimah Tegal.
 - f. Addendum kerjasama dengan LPDB.
 - g. Kerjasama penjaminan kredit pola potong gaji dan kredit modal usaha kepada KUMKM dengan BPR Kota Bandung.

2. Perubahan rencana kerja dan anggaran Perusahaan yang sebelumnya menggunakan asumsi semi *accrual* menjadi *accrual* murni dan pada tanggal 24 November 2017 para Pemegang Saham menyetujui Perubahan RKAP menjadi RKAP Perubahan dengan dilaksanakan RUPS Sirkuler.

VISI MISI PERSEROAN



VISI

Menjadi Perusahaan Penjamin Kredit
Terpercaya yang Berkontribusi pada
Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

MISI

Meningkatkan Kegiatan ekonomi KUMKM dan
Memberikan Manfaat bagi Pemangku
Kepentingan melalui Penjaminan Kredit yang
Efisien, Profesional dan Berintegritas.



NILAI-NILAI PERSEROAN



JAMKRIDA JABAR **BISA!**

KEGIATAN USAHA



KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat Bab V Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "Modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp 300.000.000.000,- (Tiga Ratus Miliar Rupiah)".

Adapun modal yang telah disetor kepada PT Jamkrida Jabar sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:



**Yayasan Kesejahteraan Pegawai bank bjb
200 Juta Rupiah (0,14%)**



Sehingga terhitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2017, modal yang telah disetor adalah sebesar 153,2 Miliar Rupiah.

PROFIL DEWAN KOMISARIS



RODHIALLAH

Komisaris Utama

Diangkat sebagai Komisaris Utama PT Jamkrida Jabar pada tanggal 23 November 2012. Lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1987. Memiliki pengalaman kerja selama lebih dari 20 tahun sebagai auditor internal pemerintah (Perwakilan BPKP) termasuk Inspektorat Kementerian BUMN sampai dengan tahun 2011 sebelum beralih masuk ke jajaran manajemen di sektor swasta.

SYAFRIAL FIRDAUS

Komisaris

Diangkat sebagai Komisaris PT Jamkrida Jabar pada tanggal 30 April 2015. Menyelesaikan studi di STAN pada tahun 1987, kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya di STIE-IPWI dan STIE-YAI. Sebelum menjabat sebagai Komisaris PT Jamkrida Jabar, beliau menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko, membangun dan memantau Manajemen Risiko pada PT Asuransi Takaful Umum.

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH

ZAINI ABDUL MALIK

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada bulan April 2015. Lulus dari IAIN SGD Bandung tahun 1999, kemudian beliau meneruskan pendidikannya di Sekolah Pascasarjana UIN Syahid Jakarta tahun 2008. Beliau merupakan Dosen Fakultas Syari'ah di UNISBA. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Forum Ekonomi Syari'ah Jakarta (Fajar Esha) pada tahun 2002-2003, dan beliau terdaftar sebagai Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) PW. Muhammadiyah Jawa Barat Periode 2010-2015. Beliau juga menyusun karya-karya ilmiah Ekonomi Islam/Ekonomi Syari'ah.

KHOZIN ABU FAQIH

Dewan Pengawas Syariah

Diangkat sebagai Dewan Pengawas Syariah di PT Jamkrida Jabar pada bulan April 2015. Lulus dari LIPIA (Univ. Imam Ibnu Saud, Riyadh) cabang Jakarta, pada tahun 1996. Adapun riwayat karir profesionalnya adalah sebagai Dosen Ma'had Shalahuddin Bogor (1994-1996), Dosen Ma'had Al-Imarat Bandung (2000-2009), Pengisi Kajian Wawasan Islam MQFM (2010-2012), Pengasuh Pesantren Inovatif Al-Ibda' dan pesantren Al-Ilham (SMK Perbankan Syariah) (2013-sekarang). Beliau juga dikenal sebagai penulis dan penerjemah buku-buku Islam.



PROFIL DIREKSI



TRI BUDHI MULJAWAN

Direktur Utama

Diangkat sebagai Direktur Utama PT Jamkrida Jabar pada bulan Mei 2014. Beliau menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi negara (STAN) pada tahun 1999. Memulai pekerjaan profesionalnya sebagai Auditor Pajak di Direktorat Jenderal Pajak dari mulai tahun 1991 sampai dengan tahun 2000. Melanjutkan karirnya sebagai Spv. *Tax & Treasury* di PT Patra Nusa Data (2000-2002), Tim Inti Implementasi SAP di PT Elnusa. Kemudian beliau melanjutkan karirnya di *Bosowa Group* dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014. Jabatan terakhir yang diembannya adalah sebagai CFO & kadiv *Strategic Planning* dan Direktur Keuangan di PT Bosowa Sekuritas.



BUDI SETYONO

Direktur Keuangan

Diangkat sebagai Direktur Keuangan PT Jamkrida Jabar pada tahun 2014. Beliau menyelesaikan Pendidikan Magister di Universitas Pasundan pada tahun 2016, setelah sebelumnya meraih gelar Akuntan di STAN tahun 1997. Beliau pernah menjadi Direktur Keuangan dan Umum PT Agronesia (2012-2014), CFO *Transportation Group* di *Bosowa Corporation* (2011-2012), GM *Finance & Accounting* di *Group Automotives Bosowa Corporation* (2009-2011), *Budget Controller* di PT Jawamanis di PDAM Pati-Jawa Tengah (2007), Manager keuangan & Administrasi di Badan Penyehatan Perbankan Indonesia (2004), *Team Leader* (auditor) di BPKP (1999).

ASEP GUNAWAN SIRAD

Direktur Operasional

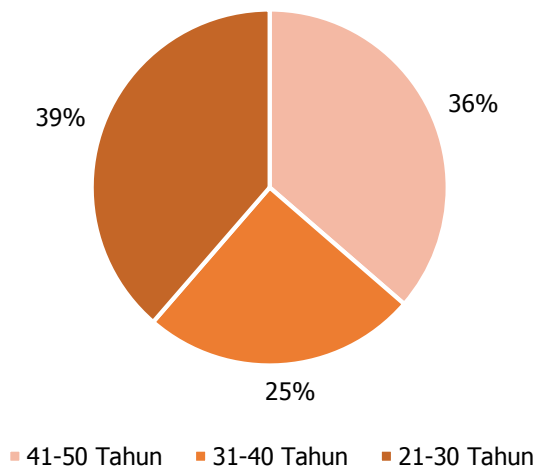
Diangkat sebagai Direktur Operasional PT Jamkrida Jabar pada tanggal 23 November 2012. Lulus dari Universitas Langlangbuana Bandung. Memulai karirnya pada tahun 1996 di PT Sarana Lindung Upaya sebagai Staf Pemasaran. Pada tahun 2006, diangkat menjadi Kepala Seksi Pemasaran di



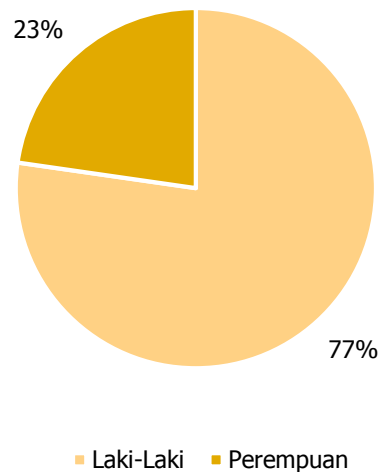
perusahaan yang sama. Karirnya terus meningkat di PT Sarana Lindung Upaya sampai akhirnya menjabat Kepala Kantor Wilayah Barat merangkap sebagai Kepala Cabang Bandung di tahun 2011. Pada tahun 2012, sempat menjabat sebagai Koordinator Satuan Tugas Khusus Pemasaran Langsung *Non Captive* Wilayah Jawa Barat, Renbang (Pj. Kepala Divisi IT Kantor Pusat), Pj. Kepala Divisi SPI Kantor Pusat dan kepala cabang Jakarta Penugasan Khusus

KOMPOSISI KARYAWAN

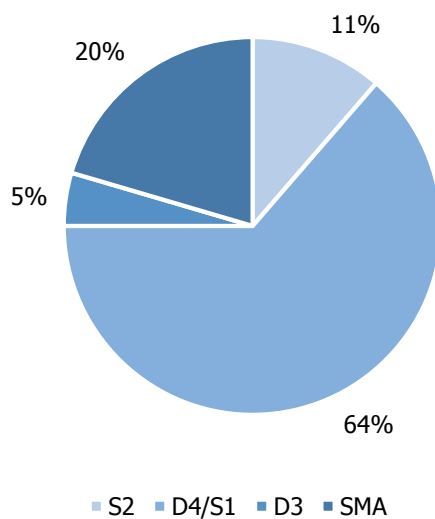
Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Usia



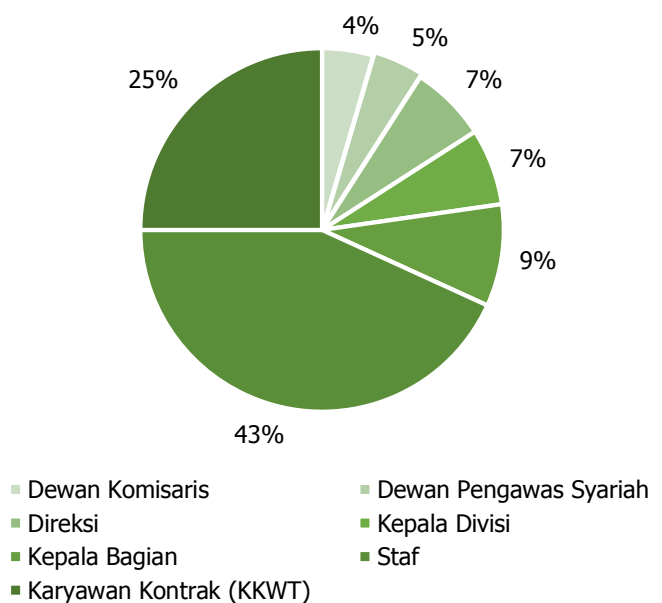
Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Gender



Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

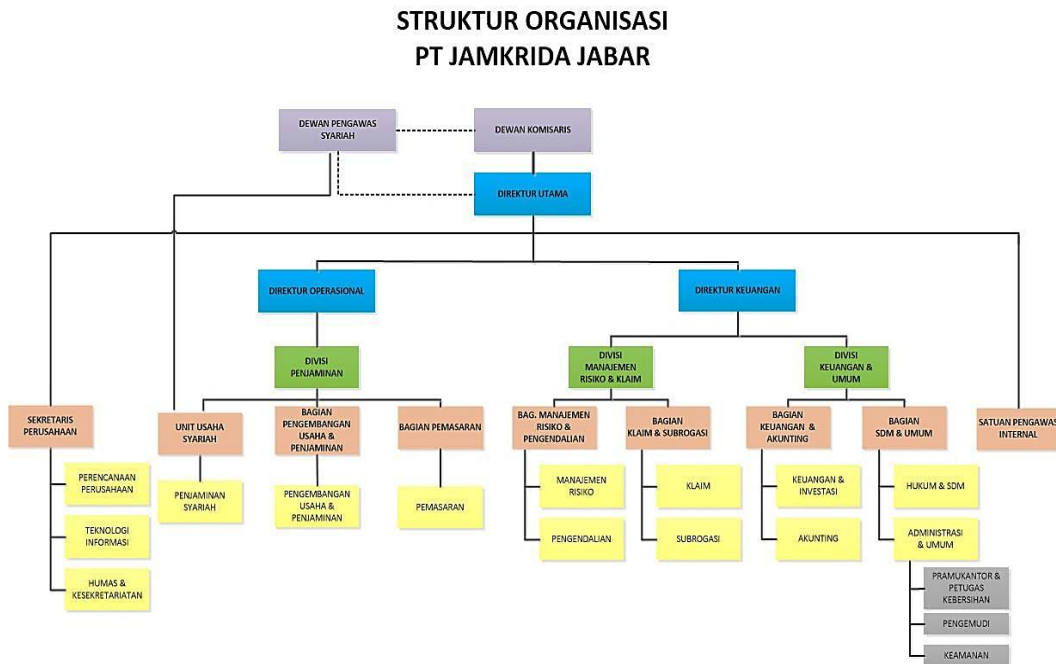


Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Posisi Manajemen



Komposisi karyawan PT Jamkrida Jabar tahun 2017 adalah 44 karyawan. Bertambah 4 karyawan jika dibandingkan dengan tahun 2016.

STRUKTUR ORGANISASI



Setiap unit kerja di dalam struktur organisasi PT Jamkrida Jabar harus mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan konsisten dan stabil. Etos kerja yang diperkuat transparansi dan akuntabilitas haruslah mencair dan mengalir di dalam struktur organisasi. Kemampuan setiap fungsi dan peran untuk berkoordinasi, berkontribusi, dan bekerjasama dalam tim kerja yang dinamis akan menjadikan struktur organisasi bergerak dengan efektif.

Setiap unit kerja harus fokus pada proses interpersonal dan dinamika kolaborasi. Kesadaran dan kemampuan untuk bekerja sama agar pekerjaan tidak tertunda dan bisa lebih produktif, akan menjadikan organisasi semakin unggul.

Setiap individu haruslah menjadi bagian dari strategi dan solusi organisasi, termasuk menjadi energi untuk menciptakan struktur organisasi yang bekerja efektif dan produktif. Jadi, setiap individu harus memiliki etos kerja yang mengerti visi besar organisasi, serta memahami aturan main untuk memecahkan setiap permasalahan besar di dalam organisasi agar dapat melayani struktur organisasi dengan efektif.

KINERJA PERSEROAN



ASPEK OPERASIONAL

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi termaju di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan perekonomian yang tinggi serta dengan tingkat stabilitas makro ekonomi yang tetap terjaga, akan mendorong pertumbuhan jumlah Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Salah satu karakteristik yang melekat pada sebagian besar KUMKM dan sekaligus menjadi sumber permasalahannya adalah lemahnya struktur permodalan dan kurangnya akses kepada sumber pembiayaan (lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan) yang disebabkan oleh adanya keterbatasan agunan.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah KUMKM di Jawa Barat, serta ketersediaan fasilitas penjaminan kredit, akan berdampak pada meningkatnya permintaan kredit, dan akan memberikan peluang bagi industri penjaminan kredit khususnya di Jawa Barat untuk tumbuh secara berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Dengan menjalankan "*vision & mission statement*" sesuai dengan niat awal pembentukan Perseroan sebagai Lembaga Penjaminan Kredit Daerah, dalam jangka panjang Perseroan akan menjadi "Perusahaan Penjaminan Kredit Pilihan Masyarakat Jawa Barat" tentunya, secara tidak langsung akan memberikan kontribusi pada perekonomian Jawa Barat. Maka Produk Penjaminan Kredit dan jasa konsultasi pengembangan UMKM dalam mengakses perbankan menjadi jasa utama perusahaan.

ASPEK PENJAMINAN

PENJAMINAN KREDIT UMUM

Realisasi Penjaminan Kredit Umum tahun 2017 Perseroan adalah senilai 64,62 Miliar Rupiah. Jika dibandingkan dengan target dalam RKAP Tahun 2017 senilai 59,19 Miliar Rupiah, realisasi tahun 2017 menunjukkan capaian sebesar 109,18% atau senilai 5,43 Miliar Rupiah di atas target dalam RKAP 2017. Kinerja Penjaminan Kredit Umum dapat melampaui target dikarenakan adanya kontribusi Skim Kredit kepada BPR dari Bank BJB.

PENJAMINAN KREDIT MIKRO

Realisasi Penjaminan Kredit Mikro tahun 2017 Perseroan adalah senilai 51,7 Miliar Rupiah. Jika dibandingkan dengan target dalam RKAP Tahun 2017 senilai 36,36 Miliar Rupiah, realisasi tahun 2017 menunjukkan capaian sebesar 142,22% atau senilai 15,35 Miliar Rupiah di atas target dalam RKAP 2017. Kinerja Penjaminan Kredit Mikro tahun 2017 dapat melampaui target dikarenakan adanya kontribusi Skim Kredit Mikro dari beberapa mitra BPR.

PENJAMINAN KREDIT MULTIGUNA

Realisasi Penjaminan Kredit Multiguna non SIB tahun 2017 adalah sebesar 64,38% dari target dalam RKAP 2017. Rendahnya capaian Penjaminan Kredit Multiguna non SIB ini tertutup dengan capaian Penjaminan Kredit Multiguna SIB sebesar 124,38% atau senilai 1,26 Triliun Rupiah. Namun, capaian realisasi Penjaminan Kredit Multiguna tahun 2017 adalah senilai 2 Triliun Rupiah atau sebesar 92,21% dari target dalam RKAP 2017.

PENJAMINAN KREDIT KONSTRUKSI

Realisasi Penjaminan Kredit Konstruksi tahun 2017 Perseroan adalah senilai 473,33 Miliar Rupiah. Jika dibandingkan dengan target dalam RKAP Tahun 2017 senilai 465,28 Miliar Rupiah, realisasi tahun 2017 menunjukkan capaian sebesar 101,73% atau senilai 8,05 Miliar Rupiah di atas target dalam RKAP 2017. Kinerja Penjaminan Kredit Konstruksi tahun 2017 dapat melampaui target dikarenakan adanya kontribusi dari Skim Kredit Konstruksi Bank BJB.

PENJAMINAN BANK GARANSI

Realisasi Penjaminan Bank Garansi tahun 2017 Perseroan adalah senilai 313,57 Miliar Rupiah. Jika dibandingkan dengan target dalam RKAP Tahun 2017 yang diproyeksikan senilai 236,53 Miliar Rupiah, realisasi tahun 2017 menunjukkan capaian sebesar 132,57% atau senilai 77,04 Miliar Rupiah di atas target dalam RKAP 2017. Kinerja Penjaminan Bank Garansi tahun 2017 dapat melampaui target dikarenakan adanya kontribusi dari Skim Bank Garansi Bank BJB.

SURETY BOND

Realisasi *Surety Bond* tahun 2017 Perseroan adalah senilai 319,67 Juta Rupiah. Jika dibandingkan dengan target dalam RKAP Tahun 2017 senilai 2,07 Miliar Rupiah, realisasi tahun 2017 menunjukkan capaian sebesar 15,41% atau senilai 1,75 Miliar Rupiah di bawah target dalam RKAP 2017. Kinerja *Surety Bond* tahun 2017 tidak dapat mencapai target dikarenakan produk penjaminan ini *head to head* dengan Penjaminan Bank Garansi (Kontra BG) dan relatif masih banyak *bouwheer* (pemilik proyek) khususnya untuk proyek-proyek yang bersumber dari APBN/APBD yang dilaksanakan di wilayah Jawa Barat masih mensyaratkan jaminan proyek dalam bentuk Bank Garansi.

PENJAMINAN KREDIT CINTA RAKYAT

Realisasi Penjaminan Kredit Cinta Rakyat tahun 2017 Perseroan adalah senilai 24,6 Miliar Rupiah. Jika dibandingkan dengan target dalam RKAP Tahun 2017 senilai 25,05 Miliar Rupiah, realisasi tahun 2017 menunjukkan capaian sebesar 98,22% atau senilai 446,6 Miliar Rupiah di bawah target dalam RKAP 2017. Kinerja Penjaminan Kredit Cinta Rakyat tidak dapat melampaui target dikarenakan terjadinya penurunan penyaluran di Bank BJB atas kredit tersebut.

PENJAMINAN KREDIT MIKRO UTAMA

Realisasi Penjaminan Kredit Mikro Utama tahun 2017 Perseroan adalah senilai 48,04 Miliar Rupiah. Jika dibandingkan dengan target dalam RKAP Tahun 2017 senilai 117,84 Miliar Rupiah, realisasi tahun 2017 menunjukkan capaian sebesar 40,77% atau senilai 69,8 Miliar Rupiah di bawah target dalam RKAP 2017. Kinerja Penjaminan Kredit Mikro Utama tahun 2017 tidak dapat mencapai target dikarenakan SP3 Induk untuk Penjaminan Kredit Mikro Utama yang disalurkan oleh Bank BJB telah berakhir sejak Desember 2016 dan belum diperpanjang. Penjaminan Kredit Mikro Utama sepanjang tahun 2017 merupakan penjaminan atas realisasi kredit sampai akhir Desember 2016.

ASPEK KEUANGAN

Berdasarkan Laporan Keuangan (Audited) PT Jamkrida Jabar per 31 Desember 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. TOTAL ASET

Total Aset Perseroan per 31 Desember 2017 adalah sebesar 271,18 Miliar Rupiah, meningkat sebesar 26,25% jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang senilai 214,79 Miliar Rupiah. Kenaikan ini disebabkan oleh pertumbuhan bisnis PT Jamkrida Jabar di tahun 2017.

A. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas adalah termasuk giro, tabungan dan deposito Perusahan yang hampir seluruhnya adalah deposito berjangka pendek atau kurang dari 6 (enam) bulan. Posisi Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,53% atau senilai 2,42 Miliar Rupiah dari 31 Desember 2016 menjadi 160,42 Miliar Rupiah pada 31 Desember 2017. Kenaikan Kas dan Setara Kas ini disebabkan oleh tumbuhnya penerimaan IJP yang diterima pada tahun 2017.

B. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan pendapatan bunga deposito, pendapatan kupon obligasi atas investasi, komisi atas regaransi dan piutang regaransi atas klaim dan restitusi. Pendapatan yang Masih Harus Diterima mengalami kenaikan sebesar 215,79% atau senilai 2,48 Miliar Rupiah dari 31 Desember 2016 menjadi 3,63 Miliar Rupiah pada 31 Desember 2017. Kenaikan yang signifikan dari

Pendapatan yang Masih Harus Diterima ini dikarenakan Piutang Regaransi atas klaim dan restitusi kepada Perusahaan reasuransi yaitu PT Nasional Reasuransi Indonesia yang belum dibayarkan pada akhir tahun.

C. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka merupakan biaya komisi agen dan *fee based income* yang pembebanannya diakui secara *accrual*. Beban Dibayar Dimuka mengalami kenaikan sebesar 119,67% atau senilai 25,95 Miliar Rupiah dari 31 Desember 2016 menjadi 47,64 Miliar Rupiah pada 31 Desember 2017. Kenaikan yang signifikan dari Beban Dibayar Dimuka dikarenakan adanya kenaikan penerimaan IJP pada tahun 2017 yang menyebabkan beban dari IJP Regaransi dan Komisi Agen/Broker meningkat.

D. Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo merupakan Surat Berharga Negara (SBN) dalam bentuk obligasi yang dimiliki oleh Perseroan senilai 40 Miliar Rupiah atau meningkat sebesar 142,76% dari nilai Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo pada 31 Desember 2016. Pembelian Obligasi merupakan ketentuan yang harus Perseroan penuhi sesuai dengan POJK Nomor 1/POJK.05/2016.

E. Aset Tetap

Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar 6,76% atau senilai 836,35 Juta Rupiah dari 31 Desember 2016 menjadi 12,6 Miliar Rupiah pada 31 Desember 2017. Kenaikan nilai Aset Tetap ini dikarenakan adanya pembelian belanja modal untuk sarana dan prasarana penunjang operasional.

F. Aset Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan Perseroan mengalami kenaikan sebesar 30,77% atau senilai 1,51 Miliar Rupiah dari 31 Desember 2016 menjadi 6,39 Miliar Rupiah pada 31 Desember 2017. Aset Pajak Tangguhan mengalami kenaikan pada tahun 2017 disebabkan oleh adanya kerugian fiskal yang dapat dikompensasi pada tahun-tahun mendatang.

G. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan aset yang masih dalam proses penyelesaian, seperti Gedung kantor baru dan sarana prasarana kantor baru. Nilai Aset Lain-Lain pada 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 36,6% atau senilai 289,35 Juta Rupiah. Penurunan ini disebabkan oleh telah selesainya Gedung Kantor Baru yang sebelumnya dicatat sebagai Gedung dalam Proses menjadi Gedung Kantor.

2. LIABILITAS

Total Liabilitas per 31 Desember 2017 adalah senilai 111,4 Miliar Rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 77,43% dari 31 Desember 2016. Kenaikan ini secara signifikan disebabkan oleh naiknya rekening penampungan sementara dan pendapatan diterima dimuka yakni IJP yang akan diakui di masa mendatang.

A. Cadangan Klaim

Pembentukan Cadangan Klaim yang mungkin akan terjadi pada tahun-tahun mendatang atas pendapatan imbal jasa penjaminan yang telah diterima Perusahaan dan kontrak penjaminannya masih berlaku. Untuk tahun 2017, Cadangan Klaim Perseroan adalah senilai 3,46 Miliar Rupiah atau 1,14 Miliar Rupiah lebih rendah dari tahun 2016 yang senilai 4,87 Miliar Rupiah. Penurunan nilai Cadangan Klaim ini

disebabkan oleh penerapan POJK No. 2/POJK.05/2017, dimana perhitungan Cadangan Klaim menjadi rata-rata klaim dalam 3 (tiga) bulan terakhir ditambah klaim dalam proses, yang sebelumnya menggunakan 0,25% dari *Outstanding* Penjaminan.

B. Utang Regaransi

Utang Regaransi ini dibentuk karena Perseroan melakukan *sharing* penjaminan dengan pihak penjaminan ulang/regaransi. Per 31 Desember 2017, nilai Utang Regaransi Perseroan adalah senilai 850,24 Juta Rupiah atau mengalami penurunan sebesar 49,91% atau senilai 847,28 Juta Rupiah dari 31 Desember 2016 yang senilai 1,7 Miliar Rupiah. Penurunan nilai Utang Regaransi ini disebabkan oleh berkurangnya nilai penjaminan yang diregaransikan oleh Perseroan kepada regarantor pada akhir tahun.

C. Utang Pajak

Utang Pajak terdiri dari PPh pasal 4 (2) atas pendapatan bunga deposito yang akan jatuh tempo dan dibayarkan per Januari 2017, PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan dan PPh pasal 23 yang telah dipotong oleh Perseroan. Utang Pajak Perseroan per 31 Desember 2017 adalah senilai 203,22 Juta Rupiah atau sebesar 45,15% lebih rendah dibandingkan Utang Pajak per 31 Desember 2016.

D. Beban Yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2017 senilai 941,9 Juta Rupiah, merupakan kewajiban Perseroan yang masih harus dibayar kepada vendor atas kerjasama yang dilakukannya dengan Perseroan, biaya keamanan, dan uang makan, transportasi, uang lembur karyawan, dan biaya komisi agen. Nilai Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar

74,42% atau senilai 401,89 Juta Rupiah dari 31 Desember 2016 yang senilai 540,01 Juta Rupiah.

E. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka Perseroan per 31 Desember 2017 adalah senilai 89,43 Miliar Rupiah. Pendapatan Diterima Dimuka Perseroan mengalami peningkatan sebesar 107,41% atau senilai 46,31 Miliar Rupiah dari nilai 43,12 Miliar Rupiah pada 31 Desember 2016. Pendapatan Diterima Dimuka ini merupakan IJP yang telah diterima dan akan diakui sebagai pendapatan pada tahun-tahun yang akan datang. Peningkatan ini dikarenakan adanya peningkatan volume penjaminan kredit.

F. Penampungan Sementara IJP

Penampungan Sementara IJP per 31 Desember 2017 adalah senilai 15,33 Miliar Rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 45,83% atau senilai 4,82 Miliar Rupiah dari nilai Penampungan Sementara IJP per 31 Desember 2016 senilai 10,51 Miliar Rupiah. Penampungan Sementara IJP berasal dari penerimaan imbal jasa penjaminan dari pihak perbankan yang belum terbit Sertifikat Penjaminannya.

G. Utang Lancar Lainnya

Utang Lancar Lainnya per 31 Desember 2017 adalah senilai 275,27 Juta Rupiah. Nilai Utang Lancar Lainnya mengalami peningkatan sebesar 9,09% atau senilai 22,94 Juta Rupiah dari nilai Utang Lancar Lainnya per 31 Desember 2016 senilai 252,33 Juta Rupiah. Utang Lancar lainnya ini merupakan kewajiban Perseroan yang penyelesaiannya kurang dari satu tahun.

H. Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Jangka Panjang per 31 Desember 2017 adalah senilai 909,01 Juta Rupiah, atau mengalami penurunan sebesar 36,18% atau senilai 515,31 Juta Rupiah dari 1,42 Miliar Rupiah pada 31 Desember 2016. Liabilitas Jangka Panjang ini merupakan utang yang umurnya lebih dari satu tahun. Adapun Liabilitas Jangka Panjang pada tahun 2017 meliputi utang kendaraan yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan kewajiban imbalan paska kerja.

3. EKUITAS

Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2017 adalah senilai 159,78 Miliar Rupiah. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,12% atau senilai 7,78 Miliar Rupiah dari Ekuitas per 31 Desember 2016 senilai 152 Miliar Rupiah. Peningkatan Ekuitas ini disebabkan oleh adanya penambahan modal disetor senilai 8 Miliar Rupiah dan peningkatan nilai cadangan umum senilai 1,36 Miliar Rupiah.

4. LABA (RUGI) PERSEROAN

Pada tahun 2017, Perseroan membukukan laba bersih senilai 4,11 Miliar Rupiah atau sebesar 24,26% lebih rendah dibandingkan dengan laba bersih yang dibukukan pada tahun 2016. Dengan kata lain, laba bersih Perseroan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1,31 Miliar Rupiah. Penurunan nilai laba bersih ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan beban klaim senilai 6,12 Miliar Rupiah.

A. Imbal Jasa Penjaminan (IJP)

Imbal Jasa Penjaminan (IJP) tahun 2017 adalah senilai 30,06 Miliar Rupiah (setelah dikurangi Restitusi senilai 864,44 Juta Rupiah). Jika

dibandingkan dengan tahun 2016, IJP tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 4,86% atau senilai 1,39 Miliar Rupiah.

B. Pendapatan Investasi

Pendapatan Investasi Perseroan tahun 2017 adalah senilai 13,63 Miliar Rupiah, meningkat sebesar 10,03% atau senilai 1,24 Miliar Rupiah dari tahun 2016 yang senilai 12,38 Miliar Rupiah. Hal ini disebabkan oleh adanya hasil investasi dari tambahan modal senilai 8 Miliar Rupiah.

C. Beban Klaim

Realisasi Beban Klaim tahun 2017 adalah senilai 22,63 Miliar Rupiah, mengalami peningkatan sebesar 16,66% atau senilai 3,23 Miliar Rupiah dari tahun 2016 yang senilai 19,4 Miliar Rupiah. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan klaim kredit mikro dan kredit multiguna. Adapun Jumlah Beban Klaim tersebut terdiri atas beban klaim, beban cadangan klaim dan beban regaransi. Untuk akun beban klaim sendiri naik dari 8,16 Miliar Rupiah di tahun 2016 menjadi 14,27 Miliar Rupiah di tahun 2017 atau meningkat sebesar 74,95%.

D. Beban Usaha

Beban Usaha Perseroan terdiri dari beban operasional, beban sumber daya manusia dan beban administrasi dan umum. Terjadi peningkatan beban usaha di tahun 2017, peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan yang sangat signifikan pada beban administrasi dan umum, dalam hal ini beban sewa sebesar 455% dan beban pajak sebesar 288%.

ASPEK MANAJEMEN RISIKO

Proses Manajemen Risiko PT Jamkrida Jabar adalah proses yang dilakukan untuk mengelola risiko yang melekat pada setiap proses bisnis di setiap bagian dan level dalam perusahaan sehingga mampu memberikan keyakinan tercapainya tujuan dan mengurangi ketidakpastian yang melekat pada suatu proses bisnis yang ada akhirnya akan menciptakan kesempatan atau *opportunity* secara lebih sistematis.

Secara umum proses manajemen risiko yang dilaksanakan terdiri dari 4 tahap utama, yaitu:

1. Identifikasi risiko
2. Penilaian risiko/*risk assessment*
3. Penanganan risiko/*risk response*
4. *Monitoring* dan evaluasi

Dalam melaksanakan penjaminan kredit, perusahaan harus tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko penjaminan, risiko klaim, risiko keuangan, risiko hukum, dan risiko lainnya yang berpotensi merugikan perusahaan.

Perusahaan penjaminan sangat rentan terhadap risiko. Pada umumnya karakteristik risiko penjaminan bersifat *speculative (risiko moral hazard)*. Beberapa strategi yang dilakukan Perseroan dalam melakukan mitigasi risiko penjaminan adalah dengan cara mempersyaratkan agunan, pembentukan cadangan klaim, penjaminan ulang dan penjaminan bersama dengan Perusahaan penjaminan sejenis ataupun Perusahaan asuransi (*re-guarantee, dan co-guarante*).

Kegiatan Manajemen Risiko PT Jamkrida Jabar masih bersifat periodik dan insidental. Dimana secara periodik khususnya dalam laporan bulanan maupun triwulan ditampilkan profil risiko setiap skim kredit yang dijamin serta mitra bisnis sehingga dapat dijadikan tolak ukur serta pengambilan keputusan manakala profil risikonya menunjukkan indikasi kerugian bagi perusahaan kedepannya. Untuk penerapan manajemen risiko secara insidental dalam bentuk kajian-kajian manajemen risiko terkait penilaian kegiatan yang akan ditempuh oleh Perusahaan (kajian mitra usaha dalam rangka kerjasama baru, penempatan deposito, pembelian obligasi, dan lain-lain). Hasil dari analisa dan penilaian risiko tersebut akan dibahas rapat Manajemen PT Jamkrida Jabar untuk menentukan mitigasi risiko yang akan dilakukan.

Perseroan pun memiliki beberapa komite dibawah Direksi, adalah Komite Penjaminan dan Komite Manajemen Risiko dan Klaim yang yang rutin mengadakan pertemuan bersama untuk membahas dan membuat analisa terkait rencana kerjasama penjaminan dengan para mitra baru, menganalisa permohonan penjaminan yang nilai penjaminannya memerlukan pertimbangan khusus, komite klaim dengan nilai pengajuan yang besar, dan juga membahas terkait kejadian-kejadian luar biasa dalam kinerja operasional Perseroan.

Dengan adanya beberapa komite dibawah Direksi tersebut, maka Perseroan dapat meminimalisir kemungkinan kerugian pada Perseroan di masa yang akan datang.

Pada tahun 2017 perusahaan juga melakukan beberapa mitigasi risiko diantaranya:

1. Melakukan pembaharuan perjanjian kerjasama (PKS) dengan menambahkan klausula yang dapat digunakan untuk meminimalkan risiko.

2. Melakukan penyebaran risiko dengan menempatkan sebagian risiko (regaransi) ke 2 (dua) perusahaan reasuransi yaitu NasRe dan IndonesiaRe (konvensional dan syariah).
3. Mengoptimalkan penagihan piutang subrogasi.
4. Menerapkan metode *Stop Loss* khusus untuk skim kredit yang dianggap risikonya tinggi.

Adapun untuk kedepannya sebagai salah satu unsur pedoman dalam penyusunan GCG (Good Corporate Governance) maka untuk pedoman penerapan Manajemen Risiko telah ditetapkan 7 risiko sebagai parameter penilaian risiko yang dihadapi perusahaan diataranya risiko: strategi, operasional, aset dan liabilitas, kepengurusan, tata kelola, dukungan dana (permodalan) serta risiko penjaminan yang saat ini masih dalam tahap penyusunan.

KLAIM DAN SUBROGASI

A. Klaim

Biaya Klaim yang terealisasi tahun 2017 adalah senilai 14,27 Miliar Rupiah atau sebesar 101,2% dari Biaya Klaim yang dianggarkan dalam RKAP 2017. Realisasi biaya klaim yang melampaui target tersebut terutama bersumber dari kecenderungan naiknya klaim dari Kredit Multiguna, Kredit Konstruksi, Bank Garansi, dan Kredit Mikro Utama.

Khusus kredit multiguna klaim yang terjadi didominasi oleh klaim akibat terjamin meninggal dunia, sedangkan kredit lainnya umumnya disebabkan oleh kredit macet (wanprestasi).

Terkait biaya cadangan klaim di tahun 2017 terdapat penurunan dibandingkan tahun 2016 sebesar 163,14%, hal ini disebabkan berlakunya

Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan yang mengatur metode baru perhitungan pembentukan cadangan klaim, di mana semula dihitung 0,25% dari total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri, berubah menjadi paling sedikit mana yang lebih banyak antara 0,01% dari total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri atau penjumlahan dari 100% dari total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri pada saat klaim dilaporkan dengan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*incurred but not reported*).

Berdasarkan data klaim dan regaransi tahun 2017, dapat digambarkan bahwa keberadaan dari perusahaan Regaransi turut andil dalam mengurangi kerugian/biaya yang disebabkan oleh beban klaim. Sebagai contohnya adalah Penjaminan Kredit Multiguna yang diregaransikan dengan *share* sebanyak 40%, berarti bahwa Perseroan hanya memiliki kewajiban pembayaran sebesar 60% dari total biaya klaim sebenarnya. Langkah tersebut terbukti sangat signifikan dalam menekan angka pembayaran klaim yang dilakukan oleh Perseroan.

Strategi regaransi untuk membagi potensi risiko klaim akan dijalankan oleh Perseroan untuk tahun-tahun selanjutnya, terutama untuk kredit-kredit yang memiliki potensi klaim cukup tinggi seperti Kredit Mikro, Multiguna, dan Kredit program Pemerintah seperti KCR.

Adapun strategi lainnya pada bidang klaim adalah melakukan sosialisasi, meningkatkan pemahaman penerima jaminan tentang prosedur pembayaran klaim oleh Perseroan, meningkatkan akurasi analisa klaim (tepat bayar dan tepat jumlah) serta menerapkan metode *Stop loss* khusus untuk skim kredit yang dianggap risikonya tinggi.

B. Subrogasi

Subrogasi adalah peralihan hak tagih dan penerima jaminan kepada penjamin setelah penerima jaminan menerima pembayaran klaim dari

penjamin. Perseroan sebagai pihak penjamin membukukan hasil dari penagihan subrogasi sebagai pendapatan Perseroan.

Capaian pendapatan subrogasi Perseroan tahun 2017 adalah senilai 831,83 Juta Rupiah atau sebesar 118,38% di atas target dalam RKAP 2017 senilai 702,79 Juta Rupiah. Capaian tersebut sebagian besar diperoleh dari penyelesaian klaim kredit konstruksi dimana pengembalian subrogasinya di periode tahun yang sama selain dari skim kredit produktif lainnya. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, pendapatan subrogasi Perseroan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 15,98% atau senilai 158,21 Juta Rupiah.

Adapun pendapatan subrogasi tahun 2017 berasal dari subrogasi atas klaim kredit multiguna, kredit cinta rakyat, bank garansi, kredit konstruksi dan kredit modal usaha.

Untuk lebih meningkatkan pendapatan subrogasi, Perseroan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan *update* data subrogasi setiap bulan secara rutin.
2. Melakukan rekonsiliasi data subrogasi secara periodik dengan kantor cabang Penerima Jaminan (Bank dan Non Bank) terkait minimal setiap 3 bulan, baik melalui surat maupun *on the spot* di lapangan.
3. Melakukan penagihan kepada debitur secara bersama-sama dengan Penerima Jaminan (Bank dan Non Bank) secara optimal.
4. Menginventarisasi data agunan debitur khususnya untuk kasus tertentu dimana proses pembayaran dirasa cukup sulit atau nasabah tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran, dan bekerjasama dengan Penerima Jaminan (Bank dan Non Bank) untuk melakukan penjualan agunan baik melalui proses lelang maupun melalui Lembaga yang ditunjuk oleh Penerima Jaminan (Bank dan Non Bank).

Strategi subrogasi kedepan adalah meningkatkan kegiatan monitoring dan penagihan piutang subrogasi serta menerapkan pola insentif (*Collecting fee*) kepada penerima jaminan yang melakukan penagihan subrogasi kepada terjamin sesuai anggaran yang telah disediakan sehingga pendapatan subrogasi dapat ditingkatkan.

ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA



Sesuai falsafah manajemen modern, Perseroan memandang dan memposisikan sumber daya manusia (SDM) sebagai unsur Perseroan yang sangat berharga dan sangat penting dalam proses kegiatan usaha, bukan hanya sebagai faktor produksi yang merupakan biaya bagi Perseroan. Memahami pentingnya peran SDM bagi Perseroan, maka manajemen menerapkan *Competency Based Human Resources Management (CBHRM)* dalam proses perekrutan, penempatan, dan pembinaan.

Pada tahun 2017 ini, Perseroan telah merekrut beberapa tenaga SDM yang telah memiliki pengalaman untuk mengisi beberapa bagian yang mendukung operasional Perseroan. Hal ini sesuai dengan kebutuhan Perseroan dalam upaya untuk mencapai target 2017. Selain rekrutmen, Perseroan juga melakukan rotasi dan promosi SDM untuk meningkatkan kinerja Perseroan.

Dalam melakukan aktifitas operasionalnya, Perseroan saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 44 (*empat puluh empat*) orang dengan klasifikasi:

- 2 (*dua*) orang Dewan Komisaris;
- 2 (*dua*) orang Dewan Pengawas Syariah;
- 3 (*tiga*) orang Direksi;
- 26 (*dua puluh enam*) orang Karyawan Tetap; dan
- 11 (*sebelas*) orang Karyawan Kontrak Waktu Tertentu (KKWT).

Adapun perubahan jumlah karyawan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beroperasi Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut:

PT JAMKRIDA JABAR
PERUBAHAN JUMLAH SDM
PERIODE 2013-2017

JABATAN	JUMLAH				
	2013	2014	2015	2016	2017
Dewan Komisaris	3	3	3	3	2
Dewan Pengawas Syariah	0	2	2	2	2
Direksi	3	3	3	3	3
Kepala Divisi	3	3	3	3	3
Kepala Bagian	2	4	4	4	4
Staf	9	8	11	14	19
Karyawan Kontrak (KKWT)	7	7	10	11	11
TOTAL	27	30	36	40	44

Pada tahun 2017 jumlah SDM Perseroan bertambah 4 (empat) orang menjadi 44 (empat puluh empat) orang yang sebelumnya berjumlah 40 (empat puluh) orang di tahun 2016. Perubahan jumlah SDM ini terjadi karena adanya perubahan komposisi Dewan Komisaris dari 3 (tiga) orang menjadi 2 (dua) orang dan perekrutan 5 (lima) orang staf baru. Kelima staf tersebut diantaranya Staf Manajemen Risiko, Staf SDM, Staf Investasi, Staf Penjaminan, dan Staf Perencanaan Perusahaan.

Pengembangan kompetensi SDM mutlak diperlukan dengan meningkatkan keterampilan dan kemampuan secara khusus, untuk mencapai hasil kerja yang berbasis pada kinerja (*performance target*) yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan beberapa program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan operasional penjaminan dan diikuti oleh karyawan Perseroan baik dalam bentuk *In House Training* ataupun mengirimkan beberapa orang karyawan untuk mengikuti *Short Course*, seminar, *workshop* dan pelatihan lainnya. Melalui program pendidikan dan pelatihan ini diharapkan dapat memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan dari karyawan sesuai dengan visi dan misi Perseroan.

Pada tahun 2017, karyawan PT Jamkrida Jabar mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kinerja Perseroan. Pendidikan dan pelatihan tersebut diantaranya adalah:

NO	JUDUL PENDIDIKAN & PELATIHAN	WAKTU PELAKSANAAN	PESERTA	KETERANGAN
1	Sharing Session Pendalaman Tugas & Fungsi SPI	Januari	Staf SPI	Sudah Dilaksanakan
2	Training Good Corporate Governance	Maret	Sekretaris Perusahaan	Sudah Dilaksanakan
3	Bimtek: PEPRES No. 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat PERPRES No. 54 Th. 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berbasis Komputer.	April	Staf Adm & Umum	Sudah Dilaksanakan
4	Seminar Nasional IKADIN: "Pertanggung Jawaban Hukum Para Pimpinan dan Pengurus Korporasi (Swasta-	April	Sekretaris Perusahaan	Sudah Dilaksanakan

NO	JUDUL PENDIDIKAN & PELATIHAN	WAKTU PELAKSANAAN	PESERTA	KETERANGAN
	BUMN/BUMD) dalam Tindak Pidana Umum dan Korupsi"			
5	Workshop Pasar Modal Syariah	April	Staf Akunting dan Staf Investasi	Sudah Dilaksanakan
6	Compliance Integrity Leadership Program (CLEAR)	April	Sekretaris Perusahaan dan Staf Hukum & SDM	Sudah Dilaksanakan
7	Seminar Peran SPI Sebagai Mitra Strategis Manajemen di Lingkungan BUMD	April	Staf SPI	Sudah Dilaksanakan
8	Pelatihan Bisnis Bersih Tanpa Korupsi	April	Sekretaris Perusahaan dan Staf Hukum & SDM	Sudah Dilaksanakan
9	Sosialisasi & Pelatihan OJK: Penguatan Governance Untuk OJK Yang Terpercaya	Mei	Sekretaris Perusahaan	Sudah Dilaksanakan
10	Seminar Internasional OJK: Changing Consumer Behavior Through Financial Literacy, Financial Inclusion, and Consumer Protection	Mei	Direktur Utama	Sudah Dilaksanakan
11	Workshop Current Issues In Enterprise Risk Management	Mei	Direktur Utama dan Direktur Operasional	Sudah Dilaksanakan
12	Orientasi Pegawai Baru	Mei	Staf Investasi, Staf Klaim, dan Staf SDM	Sudah Dilaksanakan
13	PPL Ikatan Akuntan Indonesia	Juni	Kadiv Keuangan & Umum	Sudah Dilaksanakan
14	Workshop Pengembangan Industri Keuangan Syariah	Juni	Staf Investasi & Staf Akunting	Sudah Dilaksanakan

NO	JUDUL PENDIDIKAN & PELATIHAN	WAKTU PELAKSANAAN	PESERTA	KETERANGAN
	Melalui Penerbitan Instrumen Pasar Modal Syariah			
15	Workshop Manajemen Risiko Perpajakan & Tax Planning Pasca Tax Amnesty	Agustus	Kadiv Keuangan & Umum, Staf Akunting, Satuan Pengawas Internal	Sudah Dilaksanakan
16	Pendidikan Auditor Hukum	Agustus	Staf Hukum & SDM	Sudah Dilaksanakan
17	Workshop Bandung Business Forum	Agustus	Staf Akunting, Staf Investasi	Sudah Dilaksanakan
18	Pembentukan Komite Advokasi Daerah Antikorupsi Provinsi Jawa Barat	September	Sekretaris Perusahaan, Staf Huku & SDM	Sudah Dilaksanakan
19	Pelatihan Penjaminan Syariah dan Manajemen Risiko Asippindo	September	Ka UUS, Staf Penjaminan Syariah, Staf Manrisk	Sudah Dilaksanakan
20	<i>Workshop Forensic Accounting Vs Investigative Audit</i>	September	Direktur Keuangan, Kadiv Keuangan & Umum, Satuan Pengawas Internal	Sudah Dilaksanakan
21	Workshop Annual Meeting DPS	Oktober	Dewan Pengawas Syariah	Sudah Dilaksanakan
22	Workshop Pasar Modal Syariah untuk Investor Institusi	Oktober	Staf Keuangan, Staf Investasi	Sudah Dilaksanakan
23	Pelatihan Intensive Surety Bond dan Pelatihan Service Excelent	Oktober	Staf Senior Penjaminan, Staf Penjaminan	Sudah Dilaksanakan
24	Workshop Market Update oleh Danareksa	November	Staf Keuangan, Staf Investasi	Sudah Dilaksanakan

NO	JUDUL PENDIDIKAN & PELATIHAN	WAKTU PELAKSANAAN	PESERTA	KETERANGAN
	Investment Management			
25	Certified Risk Management Officer (CRMO)	November	Kabag Klaim & Subrogasi, Staf Subrogasi	Sudah Dilaksanakan
26	Workshop Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI)	November	Kadiv Keuangan & Umum, Staf Akunting	Sudah Dilaksanakan
27	Diklat Linux Fundamental Administration	November	Staf Senior IT	Sudah Dilaksanakan
28	Program Sertifikasi CRGP + Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko	November	Komisaris	Sudah Dilaksanakan
29	Diklat Creative Cashflow & Treasury Management	November	Staf Keuangan, Staf Investasi	Sudah Dilaksanakan
30	Sosialisasi Layanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sektor Jasa Keuangan	Desember	Sekretaris Perusahaan	Sudah Dilaksanakan

ASPEK UMUM

Sebagai bagian *supporting* yang menunjang kebutuhan dan sarana prasarana dari divisi-divisi lain dalam menjalankan operasional, maka berikut ini adalah capaian yang dilakukan oleh bagian umum PT Jamkrida Jabar pada tahun 2017:

1. Pengelolaan Inventaris Kantor.
 - a. Gedung dan aset-aset di dalamnya.
 - b. Kendaraan inventaris kantor.
 - c. Pengadaan kebutuhan karyawan seperti ATK, seragam, dan lain-lain.
2. Penertiban Administrasi.
 - a. Penertiban administrasi kantor.
 - b. Penertiban pengarsipan dokumen kantor.
3. Mengadakan renovasi gedung kantor (pembangunan mesjid).
4. Menyediakan sarana prasarana dalam penyelenggaraan RUPS untuk Tahun Buku 2016 & RUPS LB 2017 pengesahan RKAP tahun 2018.
5. Mempersiapkan sarana prasarana kebutuhan beberapa pameran, diantaranya:
 - a. Festival Ekonomi Syariah Tahun 2017.
 - b. Festival Wirausahabaru Tahun 2017.
6. Bersama-sama dengan bagian SDM menyelenggarakan *Training/Inhouse Training*.

ASPEK TEKNOLOGI DAN KESISTEMAN

Untuk tahun 2017 secara garis besar bagian IT Perseroan sudah merencanakan program kerja sebagai berikut:

1. *Support* IT keseluruhan (Jaringan, Internet, listrik, telepon dan lain-lain).
2. *Monitoring* dan *maintenance Database* Penjaminan dan keuangan.
3. Pembuatan sistem Manajemen IJP *Accrual Basis*.
4. Pembuatan sistem *Backup Database* Otomatis.
5. Peningkatan dan *Upgrading Server Database*.
6. Pemeliharaan sistem *Firewall* internet dan jaringan LAN.
7. *Upgrading* modul-modul sistem Informasi penjaminan dan Keuangan
8. Integrasi dan konsolidasi sistem Konvensional dan Syariah.

Pembahasan Program kerja:

1. ***Support* IT Keseluruhan (Jaringan, Internet, Listrik, Telepon dan lain-lain)**

Bagian IT selalu siap mendukung seluruh kegiatan produksi PT Jamkrida Jabar untuk sarana dan prasarana pendukung yang terkait dengan IT, seperti Jaringan LAN, *hardware* komputer, telepon, internet, kelistrikan dan lain-lain.

2. ***Monitoring* dan *Maintenance Database* Penjaminan dan Keuangan**

Monitoring dan perbaikan di sisi *database* penjaminan dan keuangan dilakukan untuk menjamin penyajian laporan yang valid. Selain itu,

database juga perlu di-*maintenance* untuk interval waktu tertentu, misalnya 3 bulan sekali atau minimal 6 bulan sekali. Hal ini perlu dilakukan supaya kondisi *database* tetap lancar dan stabil.

3. Pembuatan Sistem Manajemen IJP *Accrual Basis*

Seiring dengan semakin besarnya produksi IJP yang dihasilkan di bagian penjaminan, maka pencatatan IJP di bagian pembukuan dan keuangan juga semakin banyak dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang bisa membantu menghitung dan membukukannya. Sistem informasi manajemen IJP *accrual basis* dibuat untuk membantu pencatatan besarnya IJP *cash basis* dibagi dengan jangka waktu penjaminannya. Selain itu sistem IJP *accrual basis* juga mencatat dan menghitung regaransi *accrual basis*, klaim *accrual basis*, restitusi *accrual basis* dll.

4. Pembuatan Sistem Informasi Keuangan Syariah

Sistem Informasi keuangan Syariah merupakan sebuah sistem yang terpisah dengan sistem informasi keuangan konvensional. Sehingga seluruh *database* dan aplikasinya juga perlu dibuat terpisah. Seperti sistem konvensional, sistem kafalah juga mencakup seluruh proses keuangan syariah mulai dari pencatatan kas keluar sampai dengan laporan keuangan seperti konvensional.

5. Pembuatan Sistem *Backup Database* Otomatis

Perencanaan dan pembuatan sistem *backup* otomatis, memerlukan perangkat pendukung untuk sistem *backup* tersebut. Perangkat yang dibutuhkan adalah *Backup Server*, Aplikasi *Backup* dan media penyimpanan diluar *Server* yang berupa *external Harddisk* dan DVD.

Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan apabila terjadi kerusakan pada *server* atau *force major* yang tidak diinginkan seperti kebakaran, bencana alam, banjir dan lain-lain. Dengan adanya sistem *backup* tersebut kita punya salinan data dari semua transaksi yang sudah dilakukan.

6. Peningkatan dan *Upgrading Server Database*

Dengan semakin banyaknya data dan transaksi yang terjadi di aplikasi penjaminan dan keuangan, maka otomatis akan menambah berat kerja *server* dan meningkatnya kapasitas penyimpanan di *database*. Oleh karena itu perlu dilakukan *upgrading hardware server database* beserta *operating system* dan aplikasi pendukungnya supaya tetap handal dan berjalan lancar.

7. Pemeliharaan *Firewall System Internet* dan Jaringan LAN

Semakin banyaknya koneksi keluar jaringan lokal, maka akan semakin rawan terhadap ancaman gangguan koneksi internet. Oleh karena itu, diperlukan pemeliharaan firewall internet dan jaringan lokal yang berfungsi untuk menyaring dan mengatasi gangguan koneksi yang tidak diinginkan.

8. *Upgrading Modul-Modul Sistem Informasi Penjaminan dan Keuangan*

Seiring dengan perkembangan proses bisnis dan banyaknya kebutuhan penambahan untuk sistem informasi penjaminan dan keuangan, maka diperlukan *upgrade* dengan menambahkan modul-modul baru dan memperkuat di sisi keamanannya. Oleh karena itu, diperlukan *upgrade* sistem informasi penjaminan dan keuangan dengan melibatkan *vendor* pembuat aplikasi tersebut.

9. Integrasi dan Konsolidasi Sistem Konvensional dan Syariah

Setelah sistem informasi konvensional dan syariah selesai dibuat perlu dilanjutkan dengan sistem konsolidasi antara keduanya. Sehingga diperlukan sebuah sistem yang menggabungkan antara sistem konvensional dengan sistem syariah.

ASPEK PENGAWASAN

Sebagai organ pendukung Perseroan dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai tambah bagi *stakeholders*, yaitu suatu kaidah, norma ataupun praktik bisnis yang sehat dan beretika. Dalam penerapannya, tata kelola perusahaan yang baik memerlukan praktik pengawasan yang mengacu pada prinsip GCG.

Dalam mewujudkan GCG, SPI memiliki beberapa peran, diantaranya:

1. sebagai pengawas independen yang melakukan audit, evaluasi dan menilai operasional dan aktivitas perusahaan;
2. sebagai katalisator dan konsultan dalam hal-hal tertentu bagi Direksi dan manajemen yang berkaitan dengan praktik manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan praktik GCG serta dalam upaya meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan secara berkelanjutan.

Unit Satuan Pengawasan Internal (SPI) Perseroan merupakan aparat pengawas (auditor) internal Perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.

Unit Satuan Pengawasan Internal (SPI) di PT Jamkrida Jabar baru mulai didirikan pada bulan Juli 2016. Perseroan mengharapkan pada tahun 2018, segala fungsi, tugas, dan tanggung jawab SPI akan lebih berfungsi secara optimal.

UNIT USAHA SYARIAH





Nomor : S-0023/DPJ/JJ/I/2018
Lampiran : 1 (*satu*) set
Perihal : Laporan Hasil Pengawasan
DPS PT Jamkrida Jabar UUS
Periode Tahun 2017

Bandung, 03 Januari 2018

Kepada Yth.
Dewan Syariah Nasional (DSN) – MUI
Jl. Dempo No. 19
Pegangsaan, Menteng,
Jakarta Pusat 10320

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan ini kami laporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrida Jabar UUS Periode 01 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017 yang memuat antara lain:

1. Laporan Pelaksanaan atas kesesuaian produk dan jasa UUS dengan Fatwa DSN-MUI.
2. Opini Syariah secara keseluruhan atas pelaksanaan operasional UUS dalam Laporan Publikasi Perseroan.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dewan Pengawas Syariah
PT Jamkrida Jabar

ttd

Zaini Abdul Malik
Ketua

Tembusan Kepada Yth. :

1. Komisaris PT Jamkrida Jabar
2. Direksi PT Jamkrida Jabar
3. Arsip

Lampiran 1.

**Kertas Kerja Laporan Pengawasan
Dewan Pengawas Syariah**

Nama Perseroan : PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah
Tanggal Laporan : 03 Januari 2018

No.	Uraian	Pendapat DPS		
		Sesuai Syariah	Tidak Sesuai Syariah	Catatan
1.	Kesesuaian Produk & Jasa dengan Fatwa DSN			
	a. Kafalah <i>Cash Loan</i>			
	- Kafalah Pembiayaan Usaha Mikro/Kecil	✓		
	- Kafalah Pembiayaan Usaha Menengah (Umum)	✓		
	- Kafalah Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa	✓		
	- Kafalah Pembiayaan Konsumtif/Multiguna	✓		
	b. Kafalah <i>Non Cash Loan</i>			
	- Kafalah Bank Garansi	✓		
	- <i>Surety Bond</i>	✓		
	c. Investasi			
	- Penempatan Deposito	✓		
	- Pembelian Surat Berharga	✓		
2.	Pedoman Operasional & Produk UUS Telah Sesuai dengan Prinsip Syariah dalam Fatwa DSN			
	a. Pedoman Operasional Kafalah			
	- <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Produk-produk Kafalah	✓		
	- Akad-akad Kerja Sama Kafalah dengan Mitra	✓		
	b. Pedoman Keuangan & Investasi	✓		
	c. Pedoman Manual Sistem Akuntansi sesuai dengan PSAK	✓		
3.	Opini Syariah secara keseluruhan atas pelaksanaan operasional UUS dalam Laporan Publikasi Perseroan	✓		
4.	Informasi Temuan Lainnya oleh DPS			
	a. -	-		
	b. -	-		
5.	Usulan dan Rekomendasi			
	a. Tetap memperhatikan pedoman yang berlaku			
	b. Terus meningkatkan kinerja dengan prinsip kehati-hatian			

Lampiran 2.

Kertas Kerja
Pengawasan Terhadap Proses Pengembangan Produk Baru
Tahun 2017
PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah

Nama Produk Baru :

No.	Aktivitas Yang Dilakukan	Hasil Pengawasan
1	Meminta penjelasan dari pejabat Perseroan/UUS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan.	Belum terdapat produk baru sehingga tidak dilakukan pengawasan
2	Memeriksa apakah produk baru yang akan dikeluarkan telah terdapat/sesuai dengan fatwa DSN-MUI : <ul style="list-style-type: none">- Jika belum terdapat fatwa, DPS mengusulkan kepada Direksi untuk mengajukan surat permohonan ketetapan fatwa dari DSN-MUI; atau- Jika telah terdapat/sesuai fatwa, DPS melakukan analisa atas kesesuaian produk baru dengan fatwa DSN-MUI	-
3	Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait pemenuhan Prinsip Syariah.	-
4	Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.	-

Lampiran 3.

Kertas Kerja
Pengawasan Terhadap Kegiatan Perseroan
Tahun 2017
PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah

Nama Kegiatan :

No.	Aktivitas Yang Dilakukan	Hasil Pengawasan
1	Menganalisa laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit internal, untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan operasional (produk & jasa) dan kegiatan keuangan.	Sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
2	Memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan operasional dan keuangan untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam SOP Perusahaan Penjaminan.	Sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
3	Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada karyawan Perseroan dan/atau mitra sebagai <i>Makful Lahu</i> dan/atau nasabah sebagai <i>Makful Anhu</i> untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen, sebagaimana dimaksud pada angka 2, apabila diperlukan.	Belum pernah dilakukan, namun untuk tahun 2018 insya Allah akan difasilitasi melalui mekanisme <i>Whistle Blowing System (WBS)</i>
4	Melakukan <i>review</i> terhadap SOP Kafalah terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidak-sesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud.	Sudah dilakukan dan sesuai dengan Prinsip Syariah
5	Memberikan pendapat syariah atas kegiatan keuangan (akuntansi dan investasi).	Harus sesuai dengan akuntansi dan investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah
6	Melaporkan hasil pengawasan kepada Direksi dan Komisaris.	Sudah dilakukan

LAPORAN PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH			
PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah			
No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Zaini Abdul Malik	Ketua	ttd
2	Khozin Abu Faqih	Anggota	ttd



KINERJA UNIT USAHA SYARIAH

Sebagai sayap baru dalam bisnis penjaminan yang dijalankan oleh Perseroan, Unit Usaha Syariah yang telah mendapatkan izin pembentukan dari OJK No. KEP-4/NB.223/2015 tanggal 3 Februari 2015, mulai menjalankan produksi pada bulan Mei 2015. Ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama *Kafalah* Pembiayaan (Penjaminan Kredit) dengan Bank BJB Syariah pada tanggal 4 Mei 2015, dan berlanjut dengan ditandatanganinya beberapa kerja sama *kafalah* pembiayaan dengan lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank lainnya. Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar dipimpin oleh Kepala Unit Usaha Syariah dan dibina oleh dua orang Dewan Pengawas Syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta telah lolos Uji Kemampuan dan Keputusan dari OJK.

Sebagai sarana penunjang operasionalnya, Unit Usaha syariah PT Jamkrida Jabar telah membangun Sistem Informasi *Kafalah* berbasis web. Dimana sistem tersebut dapat menampilkan data Penjaminan, Klaim, dan Subrogasi secara *up to date*, selain itu juga dapat ditampilkan perhitungan *gearing ratio*, regaransi, dan *bussiness recovery program*. Rencana ke depan Sistem ini akan terintegrasi dengan Sistem Informasi Keuangan.

Berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada 31 Desember 2017, Unit Usaha Syariah mampu membukukan laba senilai 304,41 Juta Rupiah. Dengan modal awal pendirian senilai 15 Miliar Rupiah dan penambahan modal senilai 8 Miliar Rupiah, total aset yang dimiliki oleh Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar 30,51 Miliar Rupiah. Maka dalam kurun waktu tiga tahun beroperasi, aset Unit Usaha Syariah telah bertumbuh 15,51 Miliar Rupiah.

Data tahun 2017 menunjukkan bahwa volume *kafalah* pembiayaan Unit Usaha Syariah tahun 2017 terealisasi senilai 400,77 Miliar Rupiah atau sebesar 100,19% atau mengalami peningkatan senilai 755,9 Juta Rupiah dari anggaran tahun 2017. Adapun capaian volume IJK *accrual basis* adalah senilai 2,09 Miliar Rupiah atau sebesar 132,27% dari anggaran tahun 2017 senilai 1,58 Miliar Rupiah. Capaian di atas anggaran tersebut dikarenakan Unit Usaha Syariah melakukan beberapa kerja sama *kafalah* pembiayaan dengan lembaga keuangan syariah baru dan menuai hasil yang memuaskan. Perseroan optimis bahwa di tahun-tahun mendatang Unit Usaha Syariah akan semakin berkembang dan tetap menunjukkan *trend* yang positif.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan, strategi Unit Usaha Syariah pada tahun 2017 masih tetap fokus pada penjaminan secara tidak langsung baik *cash loan* maupun *non cash loan* melalui kerja sama *kafalah* dengan lembaga keuangan baik bank maupun non bank, seperti :

- Kafalah Pembiayaan Mikro
- Kafalah Pembiayaan Umum
- Kafalah Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang dan atau Jasa
- Kafalah Pembiayaan Konsumtif (Multiguna)
- Kafalah Bank Garansi (Kontra Bank Garansi)

Sedangkan untuk penjaminan secara langsung seperti produk *Surety Bond*, baru akan dijalankan pada tahun 2018 mendatang.

PROSPEK DAN PENGEMBANGAN USAHA



PROSPEK DAN PENGEMBANGAN USAHA

Dalam mendorong pengembangan usaha penjaminan kredit, Perseroan akan terus berupaya memperluas jaringan pemasaran dan kemitraan dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Perseroan menggunakan konsep *Market Driven* dalam memetakan pasar-pasar yang potensial (baik wilayah maupun mitra kerja), mengidentifikasi kebutuhan pasar (mitra kerja), mengumpulkan dan meng-*update* kondisi pasar termasuk pesaing. Hal-hal tersebut akan menunjang kelengkapan dan akurasi data yang diperlukan dalam membuat profil risiko dan kebijakan yang akan diambil. Selain itu Perseroan akan meng-*update* dan me-*review Standard Operating Procedures* (SOP) Penjaminan maupun Perjanjian-perjanjian Kerja Sama disesuaikan dengan kondisi pasar, evaluasi kerja sama resiprokal secara periodik, membuka peluang kerja sama penjaminan bersama (*Co-Guarantee*) dengan perusahaan penjaminan lain, membuka peluang kerja sama produk (*Co-Branding*) dengan perusahaan asuransi, melakukan *gathering* dan sosialisasi bisnis penjaminan, dan *upgrade* sistem informasi.

Pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah yang menyatakan bahwa "*Tahun 2018 dan seterusnya: Rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap Total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 20%*". Hal tersebut merupakan peluang bagi Perseroan untuk meningkatkan peran serta dalam pengembangan sektor produktif sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

KEBIJAKAN DIVIDEN



KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan yang dilakukan perusahaan terkait dengan laba bersih perusahaan adalah:

1. Sesuai dengan POJK Nomor 6/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penjaminan, pada Pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa "Lembaga Penjaminan wajib memiliki cadangan umum paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari laba bersih atau selisih hasil usaha pada tiap akhir periode laporan tahunan".
2. Sebagai entitas yang relatif masih baru, PT Jamkrida Jabar tentunya membutuhkan permodalan yang relatif besar untuk menjaga likuiditasnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, yang menyatakan bahwa Lembaga Penjaminan wajib menjaga likuiditasnya dengan rasio paling sedikit 150%.
3. Selain dari hal tersebut, hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan juga menjadi salah satu dasar Perseroan dalam menyusun kebijakan dividen dan menyusun kebijakan penggunaan laba bersih Perseroan.





RENCANA DAN STRATEGI BISNIS TAHUN 2018

RENCANA DAN STRATEGI BISNIS TAHUN 2018

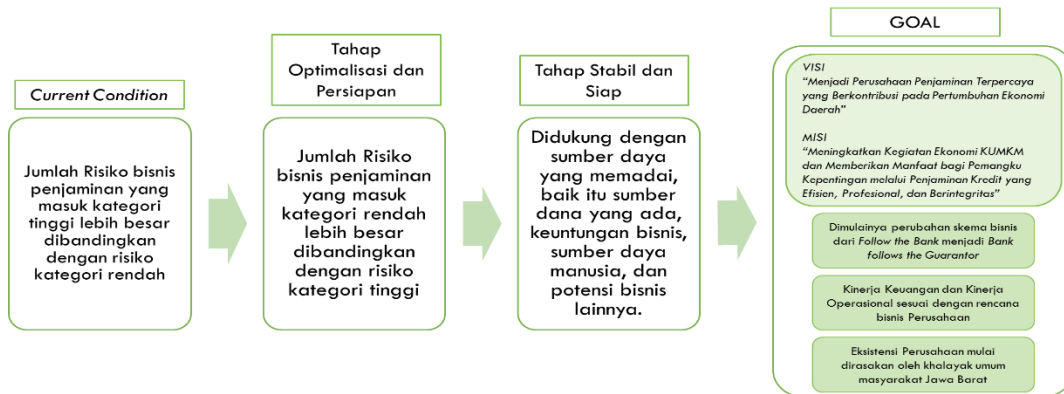
Sasaran utama dalam rencana jangka panjang dan strategi Perseroan adalah peningkatan jumlah terjamin/debitur di sektor produktif (KUMKM) di Jawa Barat sebagai bagian dari implementasi janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih yaitu pembukaan 2 Juta lapangan pekerjaan baru dan penciptaan 100 ribu wirausaha (UMKM) baru dengan tetap memperhatikan prinsip bisnis penjaminan, yaitu *prudent*, *profitable*, dan berdaya guna serta berbasis risiko. Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut, maka Perseroan perlu melakukan langkah-langkah strategis diantaranya adalah:

- Peningkatan jumlah mitra strategis perusahaan yang dibutuhkan untuk mempercepat pengembangan dan pencapaian sasaran Perseroan, tidak hanya terbatas pada lembaga keuangan baik bank ataupun non-bank, tetapi juga kepada mitra-mitra lain yang memiliki kesamaan tujuan;
- Melakukan optimalisasi produk-produk penjaminan yang telah mendapatkan izin dari regulator;
- Mempromosikan dan mensosialisasikan produk penjaminan kepada calon mitra baru melalui media cetak dan elektronik;
- Mengoptimalkan unit usaha syariah melalui kerjasama dengan mitra baru yang berbasis syariah;
- Menjaga keseimbangan komposisi penjaminan produktif dan konsumtif sesuai dengan regulasi sekurang-kurangnya dengan perbandingan 1:4;
- Sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, pelayanan kepada mitra merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan Perseroan;

- Penerbitan Sertifikat Penjaminan yang cepat dan tepat, serta penanganan klaim yang mudah dan pembayaran klaim yang benar dan tepat waktu menjadi komponen penting dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada mitra;
- Dalam menghadapi persaingan yang semakin tinggi dan kompleksitas pengelolaan data di lingkungan internal, perusahaan dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi;
- Pengawasan dalam pengelolaan anggaran perusahaan secara periodik agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- Menerapkan investasi pada mitra strategis dengan prinsip aman dan menguntungkan serta mengedepankan kerjasama resiprokal;
- Penggunaan sistem akuntansi yang terintegrasi dengan bagian penjaminan sehingga penyajian laporan keuangan dapat dilakukan dengan efektif, efisien, dan akuntabel;
- Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM melalui program-program pelatihan yang dilaksanakan;
- Membuat kajian dan kebijakan terkait dengan mitigasi risiko terhadap semua produk yang akan dipasarkan oleh perusahaan;
- Melakukan optimalisasi pendapatan piutang subrogasi.

RENCANA DAN STRATEGI BISNIS TAHUN 2018

ROADMAP STRATEGI DAN OPERASIONAL PERSEROAN



RENCANA KERJA TAHUN 2018



RENCANA KERJA TAHUN 2018

Pencapaian Perseroan yang signifikan dan positif pada tahun 2017, membuat Perseroan merasa optimis untuk menyusun Rencana Kerja tahun 2018. Untuk tahun 2018 sendiri, target pencapaian di segi operasional dinaikan rata-rata sebesar 25%. Hal tersebut merupakan sebuah harapan positif dari Perseroan, dimana Perseroan bertekad untuk membukukan pencapaian yang semakin baik di tahun 2018.

Dengan diresmikannya Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar pada bulan Februari 2015, juga turut menambah kontribusi bagi Perseroan. Maka pada tahun 2018, kinerja dari Unit Usaha Syariah akan dioptimalkan, hal ini dimungkinkan karena potensi pasar penjaminan syariah di wilayah Jawa Barat sangat besar. Selain itu banyak perbankan syariah atau lembaga keuangan non bank syariah yang meminta untuk bekerjasama dalam hal penjaminan (*kafalah*).

Dari segi biaya dan beban operasional, tidak ada perubahan signifikan dalam Rencana Kerja Perseroan tahun 2018.

Asumsi-asumsi makro yang digunakan dalam penyusunan RKAP 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 diperkirakan dapat mencapai 5,2% s/d 5,6%*;
2. Laju inflasi pada tahun 2018 diperkirakan terkendali pada kisaran 2,5% - 4,5%*;
3. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp 13,300 - Rp 13,500 per dolar Amerika Serikat*;

4. Harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis pertamax diperkirakan sebesar Rp 8,500/liter dan solar DEX diperkirakan sebesar Rp 8,800/liter;
5. Suku bunga SBI 4,5%.

**Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN 2018*

**ASUMSI-ASUMSI MIKRO
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
TAHUN 2018**

No.	Uraian Asumsi	Besaran	Keterangan
1.	Kenaikan Volume Penjaminan	67%	Kredit Produktif rata-rata naik 40% - 60% dan Kredit Non Produktif rata-rata naik 20%
2.	Asumsi Kenaikan Beban Klaim	13.43%	
3.	Komisi Agen/Broker	10% - 17.5%	Kecuali untuk Kredit Cinta Rakyat dan Kredit Mikro Utama
4.	Cadangan Klaim	0.01%	Sesuai POJK No. 02/POJK.05/2017
5.	Management Fee dari Regaransi	5%	Dari IJP porsi Regaransi
6.	Bunga Deposito	6.25% - 7.5%	
7.	Kenaikan Beban Operasional	30.07%	
8.	Kenaikan Beban SDM	22.69%	
9.	Kenaikan Beban Administrasi & Umum	21.47%	
10.	Penambahan Setoran Modal	75 Miliar Rupiah	Dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat

TATA KELOLA PERSEROAN



TATA KELOLA PERSEROAN

Penerapan tata kelola perusahaan di lingkungan PT Jamkrida Jabar pada dasarnya adalah di mulai dengan mengedepankan nilai-nilai etika dan integritas dalam pengelolaan Perseroan secara konsisten yang ditujukan untuk memacu kinerja, meningkatkan kepercayaan mitra, melindungi kepentingan *stakeholders*, serta dapat lebih memberikan kontribusi positif kepada industri keuangan dan perekonomian daerah serta untuk dapat mencapai tujuan sesuai dengan tujuan pendirian PT Jamkrida Jabar yang termuat dalam peraturan daerah.

Perseroan berkomitmen meningkatkan kualitas penerapan tata kelola secara berkelanjutan sesuai standar dan praktik yang berlaku di industri keuangan dengan mengedepankan kekuatan likuiditas, strategi dalam pengelolaan risiko, sumber daya manusia yang unggul dan kompeten, pengelolaan system informasi dan data sebagai elemen kunci menghadapi tantangan persaingan usaha penjaminan, meraih pertumbuhan yang berkelanjutan serta meningkatkan fungsi pelayanan pada mitra-mitra strategis perseroan.

PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

- Bagi PT Jamkrida Jabar, Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) didefinisikan sebagai suatu struktur dan proses system manajemen yang efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya dan risiko serta menjaga kepentingan internal dan eksternal, dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan nilai tambah (*added value*) secara berkelanjutan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lain.

- Penerapan GCG di PT Jamkrida Jabar mengacu pada 5 (lima) prinsip GCG, yaitu: *Transparency* (Transparansi), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Pertanggungjawaban), *Independence* (Indenpendensi), *Fairness* (Kewajaran).
- Tugas pokok, tanggung jawab, dan fungsi organ-organ Perseroan memadai dan ditetapkan dalam Kebijakan, Pedoman dan Tata Tertib yang termuat dalam Board Manual.
- Kebijakan, prosedur dan sistem informasi manajemen Perseroan tersedia dan mendukung kegiatan operasional Perseroan.
- Penyusunan rencana strategis dan bisnis Perseroan dilakukan secara realistis, komprehensif dan terukur sejalan dengan visi dan misi Perseroan yang disetujui Dewan Komisaris dan dikomunikasikan kepada pemegang saham dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

TUJUAN PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Adapun tujuan penerapan GCG di PT Jamkrida Jabar adalah:

- a. mengoptimalkan nilai Lembaga Penjamin bagi Pemangku Kepentingan;
- b. meningkatkan pengelolaan Lembaga Penjamin secara profesional, efektif, dan efisien;
- c. meningkatkan kepatuhan organ Lembaga Penjamin dan jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Lembaga Penjamin terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan;

- d. mewujudkan Lembaga Penjamin yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan
- e. meningkatkan kontribusi Lembaga Penjamin dalam perekonomian nasional.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Sahama (RUPS) merupakan rapat dimana pemegang saham memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam batas yang ditentukan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan RUPS, pemegang saham memiliki hak untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan Perseroan dari Dewan Komisaris dan/atau Direksi sepanjang hal tersebut sejalan dengan kepentingan Perseroan.

Kewenangan RUPS Perseroan antara lain:

- Melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi;
- Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;
- Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;
- Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan;
- Melaksanakan Tata Kelola Perseroan yang baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan, terdapat dua jenis RUPS, yaitu:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan hal-hal yang dibahas diantaranya; persetujuan atas Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, Laporan Keuangan, perubahan susunan anggota Direksi dan dewan Komisaris (jika ada), alokasi laba Perseroan, dan hal lain yang berkaitan dengan Perseroan yang dianggap perlu untuk dibahas dalam RUPS Tahunan.

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) adalah semua Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

RUPS Tahunan 2017

Sepanjang tahun 2017, Perseroan telah melaksanakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dengan agenda pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2016 dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk tahun 2017. Perseroan telah melaksanakan seluruh kegiatan RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi tempat, pemberitahuan, pemanggilan RUPS, pimpinan dan berita acara RUPS berikut ketentuan kuorum, hak suara dan keputusan RUPS.

RUPS Tahunan tahun 2017 telah dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 bertempat di Ruang VIP BMC, Jalan Aceh Nomor 30 Kota Bandung. Jalannya RUPS Tahunan didahului dengan penyampaian Persetujuan atas agenda rapat oleh pemegang saham dan selanjutnya dilakukan pembahasan dan keputusan pada setiap agenda rapat. RUPS Tahunan ditutup dengan pembacaan keputusan akhir atas setiap agenda.

Undangan	Agenda	Keputusan
No: SS-0022/DIRUT/JJ/IV/2017 tanggal 25 April 2017	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris	Para pemegang saham menyetujui dan mengesahkan Laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2016. Dengan adanya pengesahan tersebut, maka para pemegang saham memberikan pembebasan sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan sampai dengan Tahun Buku 2016.
	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan	Para pemegang saham menyetujui semua usulan Direksi terkait dengan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2016.
	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan meliputi: Penetapan Fungsi,	Para pemegang saham menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan catatan khusus untuk

Undangan	Agenda	Keputusan
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perseroan;</p> <p>Penambahan Tugas dan Wewenang Direksi dalam Perseroan;</p> <p>Penambahan Tugas dan Wewenang dalam Perseroan;</p> <p>Pembatasan Periode Jabatan Pengurus Perseroan;</p> <p>Penunjukkan Auditor Eksternal.</p>	<p>jabatan Direksi dan Dewan Komisaris tetap memperhatikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.</p>
	<p>Rencana Pelepasan Sisa Saham Perseroan dalam Simpanan</p>	<p>Para Pemegang Saham menyetujui pelepasan sisa saham Perseroan dalam simpanan dengan syarat tetap memperhatikan mekanisme pelepasan sisa saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.</p>

Undangan	Agenda	Keputusan
	Rencana Pengisian Jabatan Komisaris Independen	Para Pemegang Saham menyetujui pengisian jabatan Komisaris Independen dengan syarat tetap memperhatikan mekanisme pengisian jabatan Komisaris Independen sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

RUPS Luar Biasa Tahun 2017

Sepanjang tahun 2017, Perseroan telah melaksanakan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa dengan agenda pembahasan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun buku 2018, persetujuan atas penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk pemeriksaan tahun buku 2018, persetujuan atas pelepasan aset-aset Perseroan dan perubahan anggaran dasar Perseroan. Perseroan telah melaksanakan seluruh kegiatan RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi tempat, pemberitahuan, pemanggilan RUPS, pimpinan dan berita acara RUPS berikut ketentuan kuorum, hak suara dan keputusan RUPS.

RUPS Luar Biasa tahun 2017 telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 bertempat di Hotel Sabda Alam, Garut. Jalannya RUPS Luar Biasa ketiga ini didahului dengan penyampaian Persetujuan atas agenda rapat oleh pemegang saham dan selanjutnya dilakukan pembahasan dan keputusan pada setiap agenda rapat. RUPS Luar Biasa ketiga ditutup dengan pembacaan keputusan akhir atas setiap agenda.

Undangan	Agenda	Keputusan
No: SS-0034/DIRUT/JJ/XI/2017 tanggal 14 November 2017	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2018	<p>Pemegang saham menyetujui dan mensahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2018 dengan catatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menunda rencana pembelian 4 (empat) unit Kendaraan Bermotor roda empat hingga memperoleh hasil evaluasi kinerja Perseroan pada triwulan pertama; Menyetujui rencana kenaikan gaji pokok pegawai sesuai dengan kenaikan inflasi dan upah minimum provinsi (UMP); Menyetujui usulan kenaikan insentif dengan catatan berdasarkan hasil evaluasi kinerja Perseroan pada setiap triwulan;

Undangan	Agenda	Keputusan
		<p>d. Menyetujui rencana <i>upgrading system</i> dan renovasi dengan tetap memperhatikan skala prioritas;</p> <p>e. Perseroan diharapkan dapat segera mengirimkan surat dan berkonsultasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan Rencana Perluasan Lingkup Wilayah Operasional Penjaminan.</p> <p>f. Diharapkan untuk dapat meningkatkan nilai dari ROA dan ROE.</p>
	Persetujuan atas Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan tahun buku 2017	Pemegang saham menolak kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan tahun buku 2017 yang ditetapkan oleh Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham meminta

Undangan	Agenda	Keputusan
		Perseroan untuk mengkaji ulang terkait dengan penetapan kantor Akuntan Publik.
	Persetujuan atas Usulan pelepasan Aset-Aset Perseroan	Pemegang saham menolak usulan pelepasan aset Perseroan hingga memperoleh hasil evaluasi kinerja Perseroan pada triwulan pertama. Selain itu, pemegang saham meminta agar Perseroan menyiapkan standar operasional prosedur pengadaan dan pelepasan aset Perseroan.
	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab kepada RUPS dan bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan. Dewan Komisaris menjalankan fungsi melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktik *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterapkan Perseroan dan apabila

dipandang perlu, dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

Pengawasan Dewan Komisaris meliputi seluruh aspek bisnis dan aspek korporat dari Perseroan dan tidak hanya terbatas pada tindakan-tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris menurut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Tugas pengawasan Dewan Komisaris tidak boleh dan tidak dapat berubah menjadi tugas pelaksanaan (eksekutif) yang merupakan kewenangan Direksi.

Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif dan independent. Masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama memiliki kedudukan yang setara.

Masa jabatan Komisaris adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak diangkat oleh RUPS sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan, dan dapat diangkat kembali tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Pada akhir tahun 2017, Perseroan tercatat memiliki jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang dengan komposisi keanggotaan Dewan Komisaris terdiri atas 1 (Satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) Anggota Komisaris. Berikut susunan Dewan Komisaris Perseroan:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Uji Kemampuan dan Keputusan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS
Rodhiallah	Komisaris Utama	Pernyataan Keputusan Rapat diluar Rapat Umum Pemegang	KEP-107/NB.1/2014	3 Januari 2017

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Uji Kemampuan dan Kepatutan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS
		Saham Perseroan Terbatas PT Jamkrida Jabar Nomor 01 tanggal 3 Januari 2017		
Syafrial Firdaus	Anggota Komisaris	Pernyataan Keputusan Rapat diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Jamkrida Jabar Nomor 01 tanggal 3 Januari 2017	KEP-619/NB.11/2015	3 Januari 2017

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dalam menjalankan peran dan fungsinya di Perseroan, Dewan Komisaris memiliki acuan dan pedoman kerja yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* dan telah disahkan pada 10 Juli 2013.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* Perseroan, antara lain:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan

Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- b. Melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPS dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
- d. Meneliti dan menelaah Laporan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Apabila Komisaris menolak untuk menandatangani laporan tersebut, maka penolakan beserta alasannya harus dinyatakan secara tertulis.
- e. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan.
- f. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan.
- g. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.

Selama tahun 2017, dalam rangka menjalankan fungsi sebagai pengawas dan penasihat, Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan dan usulan kepada Pemegang Saham, antara lain:

- Laporan keuangan PT Jamkrida Jabar triwulan IV Tahun 2016.
- Telaahan dan persetujuan pengajuan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada PT Jamkrida Jabar untuk dianggarkan pada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun anggaran 2018.
- Laporan hasil pengawasan atas kinerja PT Jamkrida Jabar triwulan I Tahun 2017.

- Laporan hasil pengawasan atas kinerja PT Jamkrida Jabar triwulan II Tahun 2017.
- Telaahan dan persetujuan perubahan RKAP PT Jamkrida Jabar Tahun 2017.
- Laporan hasil pengawasan atas kinerja PT Jamkrida Jabar triwulan III Tahun 2017.
- Telaahan dan persetujuan RKAP Tahun 2018 PT Jamkrida Jabar.

Program Pengenalan untuk Anggota Dewan Komisaris Baru

Program pengenalan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris yang baru sebagaimana diatur dalam *Board Manual*. Program pengenalan merupakan program yang sangat penting mengingat keberagaman latar belakang Anggota Dewan Komisaris. Program pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen. Program pengenalan juga dapat berupa program lain yang disesuaikan dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris.

Program pengenalan untuk anggota Dewan Komisaris yang baru ditunjuk dilakukan oleh Komisaris Utama atau jika Komisaris Utama berhalangan, maka tanggung jawab pelaksanaan program tersebut beralih ke Direktur Utama.

Adapun program pengenalan bagi Dewan Komisaris baru, meliputi:

- a. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh Perseroan;
- b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka Panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;

- c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
- d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dimaksudkan untuk membahas Laporan Hasil Kinerja Perseroan, kegiatan operasional, rencana kerja, dan isu-isu strategis lainnya. Frekuensi pelaksanaan rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2017 adalah sebanyak 10 (sepuluh) kali diuraikan sebagai berikut:

Waktu Pelaksanaan	Kehadiran Dewan Komisaris		Agenda
	Rodhiallah	Syafrial Firdaus	
27 Januari 2017	√	√	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan Desember 2016
30 Maret 2017	√	√	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan Januari – Februari 2017
19 Mei 2017	√	√	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan April 2017
21 Juni 2017	-	√	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan Mei 2017
18 Juli 2017	√	√	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan Juni 2017
29 Agustus 2017	√	√	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan Juli 2017
3 Oktober 2017	√	√	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan Agustus 2017
31 Oktober 2017	√	√	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan September 2017

Waktu Pelaksanaan	Kehadiran Dewan Komisaris		Agenda
	Rodhiallah	Syafrial Firdaus	
23 November 2017	√	-	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan Oktober 2017
29 Desember 2017	√	√	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan November 2017

Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat gabungan dengan Direksi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Dewan Komisaris	Jumlah Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Rodhiallah	10	9	90%
Syafrial Firdaus	10	9	90%
Rata-Rata Kehadiran			90%

Rata-rata tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Pengurus (gabungan dengan Direksi) adalah sebesar 90%.

Keputusan-Keputusan Dewan Komisaris Tahun 2017

Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah mengeluarkan beberapa keputusan dalam bentuk Rekomendasi/Tanggapan/Persetujuan Dewan Komisaris. Keputusan Dewan Komisaris dapat dilihat sebagai berikut:

1. Merekomendasikan Direksi untuk:
 - a. Mengupayakan pemenuhan ketentuan penempatan investasi dalam Surat Berharga Negara (SBN) sesuai ketentuan dan menyiapkan

dokumentasi dan laporannya apabila hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai batas waktu yang ditentukan.

- b. Melakukan kajian terhadap kemungkinan menempatkan investasi dalam bentuk selain deposito yang diizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- c. Menyusun rencana yang terdokumentasi mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh berkaitan dengan rencana beroperasi secara nasional. Dalam hal ini, termasuk antisipasi apabila rencana tersebut jadi dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya.
- d. Menyusun rencana kerja yang lebih jelas dan terukur mengenai penjaminan dan kafalah yang akan dilakukan dalam triwulan II, III, dan IV tahun 2017 untuk lebih memfokuskan sumber daya yang dimiliki kepada pelayanan terhadap segmen-segmen dan target-target pasar penjaminan yang ingin disasar oleh Perusahaan.
- e. Menyusun usulan revisi RKAP tahun 2017 sebagai antisipasi terhadap perbedaan asumsi yang dipakai dalam RKAP tahun 2017 dengan ketentuan-ketentuan POJK mengenai pengakuan IJP dan cadangan klaim.
- f. Memberikan perhatian lebih pada upaya mendapatkan dan meningkatkan transaksi penjaminan dengan perbankan di luar PT Bank Jabar Banten dalam bentuk rencana jelas dan terukur, antara lain Perusahaan misalnya lebih agresif mengupayakan pemasaran ke bank-bank buku 1, 2, dan 3 dengan *outstanding* kreditnya lebih sebanding dengan kemampuan penjaminan Perusahaan. Upaya tersebut paling tidak segera dilakukan dengan bank-bank berkantor pusat di Jawa Barat tanpa mengabaikan yang berkantor pusat di luar Jawa Barat.

- g. Mengupayakan peningkatan kolektabilitas Piutang subrogasi dengan beekerjasama dengan pihak Penerima Jaminan.
- h. Meningkatkan volume penjaminan Unit Usaha Syariah dengan melakukan langkah-langkah yang lebih terencana dan terukur. Salah satunya dengan mengintensifkan komunikasi dengan PT Bank Syariah Mandiri (BSM).
- i. Sehubungan dengan tidak tercapainya volume penjaminan yang disebabkan terhentinya produksi beberapa skema penjaminan dengan PT Bank Jabar Banten dan masih dalam proses perpanjangan Perjanjian Kerja Sama, agar diupayakan suatu mekanisme yang efektif agar Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang sesuai target yang telah ditetapkan.
- j. Meningkatkan dan mengupayakan produksi yang sifatnya jangka pendek (short term), disamping terus mengupayakan produksi yang sifatnya jangka Panjang (long term). Hal ini untuk mengantisipasi pendapatan IJP yang dihitung secara *accrual*.
- k. Memonitor secara berkelanjutan tingkat rasio klaim sebagai salah satu langkah penerapan Manajemen Risiko terhadap Penjaminan yang dilakukan oleh Perusahaan.
- l. Mempercepat pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi yang terintegrasi untuk semua unit kerja.
- m. Melaksanakan kegiatan penjaminan yang berkehati-hatian dengan selalu mengevaluasi dan menyempurnakan sistem manajemen risiko yang baik termasuk menyempurnakan *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk setiap produk yang dipasarkan.

- n. Menjaga ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya, peraturan di bidang penjaminan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - o. Menjaga integritas dalam setiap tindakan sejalan dengan pakta integritas yang sudah ditandatangani.
 - p. Mengupayakan efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan dalam pelaksanaan setiap kegiatan Perusahaan.
 - q. Membangun kerjasama yang baik diantara Direksi dan Karyawan.
2. Menyetujui usulan-usulan dari Direksi terkait dengan rencana penambahan modal disetor kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui APBD Tahun 2018 sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah).
 3. Menyetujui Rencana Keuangan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 yang telah disusun oleh Direksi PT Jamkrida Jabar.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Program Pelatihan dan pengembangan Kompetensi menjadi salah satu program penting bagi anggota Dewan Komisaris. Dengan program ini Anggota Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perseroan dan pengetahuan-pengetahuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Selama tahun 2017 Dewan Komisaris telah mengikuti 1 kegiatan yaitu program Sertifikasi CRGP + Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko pada bulan November 2017.

Hubungan Kerja Dewan Komisaris dengan Direksi

Secara umum, hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi diarahkan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sebagai organ Perseroan. Direksi bertugas menjalankan kegiatan operasional Perseroan dan Dewan Komisaris bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Direksi tersebut. Namun demikian, hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi harus mengikuti prinsip-prinsip:

1. Dalam rangka menjaga independensi masing-masing organ Perseroan, setiap hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi dalam rangka tugas dan tanggung jawab masing-masing merupakan hubungan yang bersifat formal, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hubungan yang bersifat informal dapat saja dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Dewan Komisaris harus menghormati fungsi dan peranan Direksi dalam mengelola Perseroan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Anggota Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri maupun kolegal dapat memperoleh akses informasi yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan.
4. Dewan Komisaris bersama-sama Direksi Perseroan secara periodik melakukan rapat koordinasi untuk membahas berbagai permasalahan yang menyangkut Perseroan. Dalam rapat koordinasi tersebut, Komisaris Utama atau Direktur Utama berperan sebagai pimpinan rapat. Dalam hal Komisaris Utama atau Direktur Utama berhalangan

hadir, maka yang bersangkutan dapat menunjuk Anggota Dewan Komisaris lainnya sebagai orang yang mewakilinya.

5. Keputusan rapat koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi merupakan sesuatu yang mengikat bagi semua Direksi dan Komisaris.
6. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan kelembagaan dalam arti bahwa Dewan Komisaris merupakan jabatan kolektif yang mempresentasikan keseluruhan anggota Dewan Komisaris lainnya sehingga setiap hubungan kerja antara seorang Anggota Dewan Komisaris dengan salah satu atau beberapa orang Direksi harus diketahui oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap manajemen Perseroan dalam kaitannya dengan implemementasi sistem dan produk-produk Unit Usaha Syariah agar tetap sesuai dengan Prinsip Syariah. Seperti halnya Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah juga melakukan pemantauan terhadap efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterapkan Perseroan yang diterapkan pada Unit Usaha Syariah Perseroan dan apabila dipandang perlu, dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan Unit Usaha Syariah Perseroan.

Kedudukan Dewan Pengawas Syariah

Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dilindungi oleh Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 109 terkait dengan posisi Dewan Pengawas pada Perseroan. Secara struktur

organisasi, kedudukan Dewan Pengawas Syariah berada dalam koordinasi 2 (dua) struktur organisasi, yaitu:

1. Perusahaan. Dalam struktur organisasi perusahaan, kedudukan Dewan Pengawas Syariah sejajar dengan Dewan Komisaris yang memiliki alur koordinasi dengan Direksi.
2. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam struktur organisasi DSN-MUI, Dewan Pengawas Syariah juga berada dibawah DSN-MUI yang bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN-MUI pada Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada DSN-MUI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Sama halnya dengan komposisi Dewan Komisaris, komposisi Dewan Pengawas Syariah ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif dan independent. Masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah termasuk Ketua Dewan Pengawas Syariah memiliki kedudukan yang setara.

Pada akhir tahun 2017, Perseroan tercatat memiliki jumlah anggota Dewan Dewan Pengawas Syariah sebanyak 2 (dua) orang dengan komposisi keanggotaan Dewan Pengawas Syariah terdiri atas 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah dan 1 (satu) Anggota Dewan Pengawas Syariah. Berikut susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Uji Kemampuan dan Kepatutan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS
Zaini Abdul Malik	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Akta RUPS LB No. 38 tanggal 28 November 2014	KEP-488/NB.1/2015	28 November 2014
Khozin Abu Faqih	Dewan Pengawas Syariah	Akta RUPS LB No. 38 tanggal 28 November 2014	KEP-488/NB.1/2015	28 November 2014

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

Sebagaimana yang dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah, diantaranya:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan usaha Unit Usaha Syariah Perseroan agar sesuai dengan prinsip Syariah.
2. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Unit Usaha Syariah Perseroan.
3. Mengawasi perkembangan produk baru Perseroan.
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Perseroan yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip Syariah terhadap mekanisme kegiatan usaha Perseroan.
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerja Perseroan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Hak Dewan Pengawas Syariah

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas Syariah memperoleh hak sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi dari Direksi mengenai Unit Usaha Syariah milik Perseroan secara lengkap dan tepat waktu.
2. Memperoleh penjelasan atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah.

Rapat gabungan Dewan Pengawas Syariah dan Direksi

Rapat gabungan Dewan Pengawas Syariah dan Direksi dimaksudkan untuk membahas Laporan Hasil Kinerja Unit Usaha Syariah, kegiatan operasional, rencana kerja, dan isu-isu strategis lainnya. Frekuensi pelaksanaan rapat Gabungan Dewan Pengawas Syariah dan Direksi sepanjang tahun 2017 adalah sebanyak 1 kali diuraikan sebagai berikut:

Waktu Pelaksanaan	Kehadiran Dewan Pengawas Syariah		Agenda
	Zaini Abdul Malik	Khozin Abu Faqih	
29 Desember 2017	√	√	Evaluasi Kinerja Unit Usaha Syariah

Tingkat kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah dalam rapat gabungan dengan Direksi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Dewan Pengawas Syariah	Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah dengan Direksi	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Zaini Abdul Malik	1	1	100%
Khozin Abu Faqih	1	1	100%
Rata-Rata Kehadiran			100%

Rata-rata tingkat kehadiran Dewan Pengawas Syariah dalam Rapat Unit Usaha Syariah (gabungan dengan Direksi) adalah sebesar 100%.

Keputusan-keputusan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2017

Selama tahun 2017, Dewan Pengawas Syariah telah mengeluarkan beberapa keputusan dalam bentuk Rekomendasi/Tanggapan/Persetujuan Dewan Pengawas Syariah. Keputusan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pedoman Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Jamkrida Jabar.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah

Program Pelatihan dan pengembangan Kompetensi menjadi salah satu program penting bagi anggota Dewan Pengawas Syariah. Dengan program ini Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat selalu memperbaharui

informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perseroan dan pengetahuan-pengetahuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah.

Selama tahun 2017 Dewan Pengawas Syariah telah mengikuti 1 kegiatan yaitu *Workshop Annual Meeting* Dewan Pengawas Syariah pada bulan Oktober 2017.

DIREKSI

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi untuk kepentingan Perseroan, mengelola bisnis dan urusan Perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perseroan. Direksi bertindak secara cermat, berhati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi menggunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan Perseroan semata.

Komposisi dan Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak diangkat oleh RUPS sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan, dan dapat diangkat kembali tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Pada akhir tahun 2017, Perseroan tercatat memiliki jumlah anggota Direksi sebanyak 3 (tiga) orang dengan komposisi keanggotaan Direksi terdiri atas 1 (satu) Direktur Utama, 1 (satu) Direktur Keuangan dan 1 (satu) orang Direktur Operasional. Berikut susunan Direksi Perseroan:

Nama	Jabatan	Pendidikan Formal Terakhir	Uji Kemampuan dan Kematangan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS
Tri Budhi Muljawan	Direktur Utama	S1	KEP-2333/NB.1/2014	3 Januari 2017
Budi Setyono	Direktur Keuangan	S2	KEP-2334/NB.1/2014	3 Januari 2017
Asep Gunawan Sirad	Direktur Operasional	S1	KEP-111/NB.1/2014	3 Januari 2017

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam menjalankan peran dan fungsinya di Perseroan, Dewan Komisaris memiliki acuan dan pedoman kerja yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* dan telah disahkan pada 10 Juli 2013.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi secara kolegal sebagaimana dituangkan dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* Perseroan, antara lain:

- a. Tugas pokok Direksi adalah:
 - Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
- b. Direksi bertanggung jawab penuh melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

- c. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus menginformasikan atau mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, diantaranya:
 - Setiap perubahan penyertaan saham Perseroan pada perusahaan lain baik berupa pengalihan saham, pengurangan saham, maupun peningkatan saham. Direksi harus mendapatkan persetujuan Komisaris Utama dan salah satu anggota Komisaris. Atau apabila Komisaris Utama berhalangan, maka untuk tindakan tersebut Direksi harus mendapatkan persetujuan dari 2 (dua) orang anggota Komisaris Perseroan.
 - Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan utang seluruh atau sebagian harta kekayaan Perseroan dalam 1(satu) tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan atau sama satu dengan yang lain harus mendapatkan persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
 - Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan di atas, wajib pula diumumkan dalam (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.

- e. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama tersebut telah disetujui dalam Rapat Direksi. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- f. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggungjawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam Surat Kuasa.

Di samping memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang secara kolegal, dalam rangka menjaga kejelasan peran dan fungsi Direksi, serta menerapkan prinsip akuntabilitas, maka Direksi melakukan pembagian tugas masing-masing anggota Direksi dengan pembagian sebagai berikut:

a. Direktur Utama

Direktur Utama bertugas memimpin dan mengurus Perseroan sebagai pemegang tanggung jawab tertinggi dalam pelaksanaan operasional Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan, meliputi:

- Penetapan visi, misi dan rencana strategis Perseroan;
- Penetapan kebijakan Perseroan;
- Peningkatan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
- Penguasaan, pemeliharaan dan pengumuman kekayaan Perseroan;
- Peningkatan daya saing Perseroan;
- Perincian tugas Direksi, termasuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan, dengan pembatasan yang tertera dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- Menetapkan wakil/kuasanya dengan menggunakan Surat Kuasa, atau Surat Penunjukkan kepada Direktur lain;

- Penetapan Peraturan Kepegawaian;
- Penerapan pengangkatan dan pemberhentian karyawan;
- Menyusun laporan Pertanggungjawaban Kinerja Perseroan;
- Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas anggota Direksi Perseroan.

b. Direktur Keuangan

Direktur Keuangan bertugas membina fungsi bidang Keuangan dan Akuntansi, SDM dan Umum, Manajemen Risiko dan Klaim, meliputi:

- Penyusunan program perusahaan investasi Perseroan;
- Evaluasi program pengembangan;
- Pengolahan/analisa data yang meliputi studi kelayakan dan kajian-kajian lainnya;
- Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan dan akuntansi;
- Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan keuangan dan penyusunan laporan keuangan/akuntansi Perseroan;
- Melakukan perencanaan dan pengembangan strategi keuangan Perseroan termasuk pendanaan dan/atau penyertaan pada proyek;
- Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum;
- Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan urusan sumber daya manusia;
- Mengadakan pengikatan pengadaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan operasional Perseroan dengan pihak penyedia barang dan/atau jasa;
- Bersama-sama dengan salah satu anggota Direksi yang lain, mewakili Perseroan untuk dan atas nama Perseroan mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan.
- Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan fungsi pengelolaan risiko Perseroan.

c. Direktur Operasional

Direktur Operasional bertugas membina fungsi operasional yang meliputi:

- Menetapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan yang berkaitan dengan operasional Perseroan;
- Menetapkan kebijakan sistem dan prosedur, SOP sesuai dengan operasional Perseroan;
- Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pemasaran Perseroan agar target Perseroan dapat tercapai dengan baik;
- Menetapkan penyusunan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan pihak lain terkait pelaksanaan penjaminan;
- Menetapkan penyusunan Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit dengan pihak Penerima Jaminan;
- Menetapkan kebijakan-kebijakan di bidang Penjaminan Kredit;
- Membina dan mengarahkan Divisi penjaminan agar dalam menjalankan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- Bersinergi dengan jajaran Direksi yang lain untuk menetapkan target ataupun tujuan Perseroan;
- Membina dan mengarahkan Divisi Hukum dan Pengendalian agar dalam menjalankan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Program Pengenalan bagi Direksi

Perseroan menetapkan program Pengenalan bagi Direksi yang baru menjabat dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada Direksi baru terkait organisasi, aktivitas bisnis, rencana Perseroan ke depan, termasuk panduan kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab Direksi.

Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya telah diberikan Program Pengenalan Perseroan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Prinsip-prinsip dan implementasi *Good Corporate Governance*.
- b. Gambaran Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka Panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.
- c. Penjelasan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, system dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.
- d. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- e. Berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan.

Selain diberikan saat pertama kali diangkat sebagai Direksi Perseroan, Perseroan akan secara berkala mengadakan program pengembangan diri bagi Direksi dengan agenda dan materi sesuai kebutuhan Direksi.

Rapat Direksi

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi dan setiap Direktur yang hadir dan/atau diwakili berhak memberikan suaranya dalam rapat tersebut. Rapat Direksi diselenggarakan untuk membuat berbagai keputusan bisnis, mengevaluasi kinerja Perseroan dan menetapkan berbagai kebijakan dalam pengurusan Perseroan.

Mengacu kepada *Board Manual*, Direksi wajib melakukan pertemuan/rapat minimal 1 (satu) kali dalam sebulan. Keputusan Direksi dapat diambil

melalui Rapat Direksi maupun diluar Rapat Direksi sepanjang seluruh Direksi menyetujui cara dan materi yang diputuskan.

Pada tahun 2017, Rapat Direksi dilakukan minimal 1 bulan sekali guna membicarakan hal-hal strategis dan operasional. Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan sebanyak 10 kali, Rapat Direksi dengan Dewan Pengawas Syariah dilakukan sebanyak 1 kali dan Rapat Direksi dengan Manajemen dilakukan sebanyak 11 kali.

Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

Pada tahun 2017, Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan Dewan Komisaris sebanyak 10 kali dimana membahas evaluasi kinerja Perseroan, rencana kerja dan isu-isu strategis lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Waktu Pelaksanaan	Kehadiran Direksi			Agenda
	Tri Budhi Muljawan	Budi Setyono	Asep Gunawan Sirad	
27 Januari 2017	√	√	√	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan Desember 2016
30 Maret 2017	√	√	-	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan Januari - Februari 2017
19 Mei 2017	√	√	-	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan April 2017
21 Juni 2017	√	√	√	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan Mei 2017
18 Juli 2017	√	√	√	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan Juni 2017

Waktu Pelaksanaan	Kehadiran Direksi			Agenda
	Tri Budhi Muljawan	Budi Setyono	Asep Gunawan Sirad	
18 Juli 2017	√	√	√	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan Juni 2017
29 Agustus 2017	√	√	√	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan Juli 2017
3 Oktober 2017	√	√	√	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan Agustus 2017
31 Oktober 2017	√	√	√	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan September 2017
23 November 2017	√	√	√	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan Oktober 2017
29 Desember 2017	√	√	-	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan November 2017

Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat gabungan dengan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Direksi	Jumlah Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Tri Budhi Muljawan	10	10	100%
Budi Setyono	10	10	100%
Asep Gunawan Sirad	10	7	70%
Rata-Rata Kehadiran			90%

Rata-rata tingkat kehadiran Direksi dalam Rapat Pengurus (gabungan dengan Dewan Komisaris) adalah sebesar 90%.

Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Pengawas Syariah

Pada tahun 2017, Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan Dewan Pengawas Syariah sebanyak 1 kali dimana membahas evaluasi kinerja Perseroan, rencana kerja dan isu-isu strategis lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Waktu Pelaksanaan	Kehadiran Direksi			Agenda
	Tri Budhi Muljawan	Budi Setyono	Asep Gunawan Sirad	
19 Desember 2017	√	√	√	Evaluasi Kinerja Unit Usaha Syariah

Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat gabungan dengan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Direksi	Jumlah Rapat Direksi dengan Dewan Pengawas Syariah	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Tri Budhi Muljawan	1	1	100%
Budi Setyono	1	1	100%
Asep Gunawan Sirad	1	1	100%
Rata-Rata Kehadiran			100%

Rata-rata tingkat kehadiran Direksi dalam Rapat Unit Usaha Syariah (gabungan dengan Dewan Pengawas Syariah) adalah sebesar 100%.

Rapat Gabungan Direksi dengan Manajemen

Pada tahun 2017, Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan Manajemen sebanyak 11 kali dimana membahas evaluasi kinerja Perseroan, rencana kerja dan isu-isu strategis lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Waktu Pelaksanaan	Kehadiran Direksi			Agenda
	Tri Budhi Muljawan	Budi Setyono	Asep Gunawan Sirad	
13 Januari 2017	√	√	√	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan Desember 2016
22 Februari 2017	√	√	√	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan Januari 2017
22 Maret 2017	√	-	√	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan Februari 2017
17 Mei 2017	√	-	√	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan April 2017
15 Juni 2017	√	√	√	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan Mei 2017
25 Juli 2017	√	√	√	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan Juni 2017
22 Agustus 2017	√	√	√	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan Juli 2017
20 September 2017	√	√	√	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan Agustus 2017
30 Oktober 2017	√	√	√	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan September 2017

Waktu Pelaksanaan	Kehadiran Direksi			Agenda
	Tri Budhi Muljawan	Budi Setyono	Asep Gunawan Sirad	
17 November 2017	√	-	-	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan Oktober 2017
20 Desember 2017	√	√	√	Evaluasi Kinerja Perseroan Bulan November 2017

Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat gabungan dengan Manajemen dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Direksi	Jumlah Rapat Direksi dengan Manajemen	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Tri Budhi Muljawan	11	11	100%
Budi Setyono	11	8	73%
Asep Gunawan Sirad	11	10	91%
Rata-Rata Kehadiran			88%

Rata-rata tingkat kehadiran Direksi dalam Rapat Manajemen (gabungan dengan Manajemen) adalah sebesar 88%.

Keputusan-keputusan Direksi Tahun 2017

Selama tahun 2017, Direksi telah mengeluarkan 46 (empat puluh enam) Surat Keputusan Direksi. Beberapa Keputusan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal tambahan pada PT Jamkrida Jabar tahun 2017 sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada PT Jamkrida Jabar dan dimohonkan untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah Perubahan tahun 2017.
3. Mengajukan permohonan telaahan dan persetujuan Dewan Komisaris terkait pengajuan tambahan penyertaan modal PT Jamkrida Jabar.
4. Mengajukan permohonan tambahan penyertaan modal PT Jamkrida Jabar kepada Pemegang saham.
5. Mengajukan permohonan telaahan dan persetujuan perubahan RKAP tahun 2017 kepada Dewan Komisaris.
6. Mengusulkan perubahan RKAP tahun anggaran 2017 kepada Pemegang Saham.
7. Mengajukan permohonan telaahan dan persetujuan perubahan RKAP tahun 2017 kepada Dewan Komisaris.
8. Mengajukan permohonan telaahan dan persetujuan RKAP 2018 kepada Dewan Komisaris.
9. Mengajukan permohonan telaahan dan persetujuan atas usulan penggunaan dan penetapan kantor Akuntan Publik (KAP) untuk pemeriksaan tahun buku 2017 kepada Dewan Komisaris.
10. Perubahan ketiga atas Keputusan Direksi Nomor 11/JJ/Kep-Dir/II/2013 tentang manajemen kas dan investasi.
11. Struktur organisasi.
12. Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 14/JJ/KEP-DIR/II/2013 tentang izin dan cuti karyawan.

13. Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor KEP-28/DIR/JJ/VI/2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Karyawan PT Jamkrida Jabar.
14. Wewenang memutuskan penjaminan dan menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) serta Sertifikat Penjaminan (SP).
15. Wewenang memutuskan kafalah dan menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Kafalah (SP2K) serta Sertifikat Kafalah (SK).
16. Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor KEP-004/DIR/JJ/II/2017 tentang Struktur Organisasi.
17. Staf garda depan (frontliner).
18. Fasilitas pinjaman bagi pegawai.
19. Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor KEP-0010/DIR/JJ/IV/2014 tentang wewenang penandatanganan surat.
20. Perubahan ketiga atas Keputusan Direksi Nomor KEP-0006/DIR/JJ/II/2015 tentang manual sistem akuntansi.
21. Penugasan pejabat pelayanan pengaduan.

Program Pendalaman dan Pengembangan Keahlian

Program Pendalaman dan Pengembangan Keahlian diberikan kepada Direksi untuk dapat mengikuti perkembangan terbaru tentang *core business* Perseroan demi keberlangsungan dan kemajuan Perseroan. Adapun selama tahun 2017, Direksi mengikuti beberapa kegiatan pelatihan dan pengembangan diantaranya:

Agenda	Waktu	Keterangan
Seminar Internasional OJK: Changing Consumer Behavior Through Financial Literacy, Financial Inclusion, and Consumer Protection	Mei 2017	Direktur Utama

Agenda	Waktu	Keterangan
Workshop Current Issues In Enterprise Risk Management	Mei 2017	Direktur Utama dan Direktur Operasional
Workshop Forensic Accounting vs Investigative Audit	September 2017	Direktur Keuangan

Hubungan Kerja Direksi dengan Dewan Komisaris

Mengacu kepada *Board Manual*, dalam melakukan hubungan kerja dengan Dewan Komisaris, Direksi harus mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dalam rangka menjaga independensi masing-masing organ Perseroan, setiap hubungan Direksi dengan Dewan Komisaris dalam rangka tugas dan tanggung jawab masing-masing di dalam pengelolaan Perseroan merupakan hubungan yang bersifat formal dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hubungan yang bersifat informal dapat saja dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan Komisaris dalam pengawasan Perseroan sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Berbagai hal yang menyangkut hubungan kerja sehari-hari antara Direksi dengan Dewan Komisaris, yang belum diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, Panduan *Good Corporate Governance* serta *Board Manual* akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan Bersama antara Direksi dan Komisaris dengan dilandasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
3. Direksi akan memberikan informasi secara lengkap kepada Dewan Komisaris sesuai kebutuhan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Perseroan menyadari pentingnya peranan Sekretaris Perusahaan dalam memperlancar hubungan antar Organ Perseroan, hubungan antara Perseroan dengan *stakeholders* serta dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Perusahaan adalah organ Perseroan tingkat badan yang merupakan manajemen pimpinan perusahaan dan mempunyai fungsi utama dalam penanganan fungsi sekretariat perusahaan, hubungan kemasyarakatan, *corporate lawyer*, penegakan terhadap kepatuhan dan penegakkan *Good Corporate Governance*, tanggung jawab sosial Perseroan terhadap *stakeholders*, dan bina lingkungan dalam rangka menjaga citra Perseroan ke dalam dan ke luar Perseroan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris Perusahaan dibantu oleh 4 (empat) orang staf yang terdiri dari Senior Staf IT, Sekretaris, Staf Perencanaan Perusahaan dan Staf IT.

Hubungan Sekretaris Perusahaan dengan Perseroan

Dalam hubungannya dengan Perseroan, Sekretaris Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sekretaris Perusahaan diangkat dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan harus memiliki kualifikasi akademis dan profesional yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dijalankan oleh seorang anggota Direksi Perseroan.
2. Penjabaran tugas Sekretaris Perusahaan dalam menjalankan fungsi-fungsi penanganan sekretariat Perusahaan, hubungan kemasyarakatan,

corporate lawyer, penegakan terhadap kepatuhan dan penegakkan *Good Corporate Governance*, tanggung jawab sosial Perseroan terhadap *stakeholders*, dan bina lingkungan tersebut akan diatur dengan Keputusan Direksi.

3. Sekretaris Perusahaan harus memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku, Sekretaris Perusahaan wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan tuangnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Dewan Komisaris apabila diminta oleh Dewan Komisaris.

Pengembangan Keahlian Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan melakukan kegiatan pengembangan keahlian untuk mengoptimalkan dan menjaga kualitas kerja. Program pengembangan keahlian juga diberikan kepada staf dibawah Sekretaris Perusahaan.

Program pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Sekretaris Perusahaan dan staf-nya selama tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Kegiatan	Waktu	Pelaksana	Peserta
Training <i>Good Corporate Governance</i>	Maret	PT Expertindo Training and Consulting	Sekretaris Perusahaan
Seminar Nasional IKADIN: "Pertanggung Jawaban Hukum Para Pimpinan dan Pengurus Korporasi (Swasta-BUMN/BUMD) dalam Tindak Pidana Umum dan Korupsi"	April	IKADIN Cab. Surabaya	Sekretaris Perusahaan
<i>Compliance Integrity Leadership Program (CLEAR)</i>	April	Transparansi Indonesia dan UNPAD	Sekretaris Perusahaan

Kegiatan	Waktu	Pelaksana	Peserta
Pelatihan Bisnis Bersih Tanpa Korupsi	April	Transparansi Indonesia dan UNPAD	Sekretaris Perusahaan
Sosialisasi & Pelatihan OJK: Penguatan <i>Governance</i> Untuk OJK Yang Terpercaya	Mei	OJK Wil. II Bandung	Sekretaris Perusahaan
Pembentukan Komite Advokasi Daerah Antikorupsi Provinsi Jawa Barat	September	KPK	Sekretaris Perusahaan
Diklat <i>Linux Fundamental Administration</i>	November	Be:logix Training and Solution Provider	Staf Senior IT
Sosialisasi Layanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sektor Jasa Keuangan	Desember	OJK Wil. II Bandung	Sekretaris Perusahaan

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)

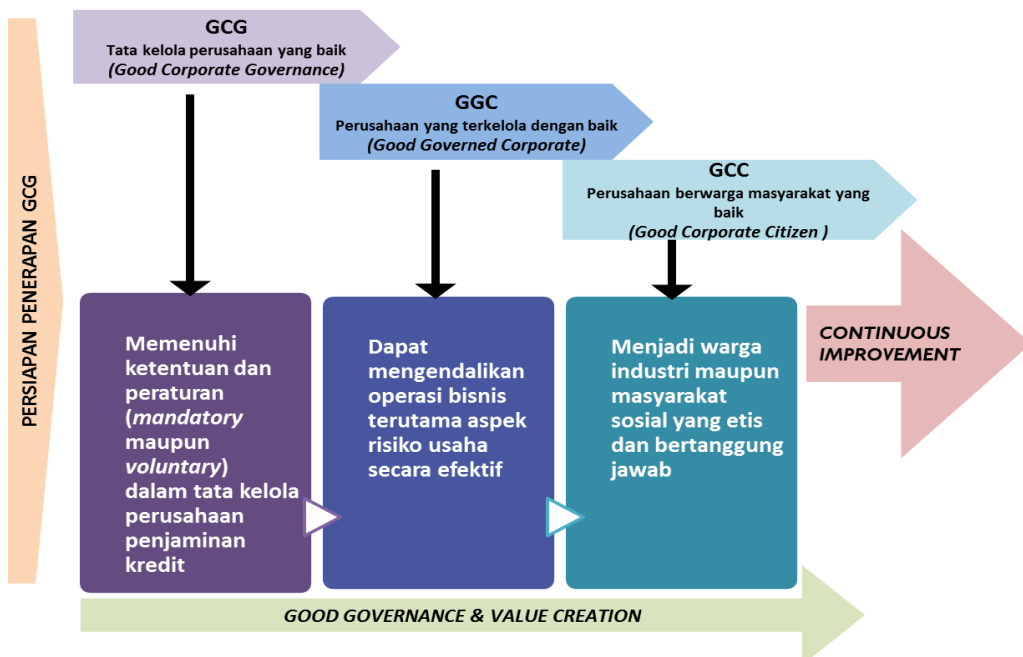
Satuan Pengawasan Internal (SPI) dibentuk atas dasar kebutuhan dalam melakukan perencanaan, pengendalian, koordinasi dalam pengawasan, penilaian atas sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaan seluruh kegiatan Perseroan serta memberikan saran-saran perbaikan. Seperti halnya, Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Program Peningkatan Kompetensi

Program peningkatan kompetensi dilakukan untuk lebih meningkatkan kompetensi Satuan Pengawasan Internal (SPI). Selama tahun 2017, Satuan Pengawasan Internal (SP) telah mengikuti beberapa program peningkatan kompetensi, diantaranya:

Kegiatan	Waktu	Pelaksana
<i>Sharing Session</i> Pendalaman Tugas & Fungsi SPI	Januari	Tirta Jabar
Seminar Peran SPI Sebagai Mitra Strategis Manajemen di Lingkungan BUMD	April	FK SPI Jabar & Banten
<i>Workshop</i> Manajemen Risiko Perpajakan & <i>Tax Planning</i> Pasca <i>Tax Amnesty</i>	Agustus	IAI Jabar
<i>Workshop Forensic Accounting Vs Investigative Audit</i>	September	IAI Yogyakarta

ROAD MAP GOOD CORPORATE GOVERNANCE



PEDOMAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

1. *Code of Corporate Governance*

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) merupakan acuan utama bagi seluruh organ Perseroan dalam menerapkan praktek *good corporate governance* (GCG).

Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini disusun bagi pemegang saham, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan segenap karyawan perseroan serta pemangku kepentingan lainnya dalam berhubungan dengan perseroan.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini juga merupakan acuan bagi penyusunan peraturan-peraturan perseroan yang lebih khusus sesuai kebutuhan unit-unit organisasi dalam jajaran Perseroan.

2. *Code of Conduct*

Etika usaha dan Etika bekerja (*Code of Conduct*) ini disusun untuk dijadikan sebagai acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan seluruh jajaran karyawan sebagai insan Jamkrida dalam mengelola Perseroan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Perseroan.

- a. Mengidentifikasi nilai-nilai dan standar etika yang selaras dengan visi, misi Perseroan.
- b. Menjabarkan Etika Usaha dan Etika Bekerja sebagai landasan etika moral yang harus diikuti oleh insan Jamkrida.
- c. Menjadi acuan perilaku bagi seluruh insan Jamkrida dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing masing dan berinteraksi dengan *stakeholder* Perseroan.

- d. Menjelaskan secara rinci Standar Etika Usaha dan Etika Bekerja agar insan Jamkrida dapat menilai bentuk kegiatan yang diinginkan dan membantu memberikan pertimbangan jika menemui keraguan dalam mengaplikasikan strategi Perseroan.

3. Board Manual

Board Manual adalah Panduan Pengelolaan Perseroan bagi Dewan Komisaris dan Direksi berupa dokumen yang menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban baik selaku Dewan (*Board*) maupun individu, tata hubungan diantara Dewan Komisaris dan Direksi, serta Pemegang Saham.

Pelaksanaan *Board Manual* ini memerlukan komitmen bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka mengelola Perseroan untuk kepentingan Pemegang Saham dan *Stakeholders* pada umumnya. Dengan adanya kejelasan mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing, diharapkan akan mendorong efektivitas dan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi guna kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.

Board Manual ini tidaklah bersifat statis, namun dapat dikembangkan atau diubah sesuai kondisi Perseroan dan setiap perubahan-perubahannya haruslah didasarkan pada kesepakatan antara Dewan Komisaris dan Direksi.

4. Keterbukaan Informasi Publik

Pedoman Keterbukaan Informasi Publik ini dimaksudkan untuk mengatur pengklasifikasian dan pengungkapan informasi yang mengatur mekanisme dalam pengungkapan informasi secara internal maupun eksternal sesuai

dengan kepentingan Perseroan serta pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Perseroan.

Adapun tujuan Pedoman Keterbukaan Informasi Publik ini, diantaranya:

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan perusahaan;
2. Meningkatkan peran aktif publik dalam pengambilan kebijakan perusahaan dan pengelolaan perusahaan yang baik;
3. Mewujudkan Insan Jamkrida Jabar yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
4. Mengetahui alasan kebijakan perusahaan yang memengaruhi hajat hidup Orang banyak;
5. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan perusahaan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

5. *Whistleblowing System*

Maksud penyusunan Pedoman Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing system*) sebagai pedoman pelaksanaan dalam menangani Pelaporan Pelanggaran dari stakeholders untuk menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelaporan pelanggaran yang efektif dan memadai.

Tujuan dari penyusunan Pedoman Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran adalah:

1. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjadi sarana bagi *stakeholders* dan Insan Jamkrida Jabar untuk melaporkan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan, baik finansial maupun non finansial yang dapat merusak citra dan keberlangsungan usaha perusahaan;

2. Memberikan kesempatan kepada *stakeholders* dan Insan Jamkrida Jabar dalam menyampaikan laporan pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Mendukung terwujudnya budaya keterbukaan, akuntabilitas dan integritas;
4. Meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan yang baik, pengendalian internal, kinerja Insan Jamkrida Jabar serta Perseroan.

6. *Committee Audit Charter*

Piagam Komite Audit adalah piagam yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Piagam Komite Audit ini disusun atas dasar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya dan/atau ketidaksesuaian pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;

- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

7. Internal Audit Charter

Internal Audit Charter adalah sebuah pernyataan formal tertulis, yang menjadi dasar pengakuan keberadaan dan berfungsinya Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan pengendalian.

Internal Audit Charter PT Jamkrida Jabar mengatur visi dan misi SPI, kedudukan, wewenang, tugas dan tanggung jawab, ruang lingkup aktivitas, independensi, akuntabilitas, integritas, pola hubungan, kode etik dan standar profesi.

HASIL *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Self Assessment Good Corporate Governance merupakan suatu metode dimana melibatkan insan Jamkrida dalam melakukan penilaian atas penerapan *Good Corporate Governance* di Perseroan. Maksud dan tujuan dari *self assessment* ini adalah agar dapat memperoleh hasil yang lebih sesuai dengan kondisi Perseroan karena penilaian melibatkan setiap individu secara langsung.

Self Assessment Good Corporate Governance ini dilakukan dengan mengisi kertas kerja *self assessment good corporate governance* dimana berisi faktor-faktor penilaian yang kemudian akan dikonversi kedalam indikator penilaian dan dilanjutkan dengan interpretasi dari nilai tersebut. Adapun indikator penilaian adalah sebagai berikut:

Nilai	Rangking	Predikat
84 - 100	1	Sangat Baik
68 - 83	2	Baik
52 - 67	3	Cukup Baik
36 - 51	4	Kurang Baik
20 - 35	5	Tidak Baik

Berdasarkan hasil kertas kerja *self assessment good corporate governance* terkait dengan kondisi Perseroan hingga posisi akhir 31 Desember 2017, dapat disampaikan kesimpulan umum bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Perseroan sudah sesuai dengan kriteria/indikator *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Penjaminan dengan memperoleh nilai sebesar 77 dimana masuk dalam kategori Baik.

Hasil kertas kerja *self assessment good corporate governance* juga menunjukkan bahwa penerapan *good corporate governance* sudah sesuai

baik dari sisi konvensional maupun Syariah dengan memperoleh nilai yang sama dengan penilaian secara konsolidasi.

Adapun kriteria/indikator *self assessment good corporate governance* diantaranya:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas:
 - a) Komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau
 - b) Fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten, dalam memantau dan memastikan efektivitas system pengendalian internal.
- c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal.
- d. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan tata kelola teknologi informasi.
- e. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.
- f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin.
- g. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.
- h. Pengungkapan kepemilikan saham.
- i. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota Dewan Pengawas lain, dan/atau pemegang saham Lembaga

Penjaminan tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud menjabat.

j. Pengungkapan hal-hal penting lainnya.

Meskipun Perseroan dinilai telah menerapkan *Good Corporate Governance* sesuai dengan aturan, masih terdapat kekurangan atau kelemahan dalam penerapan *Good Corporate Governance* di Perseroan, hal ini disebabkan oleh:

- a. Perseroan belum memiliki Komisaris Independen. Hal ini mengakibatkan penilaian atas Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris dapat dikatakan belum sesuai dengan indikator/kriteria *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Penjaminan.
- b. Perseroan tidak memiliki kebijakan terkait dengan pelaporan hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Hal ini mengakibatkan penilaian atas indikator Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dapat dikatakan belum sesuai dengan indikator/kriteria *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Penjaminan.
- c. Perseroan tidak memiliki kebijakan terkait dengan pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Hal ini sangat mempengaruhi hasil penilaian terkait dengan pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% atau lebih.
- d. Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah masih belum sempurna, serta tidak disampaikannya perbandingan rasio gaji tertinggi dan terendah. Hal ini mengakibatkan penilaian atas Penilaian kebijakan remunerasi dan

fasilitas lain dianggap belum sesuai dengan aturan *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Penjaminan.

Dari kesepuluh indikator/kriteria penilaian penerapan *Good Corporate Governance* di Perseroan, indikator/kriteria yang dinilai penerapannya telah sangat sesuai dengan aturan diantaranya:

- a. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan, dengan tingkat kesesuaian sebesar 100%.
- b. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal, dengan tingkat kesesuaian sebesar 93%.
- c. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan, dengan tingkat kesesuaian sebesar 87%.
- d. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan tingkat kesesuaian sebesar 80%.

Dengan demikian, dapat disimpulkan pula bahwa Perseroan sudah berhasil menerapkan 40% dari indikator/kriteria penilaian penerapan *good corporate governance* pada Perusahaan penjaminan.

Dalam rangka meningkatkan atau menyempurnakan penerapan *good corporate governance* yang sangat sesuai dengan indikator/kriteria dari penerapan *good corporate governance* pada Perusahaan Penjaminan, maka diperlukan tindak lanjut atas hasil penilaian tersebut. Tindak lanjut ini meliputi tindakan korektif yang diperlukan dari indikator/kriteria yang dinilai masih belum sesuai dengan penerapan *good corporate governance* pada Perusahaan penjaminan.

Adapun rencana tindak korektif Perseroan terhadap indikator/kriteria penilaian penerapan *good corporate governance* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tindakan Korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
Mengisi posisi Komisaris Independen	Selambat-lambatnya Januari 2019		
Pembentukan Komite Audit	Selambat-lambatnya Januari 2019	Belum terisinya posisi Komisaris Independen	
Pengangkatan Anggota Komite Audit	Selambat-lambatnya Januari 2019	Belum terbentuknya Komite Audit	Tenaga ahli bidang keuangan/hukum diluar struktur SDM Perseroan

LAPORAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)



CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Sebagai bentuk kepedulian Perseroan kepada lingkungan dan masyarakat, maka Perseroan secara rutin tiap tahunnya menyalurkan biaya CSR kepada sasaran yang tepat, baik itu kepada korban bencana alam, kepada yayasan yatim piatu, ataupun bantuan lainnya. Berikut ini adalah penyaluran dana CSR PT Jamkrida Jabar pada periode tahun 2017:

DAFTAR BANTUAN CSR PERIODE 2017

NO	NAMA KEGIATAN CSR	TANGGAL	OUTPUT CSR
1	Partisipasi pengembangan masjid al ukhuwwah komplek griya saluyu rancasari bandung	03/03/17	Rp 3,000,000.00
2	Partisipasi kegiatan maghrib mengaji di Masjid As Salam Jatinangor	09/05/17	1. Al-Quran 30 Juz @ 30 pcs 2. Terjemah Al-Quran @ 10 pcs 3. Buku Iqra @ 20 pcs
3	Partisipasi program desa berdaya Rumah Zakat	16/05/17	Rp 5,000,000.00
4	Partisipasi kegiatan diskusi publik PILKADA Jawa Barat	23/05/17	Rp 5,000,000.00
5	Partisipasi kegiatan pesantren ramadhan yang diselenggarakan oleh YPIS Nur Ummat Al Baihaqi	07/06/17	Rp 5,000,000.00

NO	NAMA KEGIATAN CSR	TANGGAL	OUTPUT CSR
6	Partisipasi untuk tunjangan hari raya (THR) bagi pengurus RW 11 Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu Kota Bandung	09/06/17	Rp 750,000.00
7	Partisipasi kegiatan PKPU Human Initiative	19/06/17	Rp 5,000,000.00
8	Partisipasi kegiatan Program Tahfizh di Yayasan Pusat Layanan Pendidikan	04/07/17	Rp 5,000,000.00
9	Partisipasi pembangunan pengembangan madrasah yayasan pendidikan al muhajirin YPM	26/07/17	Rp 3,000,000.00
10	Partisipasi kegiatan Program Insan Mulia Cipta Madani pembuatan rumah asrama	26/07/17	Rp 3,000,000.00
11	Partisipasi kegiatan syukuran maulid abah aos ke 75 yayasan sirnarasa cisirri	07/08/17	Rp 5,000,000.00
12	Partisipasi hewan qurban di DKM Miftahul Hidayah Kp. Cigintung Desa Tegalgede Kec. Pakenjeng Kab. Garut	15/08/17	Rp 19,000,000.00
13	Partisipasi hewan qurban di Forum BUMD	21/08/17	Rp 30,000,000.00
14	Partisipasi pembangunan masjid DKM Kampus Unpad	21/08/17	Rp 1,500,000.00
15	Partisipasi pemotongan hewan qurban di Ikapen Bank bjb	29/08/17	Rp 3,000,000.00
16	Partisipasi Kegiatan Qurban di SMK Asyariah Ciamis	31/08/17	Rp 10,000,000.00

NO	NAMA KEGIATAN CSR	TANGGAL	OUTPUT CSR
17	Partisipasi Kegiatan Pembangunan Masjid Al-Fauzu Cinunuk	14/09/17	Rp 3,000,000.00
18	Partisipasi kegiatan Acara Tahun Baru Islam DKM Parigi, Desa Tegal Jaya, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut	19/09/17	Rp 1,000,000.00
19	Partisipasi kegiatan Acara Santunan Yatim Piatu dan Janda di Jasinga, Bogor.	27/09/17	Rp 5,000,000.00
20	Partisipasi dalam rangka menyukseskan Acara Adat Tradisi dan Budaya "Guar Bumi"	16/10/17	Rp 2,500,000.00
21	Partisipasi dalam rangka menyukseskan Acara Muslim Festival "Titanium"	19/10/17	Rp 2,500,000.00
22	Partisipasi dalam rangka menyukseskan Acara Bakti Sosial LSM Bina Keluarga Sakinah	06/11/17	Rp 2,000,000.00
23	Partisipasi dalam rangka menyukseskan Pembangunan Sumur Bor RW 4, Pasir Endah, Ujung Berung	10/11/17	Rp 1,000,000.00
24	Partisipasi dalam rangka menyukseskan Acara Perluasan Lahan Madrasah/Mesjid Baitur Ruhiah	11/12/17	Rp 5,000,000.00



LAPORAN AUDIT



**SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
PT JAMKRIDA JABAR**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Budhi Muljawan
Jabatan : Direktur Utama
Alamat kantor : Jl. Soekarno Hatta No.592 – Bandung

Nama : Budi Setyono
Jabatan : Direktur Keuangan
Alamat kantor : Jl. Soekarno Hatta No.592 – Bandung

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perseroan Terbatas Jamkrida Jabar;
2. Laporan Keuangan Perseroan Terbatas Jamkrida Jabar telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Perseroan Terbatas Jamkrida Jabar telah dimuat secara lengkap dan benar;
4. Laporan Keuangan Perseroan Terbatas Jamkrida Jabar tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perseroan Terbatas Jamkrida Jabar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi

Bandung, 12 Maret 2018

ttd

Materai
Rp 6.000,-

ttd

Tri Budhi Muljawan
Direktur Utama

Budi Setyono
Direktur Keuangan



Nomor: LAI/GA/SPD/18019

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamkrida Jabar

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jamkrida Jabar yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jamkrida Jabar tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik
Husni, Mucharam & Rasidi



Drs. Supandi, CA., CPA.

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0069

Izin KAP No. KEP-662/KM.17/1998

12 Maret 2018

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
Kas dan Setara Kas	2a, 3	160,417,542,006	157,996,752,656
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	2e, 4	3,626,093,699	1,148,278,781
Beban Dibayar Dimuka	2f, 5	47,639,279,467	21,686,583,141
Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo			
<i>Setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp498.036.492 dan Rp521.873.274 per 31 Desember 2017 dan 2016</i>	2d, 6	40,001,963,508	16,478,126,726
Aset Tetap			
<i>setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp2.387.794.749 dan Rp1.601.094.296 per 31 Desember 2017 dan 2016</i>	2g, 7	12,599,990,672	11,802,315,306
Aset Pajak Tangguhan	2m, 16d	6,393,223,402	4,888,902,564
Aset Lain-Lain	2h, 8	500,848,337	790,198,958
JUMLAH ASET		271,178,941,092	214,791,158,132
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Utang Pajak	2m, 16a	203,224,028	370,528,895
Utang Regaransi	9	850,238,368	1,697,520,319
Beban yang Masih Harus Dibayar	10	941,902,790	540,008,188
Penampungan Sementara	11	15,328,730,852	10,511,434,570
Utang Lancar Lainnya	12	275,269,129	252,331,594
Pendapatan Diterima Dimuka	13	89,433,031,083	43,118,242,630
Cadangan Klaim	2p, 14	3,457,809,341	4,872,256,646
Liabilitas Jangka Panjang	2l, 15	909,014,313	1,424,320,291
JUMLAH LIABILITAS		111,399,219,904	62,786,643,133
EKUITAS			
Modal	17	153,200,000,000	145,200,000,000
<i>Modal dasar sebesar dari 30.000 lembar saham, modal ditempatkan dan disetor penuh : 31 Desember 2017 dan 2016 berturut-turut sebanyak 15.320 dan 14.520 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000.000 per lembar saham.</i>			
Cadangan Umum	17	2,734,815,926	1,379,631,574
Saldo Laba	17	4,105,753,607	5,420,737,408
Keuntungan pengukuran kembali imbalan pasti setelah aset pajak tangguhan	17	(260,848,345)	4,146,016
JUMLAH EKUITAS		159,779,721,188	152,004,514,998
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		271,178,941,092	214,791,158,132

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
PENDAPATAN PENJAMINAN			
Imbal Jasa Penjaminan / Kafalah	2j, 2n, 18	30,928,168,179	29,562,009,755
Beban <i>Fee Based Income</i> Bank	2j, 2n, 18	(61,781,599)	(53,509,447)
Beban Komisi Agen	2j, 2n, 18	(3,732,520,703)	(3,668,597,013)
Restitusi IJP	2j, 2n, 18	(864,443,212)	(891,998,322)
Manajemen <i>Fee</i>	2j, 2n, 18	1,399,996,300	857,052,747
JUMLAH PENDAPATAN PENJAMINAN		27,669,418,965	25,804,957,720
BEBAN KLAIM			
Beban Klaim	2j, 2p, 20	(14,274,790,505)	(8,159,425,882)
Beban Cadangan Klaim	2j, 2p, 20	1,414,447,305	(2,240,279,820)
Beban Regaransi	2j, 2n, 20	(9,770,245,974)	(8,999,662,447)
JUMLAH BEBAN KLAIM		(22,630,589,174)	(19,399,368,149)
PENDAPATAN PENJAMINAN BERSIH		5,038,829,791	6,405,589,571
Pendapatan Investasi	2j, 19	13,625,450,700	12,383,229,647
Pendapatan (Beban) Lain-lain		978,523,891	1,146,619,890
BEBAN USAHA			
Beban Operasional	2j, 21	(1,196,315,041)	(1,040,922,082)
Beban Sumber Daya Manusia	2j, 21	(9,738,935,138)	(9,491,203,288)
Beban Administrasi dan Umum	2j, 21	(3,359,775,033)	(2,537,935,618)
JUMLAH BEBAN USAHA		(14,295,025,212)	(13,070,060,988)
LABA SEBELUM PAJAK		5,347,779,170	6,865,378,120
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
Beban Pajak Kini	2m, 16b	(2,658,014,948)	(2,496,216,751)
Manfaat Pajak Tangguhan	2m, 16d	1,415,989,384	1,051,576,039
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN		(1,242,025,564)	(1,444,640,712)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		4,105,753,606	5,420,737,408
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			
POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI			
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		(353,325,814)	(42,743,663)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi	16d	88,331,454	10,685,916
JUMLAH POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI		(264,994,361)	(32,057,747)
LABA KOMPREHENSIF		3,840,759,246	5,388,679,661

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



Jl. Soekarno Hatta No.592, Buahbatu,
Kota Bandung, Jawa Barat 40286



<http://jamkrida-jabar.co.id/>



Tel/Fax :022-7504777/7563333
Email : info@jamkrida-jabar.co.id